

**KARTELISASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Oleh

ANANDA PUTRI SUJATMIKO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE CARTELIZED OF POLITICAL PARTY ON BANDAR LAMPUNG GENERAL ELECTION OF REGIONAL HEAD IN 2015

By:

ANANDA PUTRI SUJATMIKO

The first synchronously Bandar Lampung General Election of Regional Head in 2015 has been coloured by renomination of an incumbent, called Drs. Herman HN, M.M. His political survey such as popularity and electability has elevated accross the time, made him got plenty of supports from six political parties, such as PDIP (Indonesian Democratic Party of Struggle), Democratic Party, PKS (Prosperous Justice Party), Partai Nasional Demokrat (National Democrats), PKB (the Nation Awakening Party), and Partai Gerindra (Great Indonesia Movement Party). In addition, those parties denoted certain features of cartel party, such as prevent competition and promiscuous in making coalition, office-seeking oriented and some consideration of rationality.

Furthermore, this research was aimed to analyze reflection of cartelized party system in Bandar Lampung General Election of Regional Head in 2015, and to determine the cause of party pragmatism in recruitment candidates for election.

Moreover, type of this research is descriptive-explanatory and qualitative as its approaching. Grand theory of this research is collective action from rational choice theory, cartelization party is adapted from Katz and Mair's concept of cartel party, developed by Ambardi, and more theories who became analytical tools. Whereas the method of data collection of this research is interview, documentation and observation.

The result of this research generated two main points. First, political cartel is occurred in Bandar Lampung, which is marked by party ideology became a non-factor in determining party behavior and in making coalitions parties are promiscuous, office-seeking orientation on recruitment of mayor candidates which is tend to stand for bureaucracy and survey results, and the used of new campaign technology such survey results which is another features of capital intensive campaign of cartel party. Second, based on the key concept rational choice theory with its collective action approaching, it is concluded that the pose of pragmatism above party was supported by party's reluctance to take a risk to compete then losing, however they want to maximize the potential of victory. Parties became free riders, because party did not work too hard for the winning of incumbent. It is caused by enormous public alignments to the incumbent. Thus, no matter how small party contribution to their coalition, each party will still receive as large as advantage distribution.

Key words: cartel party, incumbent, general election, rational choice, political party

ABSTRAK

KARTELISASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

ANANDA PUTRI SUJATMIKO

Pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung serentak pertama diikuti pencalonan kembali petahana Herman Hasan Nusi. Tingginya survei popularitas dan elektabilitasnya, membuatnya mendapat dukungan dari enam partai politik yakni PDIP, Partai Demokrat, PKS, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Gerindra. Keenam partai memperlihatkan karakteristik partai kartel yakni dengan menghindari persaingan dengan berkoalisi tanpa ideologi dan menggantinya menjadi *office-seeking oriented* serta pertimbangan rasionalitas. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis refleksi sistem kartelisasi partai pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015, serta mengetahui penyebab pragmatisme partai dalam rekrutmen kandidat kepala daerah.

Adapun tipe penelitian yakni *descriptive-explanatory* dengan pendekatan kualitatif. *Grand theory* yang dipergunakan adalah *rational choice theory* dengan

pendekatan *collective action*, konsep partai kartel yang diadaptasi dari Katz dan Mair serta Ambardi, juga teori lain yang menjadi alat analisis penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menghasilkan dua poin. Pertama, telah terjadi kartel politik di Kota Bandar Lampung ditandai dengan meleburnya ideologi partai dan koalisi serba bisa, orientasi *office-seeking* dalam perekrutan calon kepala daerah dengan keberpihakan pada kalangan birokrasi dan hasil survei, dan penggunaan *new campaign technology* berupa hasil survei yang juga merupakan karakteristik *capital intensive campaign*. Kedua, berdasarkan *rational choice theory* dengan pendekatan *collective action*, disimpulkan bahwa pragmatisme partai didukung atas keengganan partai untuk mengambil resiko bersaing dan kalah, tetapi ingin memaksimalkan potensi kemenangan. Partai koalisi petahana berubah menjadi *free rider*, karena partai tidak bekerja keras untuk memenangkan kandidat. Penyebabnya adalah keberpihakan masyarakat sudah tinggi kepada petahana. Sehingga, sekecil apapun kontribusi partai pada koalisi, masing-masing partai tetap akan mendapatkan distribusi manfaat yang sama besar.

Kata Kunci : partai politik, partai kartel, pilihan rasional, , pilkada, petahana

**KARTELISASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Oleh

ANANDA PUTRI SUJATMIKO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **KARTELISASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : **Ananda Putri Sujatmiko**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021006**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

Budi Kurniawan, S.IP., M.PP.
NIP 19811229 200604 1 002

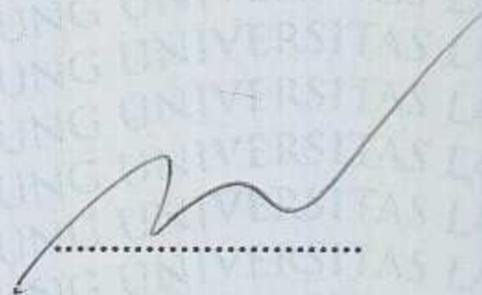
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

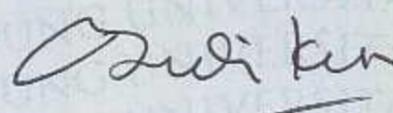
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

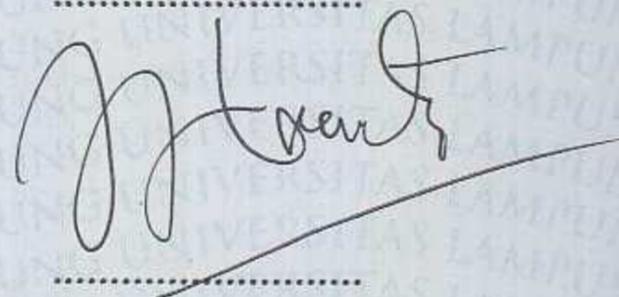
Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



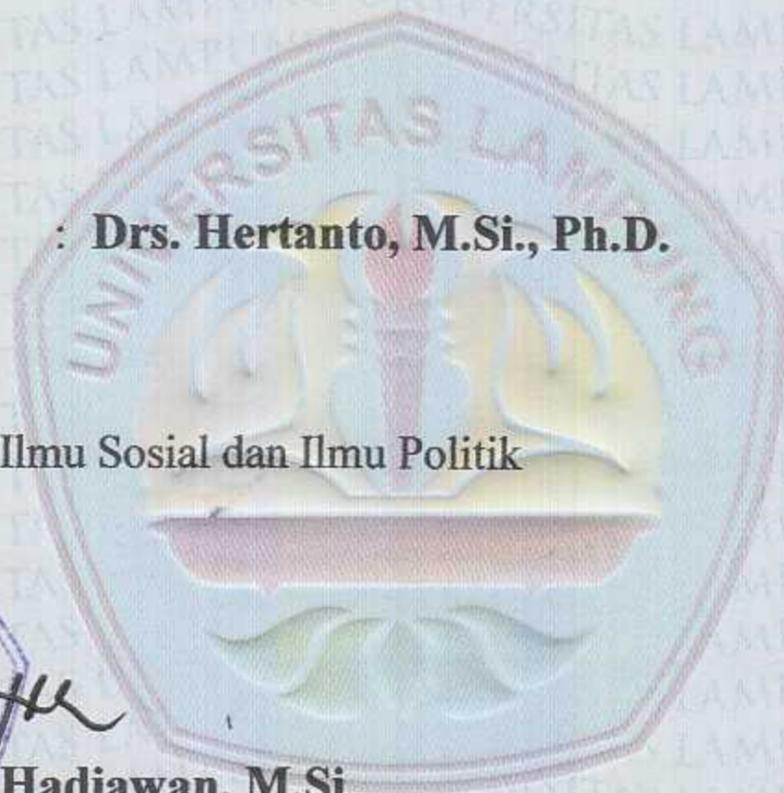
Sekretaris : **Buđi Kurniawan, S.IP., M.PP.**



Penguji : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

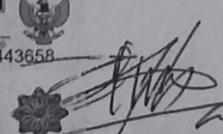
Tanggal Lulus Ujian : 14 Maret 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Maret 2016



Ananda Putri Sujatmiko
NPM. 1216021006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ananda Putri Sujatmiko, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yang dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 8 Juni 1995 dari pasangan Bapak Drs.Sujatmiko dan Ibu Yuniar.

Jenjang karir akademis penulis dimulai dari SDN 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung di tahun 2006, kemudian dilanjutkan di SMPN 1 Bandar Lampung dan lulus tahun 2009, setelah itu melanjutkan ke MAN 1 Bandar Lampung dan tamat di tahun 2012. Selanjutnya, pada tahun 2012, penulis tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur ujian tertulis.

Selama duduk di bangku perkuliahan, penulis sempat mengikuti beberapa kegiatan baik di bidang akademis, organisasi, aktivitas sosial, serta mencoba melakukan sejumlah pekerjaan dan menghasilkan sejumlah publikasi. Di bidang akademis, penulis pernah menjadi perwakilan kampus untuk mengikuti perlombaan debat politik tingkat Nasional, dalam rangka PolGov (Political Government) Days tahun 2014, yang diselenggarakan oleh JPP Universitas Gadjah Mada. Selain itu, penulis juga sempat diamanatkan untuk menjadi asisten

dosen untuk beberapa mata kuliah seperti Pengantar Ilmu Politik untuk jurusan Hubungan Internasional, Metodologi Politik dan Pemerintahan, dan Bahasa Inggris untuk jurusan Ilmu Pemerintahan.

Pada dunia keorganisasian, penulis sempat menjadi *Intern Buddy* bersama AIESEC OE Unila LC Bandung di tahun 2014, anggota Sekretaris Biro 1 bidang Kajian dan Keilmuan HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2015, dan Sekretaris Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Labpolokda) Universitas Lampung sejak tahun 2015 hingga sekarang. Bersama Labpolokda, penulis telah menghasilkan sebuah buku berjudul “Sukses Kuliah Ala Anak FISIP” yang ditulis bersama empat rekan Lab lainnya di tahun 2015.

Selain itu, penulis juga aktif mengikuti sebuah organisasi sosial bersifat sukarelawan yakni Komunitas Jendela Lampung di tahun 2015 hingga sekarang. Di samping kegiatan sosial, penulis juga pernah bekerja sebagai *freelance* tutor Bahasa Inggris pada Mr. Bob Cabang Kampung Inggris Pare sejak tahun 2013 hingga 2015, dan bekerja sebagai *private English tutor* untuk semua umur sejak tahun 2012 hingga sekarang. Tidak hanya itu, penulis pun pernah mengikuti sejumlah aktivitas penelitian, baik yang dilakukan oleh konsultan internal kampus, maupun institusi pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MOTTO

“Well done is better than well said”

(Benjamin Franklin)

“Hiduplah dengan keberuntungan dan keberuntungan sesungguhnya adalah doa seorang ibu.”

(Ananda Putri S)

“In every limitation, there will be an occasion for those who believe in limitless act.”

(Ananda Putri S)

“Lebih baik bersusah payah belajar daripada bersusah payah menahan sulitnya hidup karena kebodohan.”

(Anonym)

“Victory belongs to the most persevering.”

(Napoleon Bonaparte)

It is not a sprint that you need to rush out everything. It is a marathon that you should enjoy each process.

(Anonym)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas seluruh cinta dan kasih sayang dari Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan cinta dan kasih sayang, skripsi ini dipersembahkan untuk :

Ayah dan Ibuku tercinta

Drs. Sujatmiko dan Yuniar

Adik-adikku tersayang

Anggia Cahyani Sujatmiko dan Raisya Haura Sujatmiko

Sahabat-sahabat seperjuangan, serta

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas seluruh cinta dan kasih sayang dari Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanjungan shalawat serta salam tak lupa dinjunjung kepada pejuang terbesar umat, Nabi Muhammad SAW, sekaligus seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi berjudul “Kartelisasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015” ini, merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan. Ikhwal tersebut disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan bentuk kritik serta saran yang membangun atas pengembangan skripsi ini. Selain itu, penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bentuk

penelitian awal yang dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi peneliti lain di kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Yuniar dan ayahanda Drs. Sujatmiko yang doa, keringat, bahkan air matanya tidak akan pernah berhenti tumpah demi tercapainya mimpi si anak sulungnya. Ribuan kata terima kasih bahkan jutaan materi tidak akan pernah bisa membayar kasih sayang yang telah diberikan selama hidup penulis. Terima kasih ibu dan ayah, Nanda mencintai kalian walaupun mungkin kalian tidak akan pernah menyadarinya. Semua yang dikerjakan hingga detik ini, adalah untuk membuat kalian bangga. Hanya untuk kalian;
2. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membimbing penulis selama menempuh proses perkuliahan ;
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kesempatan, tak lupa juga arahan, dukungan, nasehat, solusi, dan motivasi selama proses perkuliahan;
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan motivasi melalui pengalaman lapangan selama proses perkuliahan;

5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, nasehat, pembelajaran, sekaligus motivasi selama penulis menempuh karir akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang tak bosannya meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, nasehat, serta kesempatan yang begitu besar bagi penulis untuk mengeksplorasi gagasan ke dalam sejumlah tulisan ilmiah, serta sebagai dosen yang telah membuka jendela pemikiran penulis atas dunia keilmuan yang begitu luas di depan ;
7. Bapak Budi Kurniawan, S.IP., M.Pub.Pol. selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi, yang juga tak kalah memberikan arahan, dukungan, semangat, motivasi, saran, kritik, sekaligus kesempatan yang begitu besar kepada penulis selama penulisan skripsi ini maupun karya ilmiah lain. Tidak hanya itu, sebagai seorang dosen, penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya atas jendela ilmu yang luasnya tak terhingga, serta ilmu yang bermamfaat di berbagai bidang, yang telah diberikan, hingga berhasil merubah pola pikir penulis pada banyak aspek;
8. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D selaku Dosen Penguji skripsi, yang telah memberikan tumpukan kritik, saran, masukan, solusi, serta motivasi yang sangat membangun kapasitas penulilis sebagai seorang akademisi di dalam penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak hal, tidak hanya ilmu, melainkan juga pembelajaran kehidupan, kesempatan untuk

berkarya di dunia akademis, pengharagaan atas kewajiban yang telah ditunaikan, serta pengetahuan yang tidak akan pernah tergerus waktu;

10. Adik-adikku Anggia Cahyani Sujatmiko dan Raisya Haura Sujatmiko yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, membuat penulis sadar bagaimana harus bertindak sebagai seorang kakak yang harus bisa memotivasi adik-adiknya. Terima kasih adik-adikku atas seluruh senyum, tawa, tangis, canda, serta amarah yang kita bagi bersama. Ayo berjuang sama-sama demi membahagiakan ayah dan ibu!;
11. Seluruh narasumber penelitian, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Kota Bandar Lampung, Sekretaris DPD PKS Kota Bandar Lampung, Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Bandar Lampung, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, yang sedang menjabat pada saat penelitian dilaksanakan;
12. Sahabat-sahabat yang semoga tidak akan pernah putus kasih sayangnya hingga akhir waktu, Ika Meytasari, Marliyani, Winda Dwiastuti Herman, Saiful Zuhri, Rizky Arie Kurniawan, Arlisia Filza. *I love you guys* terserah mau seburuk apa kalian! Terima kasih telah selalu ada di saat tangis hingga canda. Terima kasih sudah bersedia menjadi pendengar setia, menyediakan waktu untuk meladeni tingkah-tingkah konyol. Terima kasih atas kesediannya berbagi senyum, berbagi makanan, berbagi pundak untuk bersandar, berbagi kata-kata yang menenangkan dan memotivasi, berbagi tempat untuk melepas penat, berbagi tawa tanpa beban yang menenangkan, bahkan berbagi kalimat sinis yang penuh pembelajaran. Terima kasih!!;

13. Sahabat terkasih, Debby Pusparani atas dukungan, semangat, dan doa yang tulus diberikan. *Will you always call me 'rapper' 'till the day we grow old? LOL* Sama-sama sukses yaa kita, Depus! Aamiin.
14. Kepada 9 orang perempuan paling tersayang Aidila Putri Yazir, Dian Risnawati, Defi Yunia Sari, Dyan Novita Yasha, Ika Meytasari, Marliyani, Winda Dwiastuti Herman, dan Aulia Kartika Asih. Terima kasih atas pertemanan penuh canda tanpa beban yang telah diberikan. *Guys*, jangan pernah lupa saat kesembilan pasang tangan kita masih sangat dekat bergandengan ya, kesembilan tubuh kita masih akrab berpelukan, dan kesembilan bibir kita masih sangat tulus dan iklas mengumbar senyum dan tawa di kala bersama. Sukses selalu untuk kita semua. Aamiin;
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2012, Riska Fajrianti, Lintang Yunita, Dalilah, Ari Hervina, Nekroma, Baihaki, Yoga Pratama JP, Rangga Perdana, Rian Rinanda, Fajar Imani, Fitria Zainubi, Bakti Saputra, Adelita Riantini, M.Tsaqib Shobri, Arya Baskoro, Bang Kirun, Nico Purwanto, Hanafi Nugroho, Dian Fernando, Bagas Aji, Wahid Nur Rohman, Yoga Swasono, Dwi Dian, Nabil Abrar, Novella Putriasafa, Yogi Irawan, Surya Mahendra, Juliandi, Anggun, Ayu Rara, Bang Duli, Maya Yuliantina, Erin, Galih, Ira Yuleni, Nissa Nurul, Arum Rahma, Bayu, Astari Puja, Yessy Yolanda, Oktanina S, Dita Adistia, Vico Bagja, Eri Rosalia, Guntur Ardyan, Intan Kumala, Nasira, Luthfi Imam, Juni Renaldu, Juwanda, Maldy Wijaya, Meta Fitriani, Nugraha Wijaya, Primadya Rosa Ayu, Agustin Darma, Rendi Noverdi, Rizki Hendarji, Rosim Nyerupa, Suci Pebrina, Tri Umpu, Ulina Islami, Hezby Fauzan, dan teman-teman lain yang pernah memberikan

senyum semangat dan dukungan serta pengalaman. Semoga kita semua sukses dengan jalan kita masing-masing. Aamiin;

16. Abang-abang dan mbak-mbak 2011, Genta Riskiansyah, Shedy Apriliza, Rendy Mase Bustami, Ulil Ilmiati, Endah Hapsari, Diki Thantawi, Wirda Sari, terima kasih atas bantuan, saran, dukungan, serta petunjuk dari kalian. Sukses untuk kalian semua. Aamiin.

17. Adik-adik jurusan Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional angkatan 2013 sampai 2015 Danang Marhaens, Vivi Alvionita, Fina Ria Tisa, Resti, Rian, Yogi, Kenn, Nadia, Mike Nurjanah, Iranda, Bagus, Dhean, Faisal, Tiara, Gita, Ulfa, Ezio, Meissandra, Nadira Aulia, Citra Amalia, Chandra Anwar, Tia Panca, Tyas, Indah, dan lain-lain. Terima kasih atas perjalanan, semangat, senyum, dukungan, ilmu, serta pembelajaran kehidupan. Semoga sukses!

18. Teman-teman KKN Desa Lebung Lawe Way Kanan tahun 2015, Raynaldo Pratama, Depo Kurniawan, Rizka Devita Jaya, Ratih Safria Handika, Achmad Subari, Deni Yuda Pratama, dan Eva Mulia Sari. Terima kasih untuk pembelajaran kehidupan serta motivasi selama 40 hari. Semoga kita tetap bisa menjadi saudara. Sukses untuk kita semua! Aamiin;

19. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 14 Maret 2016

Ananda Putri Sujatmiko

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pilihan Rasional dalam Studi Penentu Keputusan Politik Partai Politik	16
B. Pendekatan dalam Teori <i>Rational Choice</i>	21
C. Sistem Kepartaian dalam Partai Politik.....	27
1. Duverger: <i>Founding Father</i> Sistem Kepartaian Dunia	29
2. Robert Dahl (1966): Pembagian Arena Kompetisi Partai	34
3. Lipset dan Rokkan (1967): Pengembangan Kompetisi Partai	37
4. Jean Blondel (1968): Ukuran dan Kekuatan Relatif Partai	40
5. Sistem Kepartaian Sartori.....	41
6. Katz dan Mair (1995): Kemunculan <i>Cartel Party</i>	46
7. Andreas Uffen (2006): <i>Presidential Parties</i>	57
D. Manifestasi Pragmatisme dalam Praktik Politik Melalui Perspektif <i>Rational Choice</i>	59
E. Idealisasi Fungsi Partai Politik.....	66
F. Konsep Pemilihan Umum.....	71
G. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	72
H. Kerangka Pikir.....	74
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	78
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	82
C. Fokus Penelitian	84
D. Jenis Data	86

E. Teknik Penentuan Informan	88
F. Teknik Pengumpulan Data	89
G. Teknik Pengolahan Data	91
H. Teknik Analisis Data	92
I. Teknik Keabsahan Data	95
J. Kesimpulan.....	96

IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung	97
B. Profil Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015	102
1. Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin	103
2. Herman HN dan Yusuf Kohar	105
3. Tobroni Harun dan Komarunizar	110
C. Gambaran Umum Partai Pengusung dan Partai Pendukung Petahana	114
1. Partai Pengusung Petahana	115
a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Partai Nasionalis-Marhenis	115
b. Partai Demokrat (PD): Partai Nasionalis-Religius	116
2. Partai Pendukung Petahana	116
a. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : Partai Dakwah Islamis	117
b. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) : Partai Nasionalis “Restorasi”	118
c. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Partai Nasionalis Agamis... ..	118
d. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra): Partai Nasionalis-Pancasilais	120
D. Analisis Ideologi Partai Pendukung dan Partai Pengusung Herman HN	120

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Partai Kartel di Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015	126
1. Meleburnya Ideologi dan Koalisi Serba Bisa Jadi Pilihan Fundamental Partai pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015	132
a. Miskinnya Pemahaman dan Penghayatan Ideologi juga Arus Perjuangan Partai	133
i. PDIP : Ideologi Sekedar Jargon, Perjuangan Tanpa Penghayatan	135
ii. Partai Demokrat : Ambiguitas Ideologi hingga Perjuangan yang SBY-Centric.....	140
iii. PKS : Potret Ideologi Politik Dilematis.....	145
iv. Partai Nasdem : Bingung Ideologi, Cacat Konsep Restorasi.....	148
v. PKB: Nasionalisme Dangkal dan Kaburnya Arus Perjuangan Partai	151

vi. Partai Gerindra : Elit Salah Ideologi, Arus Perjuangan Normatif Prabowo- <i>centric</i>	153
b. Dominasi Kebijakan Populis Partai Politik	163
i. PDIP : Sinkronisasi Dasa Prasetya sebagai Basis Perjuangan Partai	157
ii. Partai Demokrat : Program Tanpa Ideologi.....	158
iii. PKS : Ikut Program Petahana, Evaluasi ‘Dakwah’ Tetap Jalan	159
iv. Partai Nasdem : Restorasi Indonesia artinya “Ikut Saja”	160
v. PKB: Kelompok Nahdliyin Jadi Prioritas.....	162
vi. Partai Gerindra : Jargon Kosong Manifesto Perjuangan Partai	163
c. Pragmatisme Koalisi Partai.....	164
i. PDIP : “Kita Tidak Berdasarkan Ideologi”	165
ii. Partai Demokrat : “Koalisi adalah Bicara Kepentingan”	166
iii. PKS : Produk Hukum Koalisi Serba Bisa	167
iv. Partai Nasdem : “Partai Islam dan Nasionalis Berkoalisi, Adalah Upaya Membangun Citra Nasionalis dan Religious”	169
v. PKB: “Ideologi Bukan Pertimbangan dalam Pilkada”	170
vi. Partai Gerindra : “Paling Penting Kesamaan Visi dan Misi”	171
2. Pertimbangan Orientasi <i>Office-Seeking</i> dalam Perekrutan Kandidat.....	172
a. Pertimbangan Rasional dalam Rekrutmen Kontestan Pilkada ...	173
i. PDIP : Herman HN adalah Keputusan Survei dan Faktor Bunda Eva.....	174
ii. Partai Demokrat : Herman HN : Hasil Survey; Yusuf Kohar : Hasil Bargaining Politik.....	176
iii. PKS : Hasil Survei dan Kader Partai Jadi Pertimbangan	180
iv. Partai Nasdem : Lagi-Lagi Survei Jadi Penentu	181
v. PKB: Hasil Pertimbangan Popularitas, Elektabilitas, dan “Isi Tas”	181
vi. Partai Gerindra : Aklamasi Herman HN.....	183
b. Mekanisme Partai dalam Melakukan Penetapan Kandidat Kontestan Pilkada	185
i. PDIP : Nafas Kartel Politik dalam Produk Hukum Partai	185
ii. Partai Demokrat : Survei Penentu Akhir	189
iii. PKS : Eksklusifitas Partai Menjemput Herman HN.....	192
iv. Partai Nasdem : Survei Herman HN Tinggi Singkirkan Ketua DPD Partai	195
v. PKB: Hanya Herman HN, Indikasi Hilangnya <i>Sense of Belongings</i> Kader atas Partainya	197
vi. Partai Gerindra : Fungsi Kaderisasi dan Pendidikan Politik Gagal, jadi Awal Partai Jemput Herman	200

3. Kampanye Mahal Partai Terhalang PKPU	203
a. <i>Back to Traditional Campaign: Konsolidasi Internal Partai</i>	205
b. Survei sebagai Wujud <i>New Campaign Technology</i>	213
B. Analisis Internal dan Eksternal Sikap Pragmatis Partai Politik	218
1. Analisis Faktor Internal: dari <i>Rational Choice</i> dan Aksi Kolektivitas hingga Dampak Laten Cacatnya Sejumlah Fungsi Partai	222
2. Analisis Faktor Eksternal: Pragmatisme Masyarakat, hingga Produk Hukum yang Membatasi.....	230
C. Kesimpulan	235

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	242
B. Saran	244

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Survey Popularitas dan Elektabilitas Bakal Calon Walikota di Kota Bandar Lampung.....	4
2. Perkembangan Sistem Kepartaian	28
3. Tipologi Sistem Kepartaian Giovanni Sartori.....	43
4. Tipologi Sistem Multi Partai oleh Sartori	44
5. Dimensi Perilaku Partai dalam <i>Competitive</i> versus Sistem Kartelisasi Partai	52
6. Kekerabatan Birokrasi Sebagai Anggota DPR dan DPD RI Periode 2009 - 2014	65
7. Realisasi UU Produksi DPR RI	65
8. Kisi-Kisi Wawancara	85
9. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005	98
10. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2010	99
11. Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010	100
12. Nama pasangan calon walikota dan wakil walikota beserta nomor urut, dan koalisi partai politiknya	101
13. Pengalaman Pekerjaan Herman HN	107
14. Pengalaman Pekerjaan Yusuf Kohar.....	108
15. Pengalaman Pekerjaan Komarunizar	111
16. Pengalaman Organisasi Komarunizar	112
17. Kartel Politik dari Partai Pengusung dan Pendukung Herman HN dengan Indikator Peleburan Ideologi dan Perilaku Koalisi Serba Bisa	172
18. Kartel Politik dari Partai Pengusung dan Pendukung Herman HN dengan Indikator Pertimbangan <i>Office Seeking</i> dalam Perekrutan Kandidat.....	202
19. Agenda Konsolidasi Pemenangan Herman HN	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Negara Digambarkan ke dalam Dispersi (Penyebaran) Kekuatan Sistem Partai oleh Sartori.....	44
2. Bagan Kerangka Pikir Analisis Sistem Kartelisasi Partai pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015	76
3. Proses Penelitian Kualitatif	80
4. Proses Penelitian Kualitatif yang Diadaptasi Peneliti.....	81
5. Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah dari PDIP	186
6. Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah dari Partai Demokrat.....	190
7. Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah dari PKS.....	192
8. Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah dari Partai Nasdem.....	196
9. Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah dari PKB	198
10. Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah dari Partai Gerindra	201
11. Konsolidasi Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar oleh PKS di Zona I ..	209
12. Konsolidasi Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar oleh PKS di Zona II ..	209
13. Suasana Peserta Rapat Konsolidasi Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar oleh PKS di Zona II.....	210
14. Konsolidasi Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar oleh Partai Demokrat di Kecamatan Teluk Betung Utara.....	210

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
AMJ	: Akhir Masa Jabatan
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APEKSI	: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
APK	: Alat Peraga Kampanye
BAPELKES	: Badan Pelatihan Kesehatan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPC	: Dewan Pengurus Cabang (nomenklatur khusus Partai Kebangkitan Bangsa)
DPD	: Dewan Pengurus Daerah
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah (nomenklatur khusus Partai Nasdem)
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPP	: Dewan Pengurus Pusat (nomenklatur khusus Partai Kebangkitan Bangsa)
DPARt	: Dewan Pengurus Anak Ranting
DPRt	: Dewan Pengurus Ranting
DPW	: Dewan Pengurus Wilayah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FORKAIL	: Forum Komunikasi dan Aksi Industrial
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Herman HN	: Herman Hasan Nusi
Humas	: Hubungan Masyarakat

IKASI	: Ikatan Anggaran Seluruh Indonesia
INVEST	: <i>Indonesia Votes and Election Studies</i>
IPHI	: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPSI	: Ikatan Pencak Silat Indonesia
KADINDA	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KIH	: Koalisi Indonesia Hebat
KMP	: Koalisi Merah Putih
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KoAk	: Komite Anti Korupsi
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KORPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia
KOSGORO	: Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LEMHANNAS RI	: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMKARI	: Lembaga Karyawan Islam
LKS	: Lembaga Kerja Sama
LO	: <i>Liaison Official</i>
LPGTK	: Lembaga Pelatihan Guru Taman Kanak-Kanak
LSI	: Lembaga Survey Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Muscab	: Musyawarah Cabang
MUSDA	: Musyawarah Daerah
NasDem	: Nasional Demokrat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
NU	: Nahdatul Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PAC	: Pengurus Anak Cabang

PAN	: Partai Amanat Nasional
Papaernas	: Partai Persatuan Pembebasan Nasional
Parpol	: Partai Politik
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Partai Murba	: Partai Musyawarah Rakyat Banyak
PARUGA	: Paguyuban Rukun Tetangga
PASI	: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
PERSANI	: Persatuan Senam Indonesia
PERPANI	: Persatuan Panahan Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PK	: Partai Keadilan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PLP	: Petugas Lapangan Penghijauan
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
SK	: Surat Keputusan
Setgab	: Sekretariat Gabungan
SMI	: Sri Mulyani Indrawati
SRMI	: Serikat Rakyat Miskin Indonesia
STIE	: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
STTN	: Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
TOM	: Tim Optimalisasi Musyarokah
TTKKDH	: Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir
UU	: Undang-Undang

UK : United Kingdom
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
YME : Yang Maha Esa

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sebagai bentuk amanat normatif atas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dan partisipatif, telah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sejatinya merupakan kerangka dasar otonomi daerah. Undang-Undang yang merupakan wujud penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut juga telah menandakan berkobarnya api demokrasi pasca reformasi otoritarianisme orde baru. Maka dari itu, melalui Undang-Undang di atas selanjutnya akan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama di tahun 2005 yang juga mulai diwarnai dengan keberadaan bendera partai politik yang berbeda-beda.

Pelaksanaan pilkada langsung di tahun 2005 tersebut berlanjut hingga 9 Desember 2015. Indonesia telah menapakkan kaki pada sejarah baru perjalanan demokrasi nusantara melalui pelaksanaan pilkada serentak. Ikhwal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.”

Atas dasar tersebut, maka sekitar 53% dari total 537 daerah dengan rincian 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten, akan serentak memilih kepala daerah untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016 (KPU, 2015). Salah satu provinsi yang sedang mempersiapkan diri dalam pesta demokrasi tingkat lokal tersebut adalah Provinsi Lampung. Pilkada serentak tahun 2015 di Provinsi Lampung akan diselenggarakan di delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Way Kanan (Lampung Post, edisi 19 Mei 2015). Seiring dengan itu, sejumlah nama calon kepala daerah juga sudah bermunculan, mulai dari calon petahana yang didukung banyak partai, hingga calon independen yang syarat administratif pengumpulan sejumlah KTP telah dipenuhi.

Terkait dengan konteks pencalonan kepala daerah, telah lahir sebuah fenomena di mana petahana berkecenderungan untuk kembali mencalonkan diri sebagai bupati/walikota di akhir masa jabatannya. LSI (Lembaga Survey

Indonesia) pada tahun 2007 melakukan *survey* sejak Juni 2005 hingga Desember 2006, menyatakan bahwa dari 32 wilayah yang menyelenggarakan pilkada, sekitar 78,77% petahana kembali muncul pada pemilihan kepala daerah dan sebanyak 62.17% mampu mempertahankan kekuasaannya dari total keseluruhan petahana yang maju kembali pada pemilihan umum (Iskandar, 2013:2).

Tendensi serupa tak ayal juga terjadi di kota Bandar Lampung. Komposisi masyarakat Kota Bandar Lampung yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat heterogen, nampaknya tidak membuat preferensi masyarakat ibukota berpaling dari sosok petahana walikota Herman HN. Seperti diketahui bersama bahwa, popularitas dan elektabilitas Herman HN sejak pemilihan gubernur tahun 2014 silam hampir selalu berada di puncak. Hasil *survey* TrendSetter Data Supplier misalnya, menunjukkan popularitas dan elektabilitas Herman HN saat menjadi bakal calon Gubernur Provinsi Lampung unggul di posisi pertama sebesar 74,75% dan 12,50% dari 16 calon lain (Radar Lampung, edisi 11 Maret 2013).

Kemudian, persentase tinggi tersebut terus berlanjut hingga pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 ini, kendatipun sempat muncul nama-nama baru juga muda dengan gagasan perubahan yang menarik. Sebut saja Hartarto Lojaya dengan *tagline* “Menuju Bandar Lampung Smart City 2020” yang sempat berpotensi mengalahkan petahana. Potensi tersebut misalnya dipaparkan ke dalam hasil *survey* yang dilakukan *Indonesia Votes*

and Election Studies (INVEST), pada tanggal 27 Juni sampai 6 Juli 2015 dengan melibatkan 1722 responden dari sejumlah wilayah di Bandar Lampung, memunculkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Survey Popularitas dan Elektabilitas Bakal Calon Walikota di Kota Bandar Lampung

No	Nama Balonkada	Popularitas	Elektabilitas
1.	Herman HN	78,2 %	30,1 %
2.	Hartarto Lojaya	72,3 %	31,2 %
3.	Maruly Hendra Utama	59,2 %	14,2 %
4.	Muhammad Yunus	34,3 %	5,3 %
	Belum tahu		19,2 %

Sumber: Hasil Survey Indonesia Votes and Election Studies (INVEST) dalam Rua Jurai.com edisi 13 Juli 2015, diakses pada 23 Juli 2015 pukul 14.30

Berdasarkan rekapitulasi hasil survey di atas, dapat dilihat bersama bahwa kandidat dari kalangan pengusaha muda yakni Hartarto Lojaya memiliki popularitas yang hampir menyaingi Herman HN, disertai dengan elektabilitas 1% mengungguli petahana. Artinya, Herman HN sejatinya memiliki peluang untuk dikalahkan dalam pemilihan kepala daerah. Kendati demikian, kandidat petahana tersebut dengan jurus kampanye terselubung ala *pork barrel politics* (diteremahkan sebagai politik gentong babi, dalam Bolx, 2010:605) masih dan terus mengalami peningkatan popularitas dan elektabilitasnya.

Fenomena petahana jadi idola pada elektoral proses seperti di Kota Bandar Lampung tersebut, secara teoritis antara lain dijelaskan oleh Stone (2010). Stone (2010) memfokuskan peluang kemenangan petahana pada preferensi pemilih atas kapasitas dan kapabilitas diri yang ditunjukkan petahana selama

menjabat. Stone melihat karakteristik petahana, terkait dengan kualitas kepemimpinan, seperti karakter integritas pribadi dan kinerja serta keterampilan, kemampuan untuk bekerja dengan para pemimpin lain, pemahaman masalah, juga kemampuan untuk memecahkan masalah. Hasilnya ditemukan bahwa konsekuensi tren petahana jadi idola hingga hasil pemilu, mengikuti kualitas petahana selama masa bhaktinya.

Senada dengan Stone, Gordon dan Landa (2010:2) menjelaskan faktor pendukung petahana jadi idola hingga berpotensi menang, di antaranya karena petahana memiliki sejumlah sumber yang tidak dimiliki kandidat lain. Pertama, terdapat jalinan hubungan yang baik antara kelompok kepentingan dan elit di daerah, yang dikenal dengan model *direct officeholder*. Kedua, yakni *campaign discount* (diskon kampanye). Pada model ini, petahana tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membuat ia terpilih lagi dalam pemilihan dan model ini menunjukkan nama besar yang dimiliki petahana. Sedangkan model yang ketiga adalah *district partisan bias*, yakni kecenderungan basis pendukung petahana atas wilayah tertentu yang dihasilkan dari kinerja petahana maupun kedekatan petahana dengan elit di dalam suatu domain wilayah tertentu.

Namun demikian, sejumlah “keuntungan” petahana di atas nampaknya menimbulkan masalah baru. Masalah tersebut yakni sikap pragmatis sebagian besar partai politik yang cenderung “main aman” dengan enggan berkompetisi melawan petahana. Partai-partai politik cenderung melakukan koalisi

pragmatis sendiri dengan tidak memerdulikan latar belakang ideologi tiap partai, serta mendukung satu nama yang tidak lain adalah petahana, tanpa menelurkan kandidat lain dari kader masing-masing partai hasil “didikannya”.

Pada konteks ini, terdapat pemisahan secara teoritis antara partai pengusung dan partai pendukung. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 40 (1), bahwa partai pengusung adalah partai yang bisa mengusulkan pasangan calon dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Sedangkan makna partai pendukung tidak dijelaskan secara konseptual dan eksplisit, namun dapat dimaknai sebagai partai atau gabungan partai yang mendukung kontestan pemilihan umum.

Sikap pragmatis baik partai pengusung maupun pendukung tersebut ternyata lahir juga di sejumlah kabupaten/kota dalam kontestasi pilkada Provinsi Lampung di tahun 2015. Sebut saja petahana Kabupaten Way Kanan yakni Bustami Zainudin yang didukung dan diusung oleh 9 partai, di antaranya partai NasDem, Gerindra, PDIP, PKB, PPP, Golkar, PKPI, PBB, dan PDS (Lampung Post, edisi 23 Agustus 2015); petahana Kabupaten Lampung Tengah bernama Mustafa dengan 8 partai pendukung dan pengusung, yakni

PDIP, Partai Demokrat, PAN, PKS, Golkar, PKPI, Hanura, PPP, dan NasDem (Lampung Post, edisi 27 Juli 2015); serta petahana Kota Bandar Lampung yakni Herman HN yang diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat, dengan partai pendukung yakni Gerindra, PKS, NasDem, dan PKB (KPU Kota Bandar Lampung, dalam <http://kpu-bandarlampungkota.go.id> edisi 27 Juli 2015, diakses pada 1 Agustus 2015 pukul 20.10).

Berdasarkan formasi koalisi pragmatis di atas, dapat dilihat bahwa dalam mengusung petahana yang notabene punya banyak keuntungan politis dan materil, garis ideologi partai kian dikesampingkan. Pola koalisi yang dibentuk adalah dengan memerhitungkan potensi kemenangan tertinggi kandidat dan berharap dapat berbagi jatah kursi kekuasaan. Jikalau ada partai lain yang mengusung calon lain non-kader, maka partai tersebut berpotensi menjadi partai pemburu rente (*rent-seeking*), yakni dengan memberikan harga sewa perahu partai untuk kandidat lain. Fenomena ini diperkuat dengan pernyataan implisit salah satu petahana yang akan menjadi objek utama penelitian kali ini, yakni Herman HN yang ditemukan penulis pada sebuah media *online* lokal Kupas Tuntas (edisi 19 Mei 2015, diakses pada 15 Agustus 2015 pukul 13.38) saat ditanya mengenai keoptimisannya meraih kursi Walikota Bandar Lampung, sebagai berikut “Ya, sudah 99 persen partai politik sudah mendukung. Kalau semuanya diambil, mau lawan siapa nanti saya? Kalau lawan independen saja kurang seru.”

Mengerucut pada konteks sistem kepartaian, fenomena tersebut ternyata dapat dijelaskan ke dalam teori *cartelized party system* atau sistem kartelisasi partai, yang dikemukakan pertama kali oleh Richard Katz dan Peter Mair pada tahun 1995 dalam jurnal politik dari SAGE Publication, London, Vol.1 No.1 pp 5-28 yang berjudul *Changing Model of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. Term kartel sebenarnya berawal dari sistem domain pasar. Nama lain kartel adalah sindikat atau monopoli. Ketika kartel diterapkan dalam ranah politik, maka konsep ini merujuk pada perpaduan sejumlah partai politik yang mendominasi kekuasaan negara. Partai-partai politik yang berada di luar kartel mengalami kesulitan ketika bersaing, sehingga dalam konteks elektoral misalnya, kebutuhan partai di luar kartel adalah perburuan rente (*rent-seeking*).

Penelitian terkait sistem kartelisasi partai di tingkat nasional sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan politik. Misalnya Dan Slater di tahun 2004 berjudul *Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition*, dalam *Indonesia 78*. Dijelaskan oleh Slater bahwa pasca-pemilu 2004, kartel dibentuk oleh hampir seluruh partai politik yang sebelumnya bersaing. Partai politik yang menang dalam pemilu melakukan proses perangkulan terhadap partai yang kalah tanpa memerhatikan ideologi atau program partai tersebut. Analisis serupa di level nasional dilakukan oleh Antonius Supriatma dalam jurnal politik berjudul “Menguatnya Kartel Politik para Bos” dalam jurnal *Prisma* Vol. 28, No. 2, Oktober 2009.

Namun, pada saat itu model koalisi kartel belum ramai diperbincangkan di tanah air, sampai pada Agustus 2009 Kuskridho Ambardi dalam disertasinya yang berjudul *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin* dari The Ohio State University tahun 2008. Disertasi tersebut telah diterjemahkan dan dipublikasikan dalam buku berjudul “Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi”. Melalui berbagai fakta, Ambardi mengungkapkan bahwa telah terjadi kartel politik, khususnya pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004) dan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009).

Melalui bukunya, Ambardi (2009) mengungkapkan berbagai kebijakan serta penyusunan undang-undang di eksekutif dan legislatif yang dibuat dalam kerangka kepentingan kartel. Ketika sehari setelah penyingkiran Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan, presiden mengumumkan terbentuknya Sekretariat Gabungan (Setgab) dengan dirinya sebagai Ketua Umum dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Setgab. Publik berpendapat Setgab merupakan bentuk vulgar dari kartel politik. Melalui karyanya, akhirnya kartel menjadi topik populer yang diperbincangkan di ruang publik, dari media massa sampai jejaring sosial seperti Twitter di Indonesia.

Fenomena kartel pada domain nasional yang juga jadi sorotan publik beberapa waktu silam antara lain, apa yang dilakukan koalisi Merah-Putih (KMP) yang

semakin solid menjegal kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pasca terpilihnya presiden pilihan rakyat tersebut. Setelah dalam pemilu presiden, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah-Putih dan kalah dari koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, berupaya mencari peluang untuk mengeruk anggaran dengan dalih merebut kekuasaan di daerah. Asumsi yang mendasari tindakan di atas yakni pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah telah memberikan peluang bagi partai politik untuk mengeruk aset daerah demi kepentingan pribadi dan kelompok kepentingan.

Wewenang besar daerah dalam mengelola aset merupakan celah yang bisa dimanfaatkan sejumlah partai politik di tengah semakin ketatnya pemerintah pusat dalam mengelola anggaran. Perubahan sikap sejumlah partai dari menyetujui pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan oleh DPRD merupakan salah satu cara memermudah pengambilalihan kekuasaan daerah. Melalui menggunakan pilkada tidak langsung, peluang mereka untuk menguasai posisi kepala daerah lebih besar. Misalnya saja fraksi Partai Golkar yang diduga menjadi motor perubahan sikap ini karena memiliki sumber daya yang cukup kuat di daerah. Fenomena pragmatisme oposisi partai yang akan melakukan apa saja guna memonopoli sumber daya negara, baik di level nasional maupun daerah seperti hal tersebut adalah salah satu contoh konkrit kartel politik.

Berbagai paparan tentang penelitian sebelumnya terkait sistem kartelisasi partai telah disampaikan namun masih berada dalam domain nasional. Lantas,

bagaimana dengan fenomena kartel di tingkat lokal (daerah)? Se jauh penelusuran dan pengamatan penulis selama proses penyusunan skripsi ini, nampak sekali ada *gap of research* (kesenjangan penelitian) dari aspek keilmuan terkait tema penelitian. Kesenjangan tersebut menunjukkan fakta bahwa belum pernah ada pembahasan sistem kartelisasi partai di tingkat daerah secara ilmiah dan eksplisit sebelumnya. Penelitian mengenai fenomena kartelisasi partai selama ini selalu jadi bahasan terpusat di tingkat nasional dan hampir tidak pernah menyentuh daerah. Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini adalah guna mengisi kesenjangan penelitian terdahulu terkait analisis fenomena kartelisasi partai di tingkat daerah yang belum pernah dibahas secara ilmiah sebelumnya.

Selain faktor di atas, indikasi sistem kartelisasi partai yang terjadi pada mekanisme pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 akan menjadi fokus utama penelitian. Hal ini disebabkan karena, jika dibandingkan dengan petahana lain dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang diusung dan didukung oleh koalisi partai pragmatis dengan jumlah yang lebih besar, maka Herman HN secara ilmiah telah terbukti keunggulan stabilitas elektabilitas dan popularitasnya sejak pemilihan Gubernur tahun 2014 lalu melalui sejumlah hasil survey.

Karena keunggulannya tersebut, maka dari aspek logika pragmatis, adalah memungkinkan untuk menjelaskan alasan mengapa enam partai politik berbondong-bondong mendukung petahana Bandar Lampung ini. Potensi

kemenangan petahana bagi mereka sangatlah kuat, sehingga ambisi menciptakan kartel politik bagi para partai politik pendukung dan pengusung Herman HN di Kota Tapis Berseri ini kian nyata.

Maka dari itu, dengan melihat analisis sistem kartel dalam tubuh partai politik yang sejauh ini cenderung masih menjadi bahasan pada level nasional, adalah sebuah tantangan bagi seorang sarjana ilmu politik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem kartelisasi partai di level lokal (daerah). Jika Ambardi menggunakan konsep partai kartel pada level sistem, maka penulis pada penelitian ini akan menggunakan konsep original kartel di level partai seperti yang dikemukakan Katz dan Mair, namun dengan lokus di tingkat elektoral proses di daerah.

Pada akhirnya, berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis merasa permasalahan yang diangkat adalah menarik untuk diteliti terkait fenomena *cartelized party system* di level lokal pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015. Penulis selanjutnya akan mencoba melakukan penelitian dengan judul “Kartelisasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana refleksi sistem kartelisasi partai pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015?
2. Mengapa partai politik cenderung memiliki sikap pragmatis dalam pengangkatan calon kandidat kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui refleksi sistem kartelisasi partai pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015;
2. Untuk mengetahui penyebab partai politik cenderung memiliki sikap pragmatis dalam pengangkatan calon kepala daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat dan politik, bahwa sistem kartelisasi partai telah dan sedang merasuk ke level lokal daerah, merusak hakikat demokrasi, berpotensi terciptanya iklim *partycracy* serta merugikan banyak pihak terutama masyarakat.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai perbendaharaan tambahan khasanah ilmu politik dalam hal perkembangan konsep sistem kartelisasi partai dalam di tingkat lokal daerah;
- b. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan tentang bahayanya sistem kartelisasi partai pada level lokal daerah, yang mengakibatkan kebijakan publik bersumber dari hasil kolusi elit partai dan hampir tanpa oposisi, juga mengeliminasi peran rakyat secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan runtutan masalah yang ingin penulis teliti, baik dari aspek setting masalah, maupun *setting* teori. *Setting* masalah yang ingin penulis coba angkat yakni fenomena kartelisasi partai politik dan sikap pragmatis partai politik dalam rangka pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2015. Sedangkan *setting* teori yang telah penulis angkat secara general pada bab sebelumnya, yakni teori *cartel party* oleh Richard Katz dan Peter Mair (1995) yang menjadi salah satu teori sistem kepartaian yang paling banyak didiskusikan selama dua abad terakhir oleh ilmuwan politik dunia. Tidak hanya itu, penulis telah mencoba untuk memasukkan penelitian sebelumnya terkait fenomena partai kartel di Indonesia, yakni penelitian dari Dan Slater (2004) juga Kuskridho Ambardi (2009), yang kemudian term partai kartel menjadi banyak diperbincangkan di antero negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Slater dan Ambardi tersebut membahas kartel di level nasional. Namun pada penelitian ini, penulis mencoba mengaplikasikan teori *cartel party* di level lokal (daerah) melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, guna mengisi kesenjangan penelitian (*gap of research*) terkait fenomena kartelisasi partai.

Proses membangun kerangka teoritis akan dimulai pemaparan *grand theory* dari partai kartel yakni teori *rational-choice* sebagai teori yang menjadi teori dasar

kelahiran partai kartel dengan segala sikap rasionalitas yang diagungkannya guna memaksimalkan keuntungan partai. Selanjutnya, penulis akan memaparkan secara kronologis perjalanan sistem kepartaian di dunia, mulai dari teori sistem kepartaian tertua oleh Maurice Duverger (1954) hingga teori sistem kepartaian *cartel party* oleh Richard Katz dan Peter Mair (1995), juga teori *presidential party* oleh Andreas Ufen (2006) sebagai salah satu bentuk pengembangan teori sistem kepartaian yang populer dan relevan di Indonesia. Kemudian, penulis akan menjabarkan mengenai idealisasi fungsi partai politik, dan memaparkan konsepsi pemilihan umum kepala daerah sebagai sebuah mekanisme awal lahirnya kartel di tingkat daerah. Akhirnya, penulis akan memberikan skema kerangka pikir guna memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami alur pikir serta indikator yang akan digunakan penulis terkait penelitian ini.

A. Pilihan Rasional dalam Studi Penentu Keputusan Politik Partai Politik

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan diawali dengan urgensi teori *rational-choice* dalam memahami ilmu politik. Bahkan jika pendekatan pilihan rasional diumpamakan sebagai kandidat pemilu, maka kandidat ini akan menjadi *front-runner* dalam pemilu. Urgensi menggunakan pendekatan pilihan rasional dalam studi partai politik tidak dapat dipungkiri lagi. Segala aktivitas yang berbau politik, senantiasa memiliki unsur politis dan dengan menggunakan rasionalitas penuh. Termasuk hal-nya identifikasi kehadiran partai kartel yang perilakunya berakar dari teori ini. Theorema “*no free lunch*” akan sangat berlaku, sebab politisi cenderung akan memaksimalkan

keuntungan (*maximizing utilities*) namun dengan meminimalisasikan resiko sekecil-kecilnya.

Pada perjalanan keilmuannya, teori pilihan rasional muncul sebagai bagian dari revolusi behavioral dalam ilmu politik Amerika tahun 1950-an dan 1960-an yang sebenarnya berusaha meneliti bagaimana individu berperilaku dengan menggunakan metode empiris. Teori ini telah menjadi pendekatan dominan terhadap ilmu politik, setidaknya di Amerika Serikat. Namun, pilihan rasional bersumber dari metodologi ilmu ekonomi, berkebalikan dengan para behavioralis yang bersumber dari sosiologi atau psikologi (Barry, 1970). Anthony Downs (1957) adalah pelopor dalam penerapan teori pilihan rasional bagi perilaku pemilihan umum dan persaingan antar partai, dan karyanya yang merevolusi studi pemilihan umum. Menurutnya, pemilihan suara individu, jika ia bisa naik ke kekuasaan maka diduga akan menghasilkan manfaat paling tinggi bagi mereka. Partai diasumsikan semata-mata termotivasi oleh keinginan untuk jabatan, memerebutkan suara dengan merubah landasan kebijakannya (dalam Marsh dan Stoker, 2010).

Selain Downs (1957), ilmuwan politik lain yang mengungkapkan urgensi menggunakan teori pilihan rasional dalam analisis politik adalah Hugh Ward (2002). Melalui tulisannya yang berjudul *Rational Choice*, Ward berasumsi bahwa *rational-choice* adalah bagian tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik, karena begitu banyak fenomena penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial dari perspektif ini.

Secara general, argumentasi tersebut berkenaan dengan pendapat Hershey (2006:75) mengenai pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku politik. Teori ini menganggap bahwa individu akan mencoba untuk mencapai tujuan mereka melalui cara-cara yang instrumental dan efisien. Pada praktiknya, penggunaan cara yang efisien dapat dipahami sebagai upaya individu untuk meningkatkan manfaat yang mereka harapkan, dengan sedikit mengeluarkan *cost* dalam bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhannya.

Pernyataan simpatik akan eksistensi *rational-choice theory* tersebut tidak berarti bahwa *rational-choice theory* memiliki posisi yang mapan dalam jagad diskursus ilmu politik. Meskipun diaplikasikan secara luas dalam berbagai area ilmu politik, banjir kritik dan prasangka dijatuhkan pada perspektif yang satu ini. Kritik yang dilontarkan pada teori ini sangat beragam, mulai dari kritik yang menyatakan bahwa *rational-choice theory* memiliki kecenderungan ideologi kanan sampai pada ‘mereduksi manusia sekedar menjadi satu makhluk yang semata-mata digerakkan oleh nalar (Marsh dan Stoker, 2010). Terlepas dari berbagai kritik tersebut, Dunleavy (1991) menyatakan bahwa, adalah naif mengabaikan sebuah pendekatan sebagai perangkat analisa, yang memiliki kapasitas analisis dan eksplanasi sekuat *rational-choice theory*.

Intisari dari *rational-choice* adalah ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, manusia biasanya akan melakukan apa yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut (*find the best*

way to achieve objectives)’ (Elster, 1998a:2 dalam Marsh dan Stoker, 2010:76). Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detail dalam premis-premis dasar *rational-choice theory*, adalah sebagai berikut:

- Manusia memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain;
- Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding liberalisme, dan liberalisme dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibanding fasisme;
- Tatanan preferensi itu didasarkan pada prinsip ‘memaksimalkan manfaat’ dan ‘meminimalkan resiko’;
- Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois (Dunleavy, 1991:3).

Pada konteks kepartaian, partai politik dapat dikatakan sebagai organisasi yang penuh dengan pertimbangan rasional. Pihak yang hendak bergabung dalam partai politik, biasanya mengharapkan manfaat perolehan sumber daya negara berikut akses negara yang lebih mudah. Definisi partai politik yang sarat akan tindakan rasional dan dirasa relevan dengan konteks bahasan kartel di dalam proses elektoral adalah definisi yang ditawarkan oleh Carl J. Friedrich (1967), yang mendefinisikan partai politik sebagai berikut :

“A Political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing of maintaining for its leaders the control a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages”

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partai politik dideskripsikan sebagai sebuah organisasi yang terlembagakan, dan kerap berupaya memegang kendali atas pemerintah bagi pimpinan partainya, serta memberikan kemanfaatan bagi anggota partainya, terutama manfaat yang bersifat materil maupun idiil. Dari perspektif pilihan rasional, teori *rational-choice* tidak terkait dengan posisi ideologis partai tertentu. Melainkan, terdapat “keuntungan rasional” yang ditawarkan apabila menjadi bagian dari partai politik.

Selain itu, terkait dengan penggunaan *rational choice* dalam mengidentifikasi perilaku partai kartel, penulis dapat menyimpulkan bahwa partai politik senantiasa melakukan segala upaya untuk memaksimalkan keuntungan partai maupun anggotanya. Partai akan melakukan apa saja terlebih jika ingin menggadaikan ideologi mereka, demi kursi jabatan lima tahun dan menjadi partai pemerintah. Guna memikat konsituen misalnya, partai kartel kerap kali akan memberikan penawaran-penawaran menarik yang sifatnya materil dan teknis, bukan berupa pemahaman-pehamaan terkait ideologi juga program partai berdasarkan basis ideologi yang dianut. Pada akhirnya, secara tidak langsung masyarakat diajarkan oleh partai untuk mengasah ketajaman nalar pilihan rasionalnya, dengan bagaimana bersikap pragmatis dalam membuat keputusan politik.

B. Pendekatan dalam Teori *Rational Choice*

Pada sub-bab sebelumnya, telah disampaikan mengenai deskripsi teori *rational-choice*, urgensi menggunakan pendekatan ini dalam studi partai politik, beserta premis-premis yang menjadi basisnya. Selanjutnya, penulis akan menjabarkan pendekatan-pendekatan yang dimiliki teori pilihan rasional, yang bisa secara spesifik menjelaskan fenomena politik maupun pemerintahan.

Pada perkembangannya, melalui proses saling-kritik, muncul banyak variasi pendekatan dalam teori *rational-choice*. Dunleavy (1991) mengidentifikasi empat pendekatan dominan dalam diskursus teori *rational choice*, yaitu pendekatan pluralis, pendekatan *corporatis*, pendekatan *collective-action*, dan pendekatan *new-right*. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki tafsir yang berbeda terhadap premis-premis utama *rational-choice* di atas. Masing-masing dengan fokus dan penekanan yang berbeda. Berikut adalah eksplanasi lebih lanjut mengenai pendekatan dalam *rational choice*:

a. Pendekatan pluralis.

Dari premis di atas mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka secara sukarela mereka akan memilih kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mengakomodasi kepentingannya. Kelompok seperti inilah yang sering kita sebut sebagai *interest group*. Kelompok kepentingan ini menjadi fokus kajian utama dalam pendekatan pluralis. Pada kelompok

kepentingan, diasumsikan bahwa relasi yang terjadi di dalamnya didasarkan pada kesamaan kepentingan dan relasinya cenderung didasarkan pada kesukarelaan anggotanya. Keberadaan kelompok semacam ini juga sangat ditentukan oleh keterlibatan anggotanya dan cenderung hanya memfokuskan perhatian pada isu-isu spesifik yang sifatnya seringkali sangat praktis. Berbeda dengan partai politik yang cenderung merangkai berbagai isu dalam paket-paket, sehingga menyederhanakan pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pemilih dalam pemilu.

b. Pendekatan *korporatis*.

Pendekatan korporatis ini mengakui dan menyepakati bahwa rutinitas pembuatan kebijakan di negara-negara demokratis Barat beroperasi sebagaimana dipahami dan dijelaskan dalam pendekatan pluralis. Tetapi, pendekatan korporatis menambahkan bahwa dalam kenyataannya, kelompok-kelompok kepentingan tidak memberikan pengaruh yang setara, baik secara kualitas maupun kuantitas, terhadap proses kebijakan. Kelompok-kelompok kepentingan tertentu cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses kebijakan dibanding kelompok kepentingan yang lain.

Dunleavy (1991) mengilustrasikan penjelasan di atas dengan melihat perbedaan derajat pengaruh kelompok-kelompok kepentingan ekonomi utama, misalnya serikat buruh, asosiasi bisnis dan perdagangan besar dan

asosiasi profesional, yang menurut pendapatnya disebabkan oleh empat alasan sebagai berikut:

1. Alasan yang pertama adalah basis kelas.

Kelompok-kelompok kepentingan ekonomi terbagi menurut garis kelas sosial dan/atau pekerjaan. Tarik menarik antara kepentingan-kepentingan ini akan sangat berpengaruh bagi arah kebijakan ekonomi dan pembangunan suatu negara;

2. Alasan kedua, kontrol terhadap sumber daya.

Kelompok-kelompok kepentingan besar melakukan kontrol kolektif terhadap sumberdaya yang vital bagi keseluruhan aktifitas ekonomi. Variasi struktural kontrol terhadap sumberdaya ini merupakan variabel penjelas penting dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan bagaimana satu kelompok kepentingan yang sama diorganisir dengan cara yang berbeda, di waktu dan/atau tempat yang berbeda;

3. Alasan ketiga, faktor perbedaan ideologis.

Masing-masing kelompok kepentingan memiliki ideologi yang berbeda, yang membuat masing-masing kelompok kepentingan menafsirkan isu-isu sosial secara berbeda pula. Cara menafsirkan isu sosial ini pada akhirnya akan berpengaruh pada sikap dan perilaku anggota-anggota berbagai kelompok kepentingan tersebut.

4. Alasan keempat, faktor kesetiaan terhadap kelompok dan solidaritas. Keanggotaan dalam suatu kelompok kepentingan tertentu ikut membentuk identitas sosial seseorang. Status ini ikut

menentukan bagaimana seseorang menafsirkan kepentingannya dan kepentingan orang lain.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, pada pendekatan korporatis ini negara tidak dianggap sebagai aktor yang pasif, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan mengaplikasikan berbagai strategi untuk mengantisipasi strategi yang digunakan oleh aktor-aktor lain, misalnya kelompok-kelompok kepentingan lain. Salah satu strateginya adalah dengan menjalin hubungan saling keterikatan dengan kelompok-kelompok kepentingan besar, di mana pada akhirnya dua pihak inilah yang mendominasi proses kebijakan sehingga memunculkan hasil yang membawa manfaat paling maksimal bagi kedua belah pihak. Kelompok-kelompok kepentingan yang lebih kecil berada di pinggiran dan pengaruh mereka relatif dikontrol melalui pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang lebih besar dan memiliki relasi yang kuat dengan pihak negara.

c. Pendekatan *collective-action*,

Mancure Olson menjadi pionir yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendekatan ini dalam diskursus *rational-choice*. Pada pendekatan ini, Olson mengkritik optimisme pendekatan pluralis terhadap kemauan individu untuk berkontribusi dalam kelompok kepentingan. Olson mengatakan bahwa semakin besar suatu kelompok kepentingan, makin kecil signifikansi keterlibatan individu-individu yang ada di dalamnya. Sementara, manfaat yang diraih jika kelompok

kepentingan tersebut berhasil mendesakkan kepentingannya dalam proses kebijakan akan dirasakan oleh seluruh anggota kelompok, tanpa mempertimbangkan kontribusi setiap anggota terhadap kelompok tersebut. Pada situasi ini, maka pilihan yang paling rasional bagi sebagian besar anggota kelompok adalah mendompleng manfaat yang didapatkan dari keanggotaannya dalam suatu kelompok, tanpa merasa harus memberikan kontribusi pada kelompok tersebut. Inilah yang selama ini kita kenal sebagai problem *free-rider* dalam *collective-action* (Olson, 1978).

d. Pendekatan *new-right*

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa memang benar negara menyediakan berbagai barang publik, yang menjadi obyek kontestasi berbagai kepentingan yang terepresentasikan oleh berbagai kelompok. Tetapi berbagai barang publik juga bisa disediakan oleh pasar, dan seringkali secara lebih efisien. Pendekatan *new-right* berpendapat bahwa dari berbagai ‘manfaat’ yang disediakan oleh negara, hanya sebagian kecil yang benar-benar memiliki karakter sebagai barang-barang publik.

Poin utama dari pendekatan ini, menyangkal argumen pendekatan *collective action*, adalah bahwa ternyata tujuan berbagai kelompok kepentingan ini juga melibatkan berbagai barang-barang yang *non-excludable*. Mereka berupaya mengejar “manfaat kolektif” karena mereka berusaha mendapatkannya dari negara. Negara memiliki

kapasitas dan otoritas untuk menyediakan hampir seluruh barang privat dalam bentuk kolektif cukup hanya dengan menggunakan kekuasaan koersifnya untuk mendapatkan sumber daya sosial yang dibutuhkan, atau dengan menyediakan dana pelayanan yang diambil dari hasil pajak.

Melalui deskripsi pendekatan teori pilihan rasional di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, banyaknya variasi turunan dalam teori *rational-choice*, adalah sesuatu yang wajar karena ilmu politik adalah sebuah ilmu yang sifatnya *multi-theoretical*. Dua pendekatan yang pertama, pluralis dan korporatis, oleh Dunleavy dikategorikan sebagai pendekatan ilmu politik, sementara pendekatan yang kedua, *collective action* dan *new-right*, dikategorikan sebagai pendekatan-pendekatan *public-choice*.

Teori *rational-choice* sedang, dan masih, terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat dari kritik maupun perkembangan realitas politik yang terjadi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ilmu politik, sebagai disiplin yang memayungi teori *rational-choice*, juga terus mengalami perkembangan dan perubahan sebagai sebuah disiplin ilmu.

C. Sistem Kepartaian dalam Partai Politik

Setelah dipaparkan mengenai *grand theory* sistem partai kartel yakni teori *rational choice*, maka pada sub bab ini penulis akan memaparkan mengenai kronologi perkembangan sistem kepartaian di dunia, mulai dari Maurice Duverger (1954) hingga Richard Katz dan Peter Mair (1995). Penulis juga akan berupaya untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem kepartaian, hingga membuat lahir sistem kepartaian baru guna menyempurnakan sistem kepartaian yang sebelumnya telah ada. Penjabaran teoritis mengenai sistem kepartaian dirasa oleh penulis sangat penting. Hal ini disebabkan karena salah satu konsep utama yang akan banyak bersentuhan dengan penelitian ini adalah konsep tentang sistem kepartaian dan partai politik. Sistem kepartaian menjelaskan format keberadaan antar partai politik dalam sebuah sistem. Hal ini menunjukkan, bahwa sistem kepartaian dan partai politik adalah dua konsep yang saling berkaitan satu sama lain.

Surbakti (1992:124) menyebutkan sistem kepartaian diartikan sebagai pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik.

Pada perkembangannya, ilmuwan politik dunia memiliki sejumlah preferensi yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda dalam melakukan klasifikasi sistem kepartaian. Sehingga, di kesempatan ini, penulis coba merangkumnya ke dalam muatan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Sistem Kepartaian

Peneliti (1)	Dimensi Klasifikasi (2)	Sistem Kepartaian (3)
Maurice Duverger (1954)	Jumlah Partai	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Partai Tunggal • Sistem dua partai • Sistem multi partai
Robert Dahl (1966)	Kompetitif Oposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetitif Murni • Kompetitif-Kooperatif • Kompetitif-Koalisi • Koalisi Murni
Jean Blondel (1966)	Jumlah partai, ukuran partai secara relatif	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem dua partai • Sistem dua dan setengah partai • Multi partai dengan satu partai dominan • Multipartai tanpa partai dominan
Lipset & Rokkan (1967)	Jumlah partai: kadang satu partai mayoritas; distribusi kekuatan partai minoritas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem 1 vs, 1+1 British Jerman • Sistem 1 vs, 3-4 Skandinavia • Sistem Multipartai, 1 vs, 1 vs, 1 + 2 sampai 3
Giovani Sartori (1976)	Jumlah partai dan jarak ideologi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem multipartai • Pluralism moderat • Pluralism terpolarisasi • Partai hegemoni
Richard Katz dan Peter Mair (1995)	Perilaku politik partai dan keanggotaan partai	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Elit • Partai Massa • Partai <i>Catch-All</i> • Partai Kartel

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2015)

Secara garis besar, perkembangan teori sistem kepartaian dimulai dari Maurice Duverger (1967:207) yang memberikan arahan mengenai sistem

kepartaian yang muncul dan berkembang saat itu berdasarkan jumlah partai, hingga Giovanni Sartori (1976) yang berpegangan pada jarak ideologi partai, yang kemudian menjadi landasan pemikiran sistem kepartaian selanjutnya. Berikut akan dipaparkan mengenai kronologi perkembangan sistem kepartaian, dari teori klasik Duverger hingga teori kontemporer.

1. Duverger: *Founding Father* Sistem Kepartaian Dunia

Perkembangan sistem kepartaian dunia akan diawali dari teori milik Maurice Duverger. Pada tahun 1951, melalui karyanya yang berjudul *Les Partis Politiques*, sang sosiologis ini memberikan sebuah kontribusi besar dalam memahami politik. Schlesinger (2006:59) dalam *review*-nya, memaparkan analisis partai di dalam negara demokrasi yang digagas oleh Duverger layak untuk dibuka kembali. Menurutnya, Duverger telah memberikan eksplanasi mengenai peran inti partai politik di dalam demokrasi. Segala bentuk relevansi ataupun hal-hal yang sudah tidak relevan lagi terkait teori Duverger, sedikit banyak telah memberikan petunjuk dalam memahami demokrasi itu sendiri. Terlebih dewasa ini, ketika penyebaran sistem demokrasi menjadi tujuan inti dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka memahami keorganisasian partai di dalam demokrasi menjadi kian penting.

Sistem kepartaian yang dimaksudkan Duverger (1954) yakni *one party system* (sistem satu partai), *two party system* (sistem dua partai) serta

multy party system (sistem banyak partai), dengan eksplanasi sebagai berikut (Surbakti, 1992:116-117):

a. Sistem Partai Tunggal

Sistem Partai Tunggal merupakan sistem kepartaian yang ada di dalam suatu negara yang mana dalam negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang dominan. Sebagian pengamat berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Pada umumnya sistem kepartaian yang seperti ini dianut oleh negara yang baru saja merdeka, oleh karena sebagai sebuah negara baru, negara tersebut belum mampu untuk menciptakan sebuah demokrasi dengan memunculkan beberapa partai politik. beberapa negara-negara yang menganut sistem kepartaian seperti ini yaitu Afrika, China, Kuba, dan Uni Soviet pada masa jayanya. Pola sistem kepartaian ini disebutkan adalah suatu sistem kepartaian yang tidak kompetitif oleh karena dalam sistem ini setiap golongan maupun setiap orang mau ataupun tidak mau harus menerima setiap pimpinan partai politik sehingga apabila tidak dapat menerima pimpinan partai politik tersebut dianggap sebagai suatu tindakan pengkhianatan.

b. Sistem Dua Partai

Pada sistem ini, partai terbagi menjadi dua yakni partai berkuasa dan partai oposisi. pembagian partai ini didasarkan pada hasil pemilihan umum yang mana partai yang menang akan menjadi partai penguasa

dan partai yang kalah dalam pemilihan umum akan menjadi partai oposisi. Sistem ini juga menjelaskan partai yang kalah akan berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Sistem dua partai ini pada umumnya disertai dengan sistem pemilihan yang bersistem distrik yang mana dalam pemilihan yang bersifat distrik tersebut satu wakil untuk mewakili satu daerah sehingga dengan demikian pertumbuhan partai politik kecil akan terhambat, sehingga yang kemudian muncul hanyalah partai-partai dominan.

c. Sistem Multi Partai

Apabila di dalam suatu negara terdapat beragam suku, agama, maupun ras akan mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kelompok sendiri yang kemudian kelompok-kelompok yang plural ini mendorong pilihan kepada sistem multi partai oleh karena adanya pluralitas budaya dan pluralitas politik tersebut. negara-negara yang menganut sistem multi partai ini di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, dan Belanda. Sistem multi partai ini apabila dihubungkan dengan sistem pemerintahan maka sistem pemerintahan yang cocok dengan sistem multi partai ini adalah sistem pemerintahan parlementer karena sistem pemerintahan ini memusatkan kekuasaannya pada legislatif. Sistem multi partai ini yang kemudian dapat memunculkan koalisi antar partai politik karena, hasil dari

pemilihan umum dengan sistem multi partai ini cenderung jarang menempatkan satu partai politik yang akan menjadi partai politik yang dominan sehingga memerlukan koalisi untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat di parlemen.

Namun, analisis Duverger ini menyebabkan hujan kritik yang lumayan deras. Misalnya kritik dari ilmuwan politik Robert Dahl. Dahl mengkritik analisis Duverger mengenai sistem dua partai. Sistem dua partai sendiri dikatakan Duverger sebagai suatu sistem kepartaian yang ideal dan dapat menjaga kekondusifan stabilitas politik dalam suatu negara, oleh karena hanya ada dua partai yang dominan dalam suatu pemerintahan. Sehingga dengan demikian, akan jelas terbagi mana partai yang *pro* terhadap pemerintahan dan yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Bagi Dahl, kestabilan serta kekondusifan politik di suatu negara tidak ditunjukkan dari sistem dua partainya. Menurutnya, apabila dalam masyarakat terdapat sistem dua partai, terjadi perbedaan pandangan maka akan yang akan terjadi adalah memertajam perbedaan oleh karena tidak ada kelompok di tengah-tengah yang dapat meredekannya (Dahl, 1966).

Selain Dahl, ada juga Cheng Wu (2001:45) yang mengkritisi perihal jumlah partai. Menurutnya, pembagian jumlah partai berdasarkan perhitungan angka oleh Duverger sangat *influential* namun juga mengarah pada kebingungan yang cukup besar. Duverger mengarahkan

kita untuk menghitung jumlah partai, namun tidak memberikan cara bagaimana menghitungnya. Cheng Wu memberikan contoh, misalnya kerancuan menghitung jumlah partai di Taiwan, sebagai berikut:

“Duverger memberitahu kita untuk menghitung jumlah partai, tanpa memberi kita aturan menghitungnya. Jika kita menghitung Kuomintang (Partai Nasionalis) dan Partai Demokrasi Progresif (*Democratic Progressive Party*), maka yang kita peroleh adalah sistem dua partai di Taiwan. Jika kita juga menghitung Partai Pertama Rakyat (*People First Party*), Partai Baru (*the New Party*), serta Partai Kemerdekaan Taiwan (*Taiwan Independence Party*), maka kita mendapatkan sistem multi partai di Taiwan. Faktanya, di dalam sistem kepartaian di Taiwan bukanlah sistem dua partai maupun multi partai, bukan pula sistem satu partai. Maka dari itu, klasifikasi Duverger tidak inklusif dan sangat tidak cukup untuk digeneralisasikan. Bahkan hal di atas cenderung mengaburkan daripada menerangi hubungan antara sistem pemilu dan sistem partai.”

Cheng Wu (2001:45-46) juga mengungkapkan bahwa konsepsi *one-party* oleh Duverger tersebut *misnomer, a misconception, and an anti-thesis of party system*. Menurutnya, *one party system* tersebut lebih baik dinamai sebagai *non-competitive party system* atau *a party state system*. Menurut sistem satu partai, jika pemilu diadakan maka yang terjadi adalah pemilu tanpa kompetisi dan pilihan. Pemilu jenis ini adalah *meaningless* dan tidak demokratis. Demokrasi adalah kompetisi di antara partai-partai, bukan satu partai. Sebab menurut Cheng Wu, sebuah *competitive party system* merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi.

2. Robert Dahl (1966) : Pembagian Arena Kompetisi Partai

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai sistem kepartaian dengan yang diangkat dari sudut pandang kompetisi oleh penerus Duverger, yakni Robert Dahl. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Robert Dahl adalah salah seorang ilmuwan politik Amerika yang mengkritisi analisis Duverger mengenai sistem kepartaian. Selain mengkritisi, Dahl juga memberikan formasi sistem kepartaian berdasarkan perspektif di luar jumlah partai, di tahun 1966 melalui karyanya yang berjudul [*Political Oppositions in Western Democracies*](#). Seperti yang dijelaskan Laver (1989) dalam Mair (1997) mengenai pandangan Dahl (1966) adalah sebagai berikut:

“Robert Dahl (1966) telah berusaha untuk menjauh dari perhatian yang hampir eksklusif dengan hanya jumlah partai, dan membangun sebuah alternatif klasifikasi yang didasarkan pada strategi kompetitif oleh partai oposisi, membedakan antara kompetitif, kooperatif, dan strategi bersama, serta lebih jauh lagi ia membedakan antara oposisi di arena elektoral dan oposisi arena parlemen”.

Jika selama ini kita berfikir bahwa arena kompetisi partai politik hanya terjadi saat pemilu saja, maka coba kembali buka analisis Dahl tentang membagi arena kompetisi partai politik. Menurut Robert Dahl, dalam *Patterns of Opposition* (1966), telah mengidentifikasi *multiple arenas* dari kompetisi politik yakni: arena pemilu, arena legislatif, arena birokrasi, arena pemerintah daerah, dan banyak lagi. Masing-masing di antaranya bisa jadi arena yang paling menentukan sikap politik partai, terutama dalam mencapai tujuannya. Pertanyaan selanjutnya adalah,

bagaimana mungkin partai bisa merubah sikapnya di arena kompetisi yang berbeda? Bagi Dahl, jawaban dari pertanyaan tersebut sudah dapat dibuktikan secara empirik. Karyanya sebenarnya merupakan karya dalam membentuk pola teori interaksi partai di sepuluh negara demokratis Barat pada periode Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Seperti misalnya sebuah contoh yang ditunjukkan oleh Dahl (1966:338) yakni sebagai berikut:

“Amerika Serikat dan Inggris misalnya, dalam pandangan Dahl, menampilkan tipe interaksi partai yang berbeda di dalam arena legislatif. Baik sistem dua partai maupun partai-partai di Inggris, keduanya dengan ketat berkompetisi di arena elektoral maupun legislatif. Sedangkan partai-partai Amerika Serikat hanya dengan ketat berkompetisi pada arena pemilu, tetapi cenderung lebih kooperatif di arena legislatif.”

Partai politik kerap kali menunjukkan perilaku yang berbeda, terkait interaksinya pada level arena yang berbeda pula, misalnya contoh yang diberikan Dahl di atas, bahwa partai politik Amerika Serikat yang berkompetisi dengan kuat saat pemilu, namun bekerja sama ketika berada di kursi parlemen.

Mendukung tesis Dahl di atas, sebuah studi kontemporer di tahun 1999 yakni Muller dan Storm dalam *Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions*, menjelaskan dilema yang berkelanjutan yang dihadapi partai politik dalam membuat keputusan berkaitan dengan konflik tujuan. Demi memertahankan dukungan dalam pemilu, partai mungkin mengorbankan tujuannya yang

lain dalam memajukan pilihan kebijakan ataupun meraih jabatan. Dilema kemudian tumbuh ketika partai membutuhkan koalisi untuk membentuk sebuah pemerintahan, namun partner yang potensial disertai dengan haluan ideologi yang sama tidak memiliki suara yang cukup untuk duduk di kursi pemerintahan. Dilema dapat juga terjadi ketika partai politik dihadapkan pada pilihan antara berpegang teguh dengan komitmen kebijakan dan memperoleh jabatan. Pilihan pertama pasti akan mengalahkan pilihan kedua, dan begitupun sebaliknya. Maka demikian, dalam dilema tersebut sebuah partai mungkin untuk merubah perilakunya demi mencapai tujuannya.

Pada akhirnya, penulis dapat menarik kesimpulan dari dua teori di atas. Pertama, bahwa sangat nyata asumsi adanya interaksi partai yang berbeda di arena yang berbeda pula. Kedua, Muller dan Storm secara tidak langsung menjelaskan mengenai arena yang berbeda terkait interaksi partai, namun tertuju pada arena pemilu dan pemerintahan. Sedangkan Dahl secara jelas dan nyata menyebutkan arena kompetisi partai politik yakni dengan mengelaborasi empat tipologi sistem kepartaiannya yakni sebagai berikut: (1) *strictly competitive system* (persaingan sepenuhnya); (2) *co-operative-competitive systems* (bekerja sama bersifat persaingan); (3) *coalscent competitive systems* (saling bergabung bersifat persaingan); dan (4) *strictly coalescent systems* (saling bergabung sepenuhnya) (Mair, 1997:201).

Analisis Dahl ini pada akhirnya menjadi inspirasi dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran ilmuwan politik lain dalam mengidentifikasi perilaku partai politik di dalam sistem kepartaian, sebut saja Lipset dan Rokkan (1967) juga Jane Blondel (1966). Bahwa, tidak hanya jumlah partai saja yang jadi pertimbangan (bahkan di beberapa kasus sudah tidak relevan), tetapi ilmuwan politik harus juga mengidentifikasi perilaku partai di berbagai arena kompetisi.

3. Lipset dan Rokkan (1967) : Pengembangan Kompetisi Partai

Lipset dan Rokan (1967) sejatinya merupakan pengembang teori sistem kepartaian melalui perspektif kompetisi setelah Robert A. Dahl. Melalui kajiannya, mereka percaya bahwa formasi dari sistem kepartaian dan partai politik akan sangat baik dipahami melalui kaca mata sosiologi dengan melihat dinamika sosial yang mendasari perpecahan sosial dan ketegangan politik, atau konflik yang mereka hasilkan.

Analisisnya bermula dari pandangan mengenai dasar dari sistem partai Eropa Barat, menurut Lipset dan Rokkan, partai politik dibangun di atas perpecahan yang dihasilkan oleh dua revolusi besar yang melanda Eropa Barat dan revolusi komunis yang terjadi di Russia. Revolusi pertama yakni revolui nasional, dimulai pada abad 18 di Perancis, yang kemudian menghasilkan konflik antara budaya lokal, sama halnya dengan konflik antara kecurangan negara dan perlawanan gereja. Revolusi kedua yakni

revolusi industri dimulai pada abad 19 di Inggris. Revolusi ini menciptakan ketegangan antara kelas pekerja dan kelas pengusaha, sama halnya dengan konflik antara kelas karyawan dan kelas buruh. Setelah revolusi komunis pecah di tahun 1917 di Russia – yang ditandai dengan pecahnya gerakan pekerja – maka struktur pembelahan di Eropa kemudian membeku. Hal tersebut menurut Lipset dan Rokan, yang mendasari pandangan bahwa oposisi politik dan persaingan partai dengan cara ini dipandang sebagai perpanjangan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat (Lipset Rokan, 1967 dalam Ambardi, 2009).

Inti dari argumen Lipset dan Rokan yakni hakikat sistem kepartaian kontemporer sebelumnya telah ditentukan sejak basis sosial dari oposisi politik telah ada sejak lama. Terbentuknya partai politik merupakan hasil dari transformasi pembelahan sosial (*cleavages*) yang hidup di dalam masyarakat. Partai di Eropa pada akhir tahun 1960-an masih mencerminkan pembelahan yang muncul pada tahun 1920-an. Sehingga, dapat diartikan bahwa munculnya perpecahan sosial atau politik mendahului munculnya partai-partai dan sistem partai.

Namun pendekatan ini memiliki kelemahan. Salah satunya yakni kritik dari Sartori. Sartori (dalam Kuskridho Ambardi, 2009:25) menyatakan bahwa ‘tidak semua *cleavages* terwujudkan dalam persaingan antar partai’ dan beberapa *cleavages* sama sekali tidak tertransformasikan di

tataran politik. Lebih jauh, pentingnya gagasan transformasi ini terletak pada implikasi bahwa proses transformasi *cleavages* menuju ranah politik memerlukan aktor. Pendekatan sosiologis juga punya corak yang lain seperti yang dikatakan oleh Inglehart dan Flanagan (1987). Menurut keduanya, perubahan sosial yang terjadi setelah perang dunia kedua melahirkan generasi baru atau *cleavages* baru yang bernama *post materialisme*. Masyarakat *post materialisme* memiliki nilai yang lebih berorientasi pada isu non ekonomi (non ekonomi), seperti penentangan terhadap pertumbuhan ekonomi atau industri yang mengabaikan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan masyarakat periode perang yang lebih berorientasi pada isu material, seperti pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh *green party* atau *left – libertarian party* merupakan partai yang lahir sebagai *articulator* masyarakat *post materialist*. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Perubahan sosial yang melahirkan *cleavages* atau isu baru di suatu negara tidak otomatis memunculkan partai baru. Seperti dikatakan oleh Hugh (2001:7) di suatu negara mungkin saja muncul isu atau masalah baru yang sangat penting, tetapi tidak ada partai baru yang muncul. Sebab partai lama mampu memolitisi isu atau masalah tersebut dengan cepat.

4. Jean Blondel (1968) : Ukuran dan Kekuatan Relatif Partai

Tidak lama pasca Dahl meluncurkan tipologi sistem kepartaiannya, Jean Blondel (1968) yang sangat dipengaruhi oleh Duverger dan Dahl, mengembangkan tipologi baru yang tidak hanya berfokus pada jumlah partai di level kompetisi, namun juga kekuatan relatif partai (dan dalam perbaikan selanjutnya, Blondel juga menempatkannya pada spektrum ideologi). Inti dari pendekatan ini yakni dilakukan dengan menghitung ukuran dan kekuatan relatif yang bersumber dari perolehan suara suatu partai politik. Pendekatan ini dilakukan dengan memerhatikan bagian rata-rata suara yang dimenangkan oleh dua partai terbesar dan kemudian memertimbangkan perbandingan bagian partai pertama pada partai kedua dan ketiga. Blondel membaginya ke dalam empat tipe, yakni sebagai berikut:

“... empat kategori (yang didasarkan pada pembagian suara dan pembagian kursi): sistem dua partai (dua-partai membagi 90% atau lebih), sistem tiga partai – yang mana faktanya lebih ketat sistem dua setengah partai (suara dua partai membagi antara 75 hingga 80%), sistem multi partai dengan satu partai dominan (partai dominan mendapatkan 40% suara dan secara umum dua kali sama banyaknya dengan partai kedua), dan sistem multi partai tanpa partai dominan.”

Menurut Blondel dalam Siaroff (2006), sistem dua partai yang dimaksud yakni jika bagian dua partai lebih besar dari 90% dan yang termasuk kategori ini adalah USA, Selandia Baru, Australia, Inggris raya, dan Austria. Sistem dua setengah partai yakni jika bagian dua partai bergerak dari 75% hingga 80% suara tetapi ada perbedaan rata-rata yang lebih

besar dari 10,5% antara partai pertama dan kedua, contoh Kanada, Jerman, dan Irlandia. Sistem multi partai dominan, ketika terdapat satu partai besar memperoleh suara mencapai 40% atau lebih. Contoh Swedia, Norwegia, Denmark. Italia, Islandia. Sedangkan Sistem multi partai tanpa dominan, ketika tidak ada partai yang mencapai 40% . Contoh Belanda, Swiss, Perancis, Finlandia.

5. Sistem Kepartaian Sartori

Menurut Mair (1996), segala proses pengklasifikasian sistem kepartaian tradisional berusaha diperbaiki oleh typologi milik Sartori, yang memiliki sebuah kelebihan yakni, dapat memungkinkan dirinya untuk memotret partai secara lebih sistematis, sebab analisisnya merujuk pada pola kompetisi dan interaksi antar partai.

Melalui studinya mengenai sistem kepartaian, Sartori mendefinisikan sistem kepartaian sebagai sebuah sistem interaksi yang dihasilkan dari kompetisi antar partai (Sartori, 1976:44). Gagasan sistem interaksi tersebut mengacu pada hubungan antar-partai yang menunjukkan tingkat keteraturan, di mana partai politik bertindak dan bereaksi terhadap satu sama lain dalam pola atau cara yang berbeda, di level arena politik yang berbeda pula.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Sartori mengembangkan tipologinya sendiri mengenai sistem kepartaian, sekaligus menawarkan

dua kriteria utama yang ia klasifikasikan sebagai sistem kepartaian. Pertama yakni jumlah partai yang terkait, *kedua* adalah jarak ideologis antar partai tersebut. Mengerucut pada konteks jumlah partai yang terkait, Sartori menawarkan dua konsep penyaringan, yakni potensi koalisi (*the coalition potential*) dan potensi penindasan (*blackmail potential*). *Coalition potential* adalah partai kerap kali dilibatkan dalam proses pemerintahan, atau berada dalam koalisi mayoritas pemerintahan (Sartori, 1976:122). Sedangkan *blackmail potential* yakni ketika memiliki kekuatan intimidasi sehingga "keberadaannya, atau tampilannya, memengaruhi taktik persaingan partai dan terutama ketika mengubah arah kompetisi." (Sartori, 1976:123).

Berdasarkan jumlahnya, Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi empat tipe: *one-party*, *two-party*, *moderate pluralism* (3 sampai 5 partai), dan pluralisme ekstrim (lebih dari lima partai). Namun, Sartori merasa bahwa mengklasifikasikan partai berdasarkan jumlah partai tidaklah cukup dalam rangka mendeteksi seluruh ciri-ciri sistem kepartaian secara signifikan. Maka dari itu, analisis Sartori bergerak lebih jauh ke arah klasifikasi partai politik berdasarkan basis ideologinya. Seluruh kategori numerik kepartaian (dengan pengecualian sistem satu partai), dapat dibagi ke dalam jarak ideologi yang *low* maupun yang *high*. Melalui proses menggabungkan dua kriteria numerik dan jarak ideologi, maka Sartori merancang tujuh kategori sistem kepartaian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tipologi Sistem Kepartaian Giovanni Sartori

Jumlah Partai yang Relevan	Level Jarak Ideologi	
	Low	High
1	Satu Partai	Tidak dapat diterapkan
2	Dua Partai	Dua partai terpolarisasi
3-5	Pluralisme Moderat	Terbatas tapi terpolarisasi
>5	Pluralism Ekstrim	Pluralis Pluralis terpolarisasi

Sumber: Sartori, 1976

Salah satu yang paling utama dari tipologi Sartori yakni, sistem multi partai tidak lagi dilihat sebagai *a single category*. Keseluruhan dari sistem multi partai dispesifikkan lagi menjadi moderate dan pluralism ekstrim. Maka dari itu, masing-masing dibagi menjadi *polarized and non-polarized party system*. Maka dari itu, Sartori dapat membagi empat tipe sistem multi partai ke dalam tabel berikut:

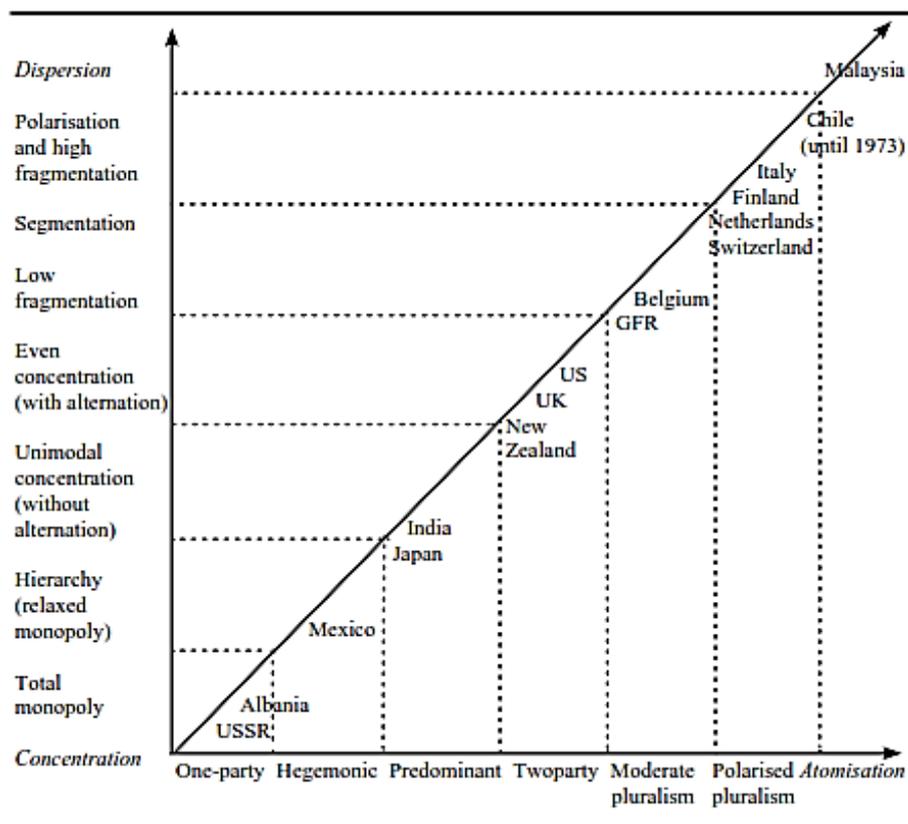
Tabel 4. Tipologi Sistem Multi Partai oleh Sartori

Jumlah Partai	Jarak Ideologi	
	Low	High
3-5	Pluralisme Moderat	Terbatas tetapi pluralisme terpolarisasi
>5	Pluralisme Ekstrim	Pluralisme Terpolarisasi

Sumber: Sartori, 197

Pemecahan ini tentu saja akan sangat berguna, karena karena memiliki kelebihan yang lebih “diskriminatif”, dan memiliki kepekaan yang baik dalam mengenali perbedaan kecil yang mungkin ada di antara sistem multi-partai. Artinya, jika biasanya sistem multi partai dikategorikan ke dalam *single category*, namun kali ini Sartori menuangkannya ke dalam kelas yang berbeda-beda.

Pola pembagian sistem kepartaian berdasarkan jumlah dan ideologi tersebut, beserta negara yang memiliki sistem kepartaian serupa secara lebih eksplisit akan ditampilkan pada bagan berikut:



Sumber: Sartori (1976:133)

Gambar 1. Negara Digambarkan ke dalam Dispersi (Penyebaran) Kekuatan Sistem

Walaupun teori yang digagas oleh Sartori ini adalah salah satu teori sistem kepartaian yang paling banyak dikutip, namun tipologinya memiliki beberapa kelemahan. Ambardi (2009:10) menyebutkan kelemahan tipologi Sartori yakni, hanya mengasumsikan bahwa hanya ada satu arena

kompetisi dalam politik. Tipologinya mengabaikan perbedaan yang terjadi antara arena pemilu, legislatif bahkan pemerintah. Logika yang mendasarinya adalah, argumen Sartori yang menyatakan bahwa hasil pemilu akan menentukan sikap partai di tingkat legislatif. Untuk membedakannya, Sartori berasumsi bahwa *party behavior* di kedua arena tersebut cenderung akan konsisten seiring berjalannya waktu. Misalnya ada partai berideologi A yang ingin menarik suara pemilih dalam pemilu. Ketika partai ini menang dan memperoleh kursi di legislatif, partai akan memungkinkan untuk membawa sikap ideologis dan kepentingan para pendukungnya untuk diwakilkan di legislatif. Ketika partai butuh untuk membuat koalisi, partai akan bergabung dengan partai lain yang ideologinya serupa. Jika tidak, maka partai akan kehilangan dukungan dari para pendukung saat pemilu. Logika tersebut yang ditangkap oleh Mayhew yang menyatakan bahwa:

“...incentives in the first electoral arena shape the behavior in the second legislative arena. Parliamentary parties are thus seen as a consequence of the need to fight and win election. ... [P]arties in the legislatures develop largely as a consequence of the functional value of parties at election time” (Mayhew dalam Bowler, 2000:158).

Ambardi (2009) menambahkan bahwa sangat memungkinkan bagi partai untuk menunjukkan tipe interaksi yang berbeda. Hubungan ketika pemilu bisa jadi ditinggalkan. Pasca pemilu berakhir, maka partai bisa dengan mudah menunjukkan tipe interaksinya yang berbeda.

Pada akhirnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa konsepsi Sartori dapat diadaptasi untuk mendeskripsikan interaksi partai di arena kompetisi yang berbeda. Karena pada hakikatnya, akan sangat memungkinkan bagi partai politik untuk melakukan polarisasi ideologi di satu arena, tetapi kemudian berkolisi di dalam arena berikutnya. Teori ini juga memungkinkan untuk menjawab pertanyaan hingga sejauh mana partai politik dapat mempertahankan derajat komperisinya di dalam arena yang berbeda-beda. Tentu saja, akan ada saat yang memungkinkan di mana jarak ideologi antar partai menjadi lenyap dan kompetisi pun berhenti, setelah elektoral proses selesai dilaksanakan.

6. Katz dan Mair (1995) : Kemunculan *Cartel Party*

Sebelumnya telah dijelaskan paparan mengenai dinamika perkembangan sistem kepartaian hingga kemunculan term partai kartel di tahun 1996 oleh Richard Katz dan Peter Mair yang sangat kompeten dalam mengamati perilaku partai politik beserta interaksinya di segala arena. Pada bagian awal, penulis akan mencoba memaparkan penyebab kemunculan partai kartel.

Pada banyak riset tradisional, eksistensi partai politik sering diterjemahkan sebagai sebagai *agent of society*, asosiasi volunteer yang bertugas mengartikulasi, mengagregasi, dan mewakili kepentingan warga negara. Namun, dalam dua dekade terakhir interpretasi tradisional tersebut semakin dipertanyakan. Partai politik dirasakan mulai 'dikendarai' oleh

sejumlah perhitungan-perhitungan profesional dari para elit partai, guna mendapatkan bagian dari distribusi atas beragam manfaat selektif, daripada keyakinan akan ideologi masing-masing partai. Sejalan dengan hal tersebut, maka fenomena ‘bekerja pada negara’ guna memperoleh pendanaan bagi partai telah berkembang begitu pesat (Biezen, 2003a; dan Hopkin, 2004).

Tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik adalah institusi politik yang vital untuk demokrasi kontemporer. Partai politik menjadi semakin esensial sebagai sebuah organisasi bagi *modern democratic polity* dan krusial sebagai manifestasi atas pluralisme politik. Kedudukan penting partai politik dijelaskan oleh Biezen (2003a) sebagai berikut:

“Partai memiliki sebuah fungsi yang penting sebagai saluran guna mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di dalam kelompok masyarakat ke dalam sistem politik; mereka memobilisasi dan menyosialisasi hal-hal politik yang bersifat umum, khususnya pemilihan umum; dan mereka mengonstitusikan mesin inti dari artikulasi dan agregasi kepentingan sosial. Partai politik lebih jauh lagi mengisi sebuah peran penting dalam rekrutmen elit politik dengan menominasi dan melakukan seleksi atas kandidat untuk jabatan publik; mereka cukup esensial sebagai organisasi pemerintah, dan menampilkan sebuah fungsi penting terkait pembuatan kebijakan dengan membuat keputusan-keputusan politik, kemudian mengimplementasikannya ke dalam praktik politik.”

Guna menjalankan seluruh aktivitas inti tersebut, maka Bolleyer (2006) mengatakan bahwa partai politik membutuhkan pendanaan yang sesuai. Oleh sebab itu, maka Mair (1994) mengatakan bahwa partai diharuskan untuk mencari kemanapun sumber daya mereka, salah satunya dengan menempatkan diri sebagai bagian dari esekutif maupun legislatif. Strategi

utama yang dilakukan yakni membuat segala macam regulasi, yang esensinya adalah mengalihkan subsidi negara menjadi sumber material dan finansial partai.

Terkait dengan strategi partai politik tersebut, maka partai politik mulai mengupayakannya sejak dalam arena elektoral proses. Katz dan Mair (1995:16-17) mengungkapkan bahwa dewasa ini, perbedaan posisi material antara pihak pemenang pemilu dan yang kalah pemilu secara dramatis berkurang. Pasca pemilu, interaksi antar partai politik mulai bergeser. Pihak yang kalah masih dengan mudah memiliki akses ke pemerintahan.

Secara etimologis, 'kartel' diambil dari bahasa Italia yakni *cartello* yang diturunkan dari istilah untuk selembar kertas. *Cartello* atau kertas ini kemudian pada awalnya dipergunakan sebagai media perjanjian tertulis untuk keperluan asosiasi kolusif yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang berusaha memonopoli dan menguasai harga dari suatu produk atau jasa. Istilah 'kartel' kemudian meluas dalam spektrum ekonomi yang artinya monopoli atau sindikat. Kartel dibedakan dari pasar, sebab kehadiran kartel berpotensi merusak pesaing (kompetitor) (Studwell, 2007:x).

Kartel diterapkan ketika beberapa produsen bekerjasama dalam menjual barang dan jasa dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan. Tujuan

dari pembentukan kartel yaitu membatasi kompetisi tiap produsen serta menghambat masuknya produsen baru untuk bersaing di dalam pasar baru. Konsep kartel yang lazim digunakan di dunia ekonomi ini, kemudian pertama kali dikembangkan dalam menganalisis partai politik oleh Richard Katz dan Peter Mair untuk menggambarkan fenomena partai pasca-industrialisasi yang terjadi di Eropa Barat.

Secara kontekstual, Partai Kartel dijabarkan Katz dan Mair ke dalam pernyataan berikut: *“The cartel party thesis holds that political parties increasingly function like cartels, employing the resources of the state to limit political competition and ensure their own electoral success.”* (Katz dan Mair, 2009). Mengurucut pada penerapannya di dalam praktik politik, kartel dibedakan dari koalisi sebab mereka melakukan kooptasi. Partai berkolusi menjadi agen dari negara dan menggunakan sumber daya-sumber daya negara (partai negara) untuk memastikan kehidupan kolektif mereka sendiri sehingga tetap dapat eksis.

Partai kartel sebagaimana yang juga dikatakan oleh Wolinetz (dalam Pamungkas, 2011), yaitu berorientasi pada pencari-jabatan (*office-seeking*). Sehingga dalam perekrutan elit partai, rekrutmen terutama dilakukan dari dalam struktur negara (birokrasi). Partai ini berusaha mengambil pejabat-pejabat strategis negara untuk menjadi bagian dari partai. Hal ini dapat dipahami selain karena partai sangat bergantung pada

negara, tetapi juga tujuan partai yang ingin memertahankan kekuasaannya di eksekutif. Seperti yang dikatakan Wollinetz (2002:152) sebagai berikut:

“...The vote-seeking party corresponds to a catch-all or electoral-professional party, while the cartel party is one variant of an office-seeking party... Here, the primary emphasis is on securing government office, even if it is at the expense of policy goals or maximizing votes. Office-seeking parties seek either to hold power alone, or more realistically (in the context of the systems in which they operate) to share power with others-either for the purposes of survival (one implication of the cartel party model), or to act as a stabilizer or balance within the system or, more likely, to gain access to patronage.”

Menurut Wollinetz, salah satu karakteristik dari partai kartel yakni *securing government office* dalam rangka berbagi kekuasaan dengan kelompoknya, sekaligus bertujuan memertahankan survivalitasnya atas negara. Asumsi tersebut sebenarnya juga berdasar dari apa yang diungkapkan oleh Katz dalam bukunya bersama Crotty (2006:265) yakni sebagai berikut:

“The cartel party, on the other hand, displays the most closed type of elite recruitment as incumbent parties seek to maintain their control of public office by narrowing the scope of elite recruitment.”

Katz membahas rekrutmen dalam partai kartel. Rekrutmen politik seperti yang digambarkan oleh Katz di atas adalah cenderung tertutup dan terfokus pada kandidat yang memiliki peluang kemenangan besar. Proses ini sangatlah tidak demokratis. Partai seolah menutup pintu bagi pihak di luar ‘target’ mereka. Hal ini disebabkan karena partai senantiasa ingin memertahankan survivalitas finansialnya melalui kontrol negara.

Kemudian dalam cara memenangi pemilihan, prosesnya bergeser dari partisipasi massa atau anggota ke *marketing media* atau kampanye dengan karakter padat modal lainnya. Kelompok-kelompok perkumpulan atau perserikatan menjadi semakin kurang berharga dibandingkan dengan masuknya surat kabar, tayangan di televisi dan donasi-donasi besar. Sehingga partai kartel menjadi sangat dekat pula dengan media dan memanfaatkannya dengan baik (Katz dan Mair, 1995). Seperti yang dikatakan Katz dan Mair (2009:755) sebagai berikut:

“The election campaigns that are conducted by cartel parties are capital-intensive, professionalized and centralized, and are organized on the basis of a strong reliance on the state for financial subventions and for other benefits and privileges. Within the party, the distinction between party members and non-members becomes blurred, in that through primaries, electronic polling, and so on, the parties invite all of their supporters, members or not, to participate in party organizational activities and candidate selection. Indeed, it is through participation in activities such as primaries that citizens become defined as supporters.”

Terkait konteks kampanye mahal ini, pengaturannya di tanah air telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini membatasi perilaku kampanye mahal yang dimungkinkan dilakukan oleh partai politik, yang salah satunya dapat berpotensi menghasilkan perilaku korupsi di kemudian hari.

Sehingga, berbagai dimensi antara perilaku partai dalam *competitive party system* dan *cartelized party system*, telah dirangkum Ambardi (2009:25) ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Dimensi Perilaku Partai dalam *Competitive* versus Sistem Kartelisasi Partai

Dimensi	<i>Competitive Party System</i>	<i>Cartelized Party System</i>
Ideologi dan program partai	Faktor penting dalam menentukan perilaku partai ^a	Bukan faktor penting dalam menentukan perilaku partai ^b
Perilaku koalisi	Cenderung untuk menciptakan program dan ideologi berdasarkan ideologi	Koalisi sembarangan (<i>promisuous in making coalition</i>) ^b
Oposisi politik	Eksis dengan pembatasan yang jelas ^a	Tidak ada ^b
Dampak apabila memenangkan ataupun kalah dalam pemilu, di dalam formasi pemerintah	<i>consequential</i>	<i>Inconsequential</i> ^b
Metode dalam berhadapan dengan isu kebijakan	Dibawa dengan partai dalam bentuk individu	Dibawa oleh partai dalam bentuk kelompok

^{a.} diadaptasi dari sistem kepartaian Sartori

^{b.} diadaptasi dari karakteristik partai kartel oleh Katz dan Mair (1995, 1996)

Sumber: Ambardi, 2009:25

Kartel atau tidaknya suatu partai, menurut Katz dan Mair (1995:18-20), dapat dilihat dari kompetisi antar partai di proses elektoral. Motivasi penuhnya yakni tidak ingin bersaing. Menurutnya, kemunculan partai kartel membuat kompetisi pemilu menjadi penuh ‘muatan kepentingan’. Pada situasi spesifik, partai jadi terlihat lebih ‘menggoda’ daripada unsur kompetisinya. Kemungkinan kompetisi partai akan berhenti di level lain

(di luar level elektoral) tidak bisa dideteksi (Storm 1989, Bartolini, 2002 dalam Ambardi, 2009).

Di sisi lain, kartelisasi dapat dilihat sebagai *opposite of competition*, yang dapat didefinisikan sebagai situasi di mana partai politik menyerahkan ideologi dan perbedaan program yang digagas partai untuk hal lain. Situasi ini menjadi kian memungkinkan, menurut Katz dan Mair, karena *all major parties share the same interest, that is, to maintain their collective survival* (1995:5). Batas ideologi kian kabur, sehingga menjadi faktor utama perilaku partai. Sebagai konsekuensinya, oposisi politik tidak lagi dapat diidentifikasi. Bukannya mewakili kepentingan yang berbeda dari masyarakat, sistem kartelisasi partai justru ditandai dengan pemisahan antara pemimpin partai dan prinsipalnya (aktivis partai dan *voters*), serta termarginalisasinya penantang politik (Katz dan Mair, 1995).

Antonius Supriatma dalam jurnal politiknya yang berjudul “Menguatnya Kartel Politik para Bos” dalam Jurnal Prisma Vol. 28, No. 2, Oktober 2009, menggambarkan tiga karakter kartel politik di Indonesia, di antaranya:

1. Pertama, kartel sangat menekankan pragmatisme.

Sikap dan pilihan politik diambil berdasarkan kalkulasi untung rugi secara finansial, terutama untuk menjamin kebutuhan logistik partai.

Pada kartel politik, semua pihak ingin bersama-sama untuk mendominasi dan mengontrol sumber daya publik. Oleh karena itu,

tidak ada pertimbangan dan perbedaan ideologis antara partai politik yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, tidak ada perbedaan antara PKS dan PPP yang bisa dikategorikan sebagai partai Islam, dengan Partai Demokrat atau Golkar yang lebih nasionalis. Satu hal yang menyatukan mereka yakni kebutuhan besar untuk mendapatkan dana-dana politik dan kebutuhan ini jauh lebih penting daripada perbedaan ideologi maupun sikap politik.

2. Kedua, yakni kaburnya batas antara partai yang memerintah dengan partai oposisi. Praktis partai politik yang tidak termasuk dalam koalisi tidak berarti memilih untuk menjadi oposisi. Bisa jadi itu hanya soal menunggu waktu dan giliran untuk sama-sama masuk ke dalam pemerintahan. Perkembangan politik pada tahun 2011 lalu, menunjukkan ada keinginan dari Partai Gerindra dengan Partai Demokrat dan SBY. Fakta bahwa Prabowo adalah rival SBY dalam pilpres 2009 tidak mengurangi upaya partai untuk sama-sama memerintah dan mengakses sumber daya publik (Supriatna, 2009).
3. Ketiga, kartel politik adalah sistem kolusif yang mengabaikan masyarakat. Pada kartel politik, yang terjadi di level elit yakni inklusi atau saling mengakomodasi. Sedangkan bagi rakyat adalah eksklusif atau pengabaian. Partai dalam lingkaran kartel merasa tidak perlu mendengarkan suara rakyat, sepanjang partai bisa menikmati kekuasaan bersama partai lainnya. Supriatna juga menyebutkan sejumlah contoh fenomena ini pada tataran praktis. Di antaranya tidak muncul protes atau gerakan perlawanan dari partai politik pada kasus

Lumpur Lapindo. Pihak yang melakukan *boycott* hanya para korban dan sejumlah LSM. Sementara partai politik tidak menunjukkan kejelasan sikap.

Poin-poin di ataslah yang dewasa ini mewarnai sistem politik di Indonesia. Alih-alih berkompetisi dan menciptakan *check and balance* yang esensial dalam demokrasi, partai politik dan berbagai kepentingan politik justru berkolusi untuk sama-sama mengakses sumber daya publik. Bahkan, Widoyoko (2013) dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada oposisi dalam politik Indonesia. Bahkan, perkembangan politik terakhir menunjukkan dengan terang benderang berbagai konflik dan perbedaan dalam koalisi tidak memunculkan keinginan bagi sebagian partai politik untuk keluar dari koalisi.

Lebih lanjut lagi, Ambardi (2009) mengungkapkan dampak kartelisasi adalah sebagai berikut:

1. Partai politik menjadi kehilangan ideologi dan program.

Motivasi penuhnya dalam proses elektoral yakni tidak ingin bersaing. Menurutnya, kemunculan partai kartel membuat kompetisi pemilu menjadi penuh ‘muatan kepentingan’. Logika kartel ditunjang dengan oligarki di tubuh partai, memandang remeh ideologi atau prinsip-prinsip haluan partai. Mereka bahkan cenderung tidak peduli dengan kebijakan atau agenda presiden selama mereka tetap memperoleh keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi bagi keberlanjutan partai-partai mereka;

2. Partai mudah bergonta-ganti arah kebijakan, dan pola koalisi yang dibangun pun cenderung bersifat serba boleh (*promiscuous*) dan turah (*oversized*) disertai penuh muatan kepentingan;
3. Degradasi hakikat demokrasi, sebab dalam kartel politik yang dirugikan adalah rakyat. Kebijakan yang dilahirkan untuk publik nantinya akan bersumber dari kompromi elit dengan preferensi uang dan bagi porsi jabatan, bukan dari kompromi antara elit pemerintah, antara partai pemerintah dan oposisi, dan antara masyarakat sebagai evaluator kinerja *ruling elite*;
4. Isu publik yang krusial dalam masyarakat menjadi termarjinalkan akibat sikap tutup mata elit hasil kartelisasi.

Pada akhirnya, dari keseluruhan teori sistem kepartaian yang ada di dunia yang mengangkat sudut pandang yang berbeda-beda disertai dengan kelebihan dan kelemahannya, penulis dapat menggunakan teori partai kartel dalam menggambarkan pola perilaku yang menjurus ke arah kartel serta pragmatis yang dilakukan partai pengusung dan partai pendukung Herman HN dalam pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015.

7. Andres Uffen (2006): *Presidential Parties*

Sebagian besar dari analisis sistem kepartaian, mengawali ‘kisah’nya dari bagaimana partai terbentuk (sebut saja Dahl (1967), Lipset dan Rokkan (1967)), yang kemudian berlanjut pada pola interaksi partai dengan partai lain, dengan pendukungnya, maupun intra partai di arena kompetisi yang berbeda-beda (Sartori (1976), Katz dan Mair (1996)). Sebelum Katz dan Mair, sebenarnya terdapat juga teori yang membahas mengenai pola relasi antara partai di kursi parlemen dengan eksekutif, yakni milik Juan Linz (1994) serta Samuel dan Shughart (2010). Linz mengatakan bahwa presiden sebagai kepala eksekutif tertinggi kerap kali dikendalikan parlemen dan tidak dapat membubarkan legislatif.

Sedangkan Samuel dan Shughart secara sistematis menyebutkan bahwa anggota partai memainkan peran sebagai “*principals*” dan pemimpin partai sebagai “*agents*” yang sengaja didelegasikan kewenangan untuk membangun dukungan populer dan membawa kepentingan partai ke dalam kebijakan. Kandidat calon presiden biasanya bukan dari kader partai yang memiliki kemampuan mengurus organisasi, melainkan dari luar yang secara luas bisa menarik suara pemilih. Samuel dan Shughart (2010) menyebutnya sebagai “*presidentialization of political party*”.

Pola relasi serupa juga turut dibahas di dalam negeri. Di Indonesia, salah seorang Indonesianis berkebangsaan Jerman yang meneliti bagaimana perkembangan partai politik di Indonesia pasca reformasi, yakni Andres

Uffen (2006). Hal ini dimulai dari penelitiannya yang menyatakan bahwa sejak amandemen konstitusi, pengenalan pemilihan presiden langsung dan penguatan kursi presiden dengan menaikkan tingkat untuk *impeachment*, eksekutif telah tumbuh kuat dalam kaitannya dengan parlemen. Partai-partai politik telah kehilangan kemampuan untuk memilih presiden di MPR seperti yang mereka lakukan pada tahun 1999. Uffen (2006:17-18) memberikan contoh sebagai berikut:

“The direct election of the president has facilitated the emergence of formerly insignificant parties as vehicles for presidential candidates. The best example is the Partai Demokrat utilise by Susilo Bambang Yudhoyono. Such a presidential party would have been inconceivable under the old system of indirect elections. PD has no real platform and still lacks a strong organisational structure, especially below the national level. At the last congress in 2005, Kristiani Herawati, the wife of Susilo and deputy leader of the party, reportedly engineered the election of her brother-in-law into the office of party chairman. The PD will possibly just manage to survive as long as Susilo stays in office.....In addition, one can argue that some of the other parties – like PDI-P, Golkar under Yusuf Kalla, PAN under Amien Rais and PKB under Abdurrahman Wahid – are being presidentialised because they are preparing their respective leaders (or their handpicked candidates) for the next presidential election in 2009 and are organising the party machinery accordingly”

Menurut Ufen, partai demokrat adalah salah satu contoh partai yang sengaja dibuat guna menaikkan pemimpinnya menjadi kandidat presiden. Partai Demokrat dianggap tidak memiliki *real platform* dan struktur organisasinya masih lemah, terlebih di tingkat nasional. Selain Partai Demokrat, ada PAN di bawah Amien Rais dan PKB di bawah Abdurrahman Wahid. Deretan partai besar ini dapat dikategorikan sebagai *presidentialised party*, sebab sengaja dibentuk guna mempersiapkan pemimpin partai menjadi salah satu kandidat presiden.

Ufen (2006) dalam Kamawura (2013:5) memandang pemilu presiden langsung telah mempengaruhi organisasi partai. Konsep *presidential party* dapat diartikan partai sebagai mesin bagi kandidat presiden, hingga studi ini dapat dikatakan sebagai '*personal party*'. *Presidentialization parties* menurut Ufen, juga mengindikasikan fenomena di mana kemunculan kandidat presiden dalam sebuah partai baru, dapat menarik perhatian pemilih dan menghadirkan kebijakan-kebijakan populis yang dimunculkan di berbagai media massa. Sebab, inti utama dari organisasi partai dan ideologinya yakni kursi presiden.

Namun, teori ini dicatat Kamawura (2013) memiliki sejumlah kelemahan. Di antaranya, Uffen hanya menunjukkan bahwa pemilihan presiden secara langsung telah memicu lahirnya kandidat presiden dari partai yang sengaja dibuat untuk hal tersebut, tetapi tidak menjelaskan bagaimana presidensialisme memengaruhi organisasi partai.

D. Manifestasi Pragmatisme dalam Praktik Politik Melalui Perspektif *Rational Choice*

Pada awalnya, menurut Copleston dalam *A History of Philosophy* (Vol. VIII, London, 1966, Part IV), pemula aliran pragmatisme di Amerika Serikat adalah C.S. Peirce (1839-1914). Pierce dalam Eruce (1979) menyebutkan bahwa secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua padanan kata, yakni *pragma* dan *isme*. *Pragma* memiliki makna sebagai perbuatan atau tindakan, sedangkan *isme* adalah aliran, ajaran,

atau paham. Oleh sebab itu, secara filsafatis maka pragmatisme dapat diterjemahkan sebagai ajaran yang menekankan bahwa sebuah bentuk pemikiran mengikuti tindakan. Kriteria kebenarannya yakni 'faedah' atau 'manfaat'. Artinya, suatu teori maupun hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila bisa diaplikasikan dan membawa manfaat.

Pada awal perkembangannya, pragmatisme dianggap sebagai upaya memersatukan ilmu pengetahuan dan filsafat. Tujuannya adalah agar filsafat dapat lebih bermanfaat bagi tataran kehidupan praktis manusia. Sehubungan dengan usaha tersebut, maka selanjutnya pragmatisme berkembang pesat menjadi suatu metode untuk memecahkan ragam perdebatan filosofis-metafisik yang tiada henti yang hampir mewarnai seluruh perkembangan dan perjalanan filsafat sejak zaman Yunani kuno (Stroh, 1968).

Peirce dalam Abdullah (2004:2) mengatakan bahwa terdapat dua poin yang menjadi pertimbangan kaum pragmatis dalam bertindak. Pertama adalah berupa ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan yang kedua yakni tujuan dari tindakan itu sendiri. Manusia memiliki ide atau keyakinan yang ingin direalisasikan dan memiliki tujuan tertentu, yang mana sekaligus merupakan konsekuensi praktis atas sebuah tindakan. Sehingga, bagi Pierce dalam Abdullah (2004:4), apa yang dikatakan sebagai prinsip pragmatis dalam arti yang sebenarnya yakni suatu metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan.

Namun, pada perkembangannya, pragmatisme berkembang tidak hanya pada konteks 'mendamaikan' filosofis dan metafisik, namun juga telah masuk ke dalam tataran politik terutama dalam tubuh partai politik. Jika pada pragmatisme menyatakan bahwa segala jenis ide atau gagasan akan benar apabila memiliki manfaat secara praktis karena memiliki tujuan yang jelas, maka politik pun demikian.

Montouri (2010) menyatakan bahwa *political pragmatism* adalah sebuah bentuk unik para filsuf Amerika, yang dikembangkan dan diobservasi oleh Tocqueville. Menurutnya, pragmatisme politik diartikan sebagai '*if it works, we don't really care why.*' Artinya, ini merupakan sebuah penolakan atas teori dan ideologi yang biasa dipergunakan untuk menguji fakta dan realitas. Baginya, *The Constitution* adalah contoh yang jelas atas *political pragmatism* di dalam aksi politik.

Grand theory dari penelitian ini, yang kerap kali digunakan dalam menganalisis perilaku politik yakni *rational choice theory* juga meyakini hal yang sama, yakni *self interest* pada sikap politik individu maupun kelompok. Pada pendekatan ini, individu dinilai akan mencoba untuk mencapai tujuan mereka melalui cara-cara yang instrumental dan efisien (praktis). Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa individu selalu berupaya untuk meningkatkan manfaat yang mereka harapkan, dengan sedikit mengeluarkan *cost* dalam bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, karakter pragmatisme yang menekankan cara-cara praktis dan

efisiensi guna membesar manfaat pelakunya, merupakan ruh dari prinsip rasional tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pragmatisme dalam berpolitik merupakan praktik yang buruk? Dalam studi *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Schumpeter dalam Huntington (1991:5) menggariskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu.

Sehingga, demokrasi prosedural atau elektoral tersebut melegitimasi adanya kontestasi dan kompetisi memperoleh kekuasaan sebagai kepentingan politik menguatnya sikap politik (budaya politik) pragmatisme partai-partai politik dalam perjuangannya mengakumulasi kekuasaan secara instan. Dalam perspektif budaya politik, Almond dan Verba (1990:13) memaknai budaya politik sebagai sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara dalam suatu sistem.

Dampak negatif dari menguatnya sikap pragmatisme politik yang fenomenal itulah yang menimbulkan berbagai distorsi yang mengganggu proses demokrasi, antara lain sebagai berikut:

1. Demokrasi kapitalistik

Agar eksistensi organisasi partai politik dapat bertahan dan mampu membiayai kompetisi politiknya dalam proses demokrasi sangat memerlukan pendanaan yang besar. Dalam realitasnya dana yang bersumber dari iuran internal partai kurang memadai, sehingga perlu dukungan dana yang besar dari eksternal partai, seperti dari para donatur, para pemodal, dan para simpatisan lainnya.

Dalam demokrasi kontemporer realitas tersebut memberikan pencitraan munculnya model “demokrasi kapitalistik”. Menguatnya sikap pragmatisme mengejar kekuasaan politik dengan mengandalkan kekuatan kapital/finansial tersebut berimplikasi kesikap mental rakyat, yaitu merefleksi tumbuhnya budaya politik transaksional (jual beli) suara rakyat sebagai pemilik mandat demokrasi melalui kompetisi pemilu secara reguler. Kondisi fenomenal inilah yang dimaknai pula sebagai “demokrasi transaksional”.

2. Lahirnya kartel politik

Berkaitan dengan lahirnya demokrasi kapitalisme di atas, maka kemudian manajemen partai politik yang berbasis kekuatan kapital dan berorientasi kekuasaan tersebut telah mendorong proses demokrasi dikelola secara “kartel politik”, yang oleh Slater (2004) dideskripsikan sebagai “relasi antar elite politik yang dicirikan dengan tingginya kekompakan elite, minimnya kekuatan oposisi, dan terlindunginya para elite dari realitas mekanisme akuntabilitas politik”. Esensi demokrasi

kian termarginalkan, sebab negara akan bekerja hampir tanpa kontrol dari oposisi dan masyarakat luas.

3. Lemahnya kaderisasi politik

Menguatnya orientasi kekuasaan dan politik transisional di kalangan partai politik dalam nuansa demokrasi kapitalistik tersebut, menjadikan fungsi kaderisasi politik terabaikan atau tidak berjalan, malah ditengarai adanya kebijakan instan yang memberikan akses masuknya para pemodal, kerabat elit politik, dan kerabat birokrat (pejabat birokrasi) tanpa melalui seleksi yang terprogram (Soebagio, 2009).

Tampilnya para calon legislatif (caleg) yang bernuansa kekerabatan politik dengan basis rekam jejak latar belakang yang masih diragukan kompetensi dan militansinya sebagai politisi dan negarawan karena tanpa melalui proses seleksi (kaderisasi) tersebut, akan dapat menurunkan kualitas dan lemahnya kinerja lembaga legislatif, misalnya pada periode 2009-2014 dalam menuntaskan target produksi UU sebagai bagian dari fungsi legislasi. Deskripsi faktual dampak pragmatisme dalam praktik politik tersebut dapat dilihat pada anggota legislatif periode 2009-2014 yang bernuansa kekerabatan politik pada tabel berikut.

Tabel 6. Keekerabatan birokrasi sebagai anggota DPR dan DPD RI Periode 2009-2014

No	Keluarga Birokrat	Hubungan Keekerabatan	Posisi Legislatif	Parpol
1	Presiden RI	Anak	Anggota DPR RI	Demokrat
2	Mantan Presiden RI	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
3	Wapres RI	Anak	Anggota DPR RI	Golkar
4	Gubernur DIY	Istri	Anggota DPD RI	
5	MenSos: Bachtiar Chamsyah	Anak	Anggota DPR RI	PPP
6	Gubernur Sulawesi Utara	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
7	Gubernur Sulawesi Selatan: Syahrul Yasin Limpo	Anak	Anggota DPR RI	PAN
8	Gubenur Kalimantan Timur	Anak	Anggota DPR RI	PPP
9	Gubernur Kalimantan Barat	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
10	Gubernur Kalimantan Selatan	Anak	Anggota DPD RI	
11	Gubernur Kalimantan Tengah	Keponakan	Anggota DPR RI	PDIP
12	Gubernur Sulawesi Selatan	Anak	Anggota DPR RI	Golkar
13	Gubernur Jambi	Istri	Anggota DPR RI	PAN
14	Gubernur Lampung	Anak	Anggota DPD	PDIP
15	Gubernur Banten	Suami	Anggota DPR RI	Golkar

Sumber: Kompas (2009) dalam Soebagio (2009)

Tabel 7. Realisasi UU Produksi DPR RI

No	Periode	Target	Realisasi	Keterangan
1	19990-2004	300	169	
2	2004-2009	284	157	Per Maret 2009

Sumber: Kompas, 2008 dan 2009 dalam Soebagio (2009)

E. Idealisasi Fungsi Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi adalah sangat esensial. Kelahirannya bukan tanpa tujuan dan fungsi tertentu. Theorem ‘*no free lunch*’ sangat lekat dengan identitas partai politik sebagai organisasi yang sarat akan kepentingan dalam setiap kebijakan yang diambil, baik di level partai sebagai organisasi, pada setting proses elektoral, hingga ketika partai berhasil menduduki kursi pemerintah baik di level eksekutif maupun legislatif. Kendati demikian, partai politik tetaplah organisasi yang memiliki fungsi krusial dalam negara demokrasi. Berikut adalah fungsi partai politik menurut V.O. Key Jr (1964):

1. Partai di elektorat (*parties in the electorate*)

Fungsi partai dalam konteks ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam rangka proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai di level proses elektoral, yakni sebagai berikut:

a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih (*Simplifying electoral choices for voters*).

Politik adalah fenomena yang kompleks. Pemilih rata-rata mengalami kesulitan dalam memahami semua persoalan dan mengonfrontasi berbagai isu-isu dalam pemilu. Partai politik membantu untuk membuat politik “*user friendly*” bagi warga negara.

b. Pendidikan warga negara (*educating citizen*)

Partai politik adalah edukator. Pada konteks itu partai politik adalah mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat

untuk berperilaku tertentu. Partai politik bertugas memberikan informasi yang penting bagi warga negara. Selain itu, partai politik juga mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu.

- c. Membangkitkan symbol identifikasi dan loyalitas (*generating symbolic loyalties*)
 Pada sistem politik yang stabil, pemilih membutuhkan jangkar politik, dan partai politik dapat memenuhi fungsi ini. Lebih lanjut, partai politik menyediakan basis identifikasi politik yang terpisah dari negara itu sendiri, dan ketidakpuasan terhadap hasil pemerintahan dapat langsung ditujukan kepada institusi-institusi spesifik dari negara itu sendiri.
- d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi (*mobilizing citizens to participate*)
 Hampir semua negara demokrasi, partai politik memainkan peran penting dalam memperoleh massa untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partai politik memainkan peran tersebut secara langsung dan tidak langsung.

2. Partai sebagai organisasi (*parties in the organization*)

Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini partai politik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan (*recruiting leaders for elected/appointed office*)
 Fungsi ini kerap kali disebut sebagai fungsi paling mendasar dalam partai politik. Pada fungsi ini, partai politik mencari,

meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing pada pemilu. Desain rekrutmen kemudian menjadi aspek penting yang harus dipikirkan partai untuk menjelaskan fungsi ini;

b. Pelatihan elit politik (*training elites*)

Pada fungsi ini, partai politik melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap elit yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Fungsi ini dipercaya menjadi bagian vital kesuksesan kerja-kerja sistem demokrasi;

c. Pengartikulasian kepentingan politik (*articulating interest*)

Pada fungsi ini, partai politik menyuarakan kepentingan pendukungnya melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan;

d. Pengagregasian kepentingan politik (*aggregating interest*)

Fungsi ini membedakan partai dengan kelompok kepentingan, yaitu partai melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, sedangkan kelompok kepentingan hanya sebatas artikulasi kepentingan. Fungsi agregasi tersebut merujuk pada penggabungan dan penyeleksian tuntutan kebijakan dari berbagai kepentingan dari berbagai kelompok sosial ke dalam alternatif-alternatif kebijakan atau program pemerintahan.

3. Partai di pemerintahan (*Parties in the government*)

Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan

sejumlah aspek kunci proses demokratik. Terdapat 7 (tujuh) fungsi utama yaitu:

- a. Menciptakan mayoritas pemerintahan (*creating government majority*).

Fungsi ini dilakukan setelah pemilihan. Partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen dituntut untuk menciptakan mayoritas politik agar, dalam sistem parlementer, dapat membentuk pemerintahan, atau dalam sistem presidensiil, mengefektifkan pemerintahan;

- b. Pengorganisasian pemerintahan (*organizing government and the legislature*).

Pada fungsi ini partai politik menyediakan mekanisme untuk pengorganisasian kepentingan dan menjamin kerjasama di antara individu-individu legislator;

- c. Implementasi tujuan kebijakan (*implementing policy objectives*).

Ketika di pemerintahan, partai politik adalah aktor sentral yang menentukan output kebijakan pemerintahan. Idealnya, pelaksanaan fungsi ini dibentuk dari transformasi manifesto partai dan janji kampanye. Manifesto partai atau *platform* partai dan janji kampanye dengan kebijakan semestinya adalah linier;

- d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dengan oposisi.

Fungsi ini diperankan oleh partai-partai yang tidak menjaadi bagian dari penguasa (eksekutif). Pada fungsi ini, partai oposisi mengembangkan alternatif kebijakan di luar kebijakan yang ditempuh penguasa. Harapannya, partai oposisi dapat menarik

simpati pemilih sehingga di pemilihan berikutnya kekuasaan dapat diambil alih;

- e. Menjamin tanggungjawab tindakan pemerintah.

Partai penguasa bertanggungjawab terhadap berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah. Mekanisme ini menjadikan pemilih lebih mudah untuk memberikan kredit atau penghukuman atas keberhasilan dan kegagalan sebuah pemerintahan;

- f. Kontrol terhadap administrasi pemerintahan.

Fungsi ini terkait dengan peran partai dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan. Peran itu diwujudkan dalam keterlibatan partai menyeleksi sejumlah individu-individu yang akan menempati jabatan politik tertentu yang sudah disepakati;

- g. Memperkuat stabilitas pemerintahan.

Stabilitas pemerintahan secara langsung terkait dengan tingkat kesatuan partai politik. Stabilitas partai membuat stabil pemerintahan, dan stabilitas pemerintahan berhubungan dengan stabilitas demokrasi.

Berdasarkan sederet fungsi partai yang ada, terdapat salah satu fungsi partai yang paling relevan terhadap konteks penelitian ini. Fungsi tersebut yakni fungsi rekrutmen dalam konteks partai sebagai organisasi. Fungsi rekrutmen ini selanjutnya, dapat menjadi instrumen guna menganalisis kegagalan fungsi rekrutmen partai politik dalam mengusung calon Walikota Kota Bandar Lampung, yang kemudian berdampak pada lahirnya partai kartel, sekaligus

akan menjadi fokus analisis penulis dalam menganalisis alasan di balik sikap pragmatis partai politik dalam penyeleksian kepala daerah.

F. Konsepsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah mekanisme memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan (Abu Nashr, 2004:29). Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, maka proses penghitungan suara dimulai. Pemenaangan pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

G. Konsepsi Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010:44).

Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaankedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Jika melihat materi revisi terbatas dari panja komisi II, pilkada serentak yang diamanatkan pada Undang-Undang tersebut dibagi pada berapa gelombang, didalam pasal 201 UU No.1 tahun 2015 disebutkan bahwa:

1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilakukan bulan Desember 2015 untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada tahun 2015 s.d. Juni 2016.
2. Gelombang kedua pemilihan serentak pada bulan Febuari 2017 untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan Juli s.d. Des 2016 dan 2017.
3. Gelombang ketiga pemiihan serentak bulan Juni 2018, untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya 2018 dan 2019.

Selanjutnya pemilihan serentak tahun 2020 adalah untuk hasil pemilihan 2015, pemilihan serentak tahun 2022 untuk hasil pemilihan 2017, pemilihan serentak tahun 2023 untuk hasil pemilihan 2018. Baru pada tahun 2027 Pemilihan serentak secara nasional dilakukan dan tidak ada lagi pilkada yang dilakukan terpisah. Apabila melihat pembagian gelombang atau periode yang diatur didalam revisi tersebut maka untuk tahun 2015 ini propinsi lampung akan dilakukan pilkada serentak 7 atau 8 kabupaten/kota termasuk daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat (Triyadi, 2015).

Oleh sebab itu, dari penjabaran konsepsi di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang juga diselenggarakan oleh negara. Sedangkan pemilihan kepala daerah memiliki esensi sebagai proses penentuan sikap masyarakat daerah dalam memilih pemimpin daerah, sebagai

wujud implikasi dari pelaksanaan azas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

H. Kerangka Pikir

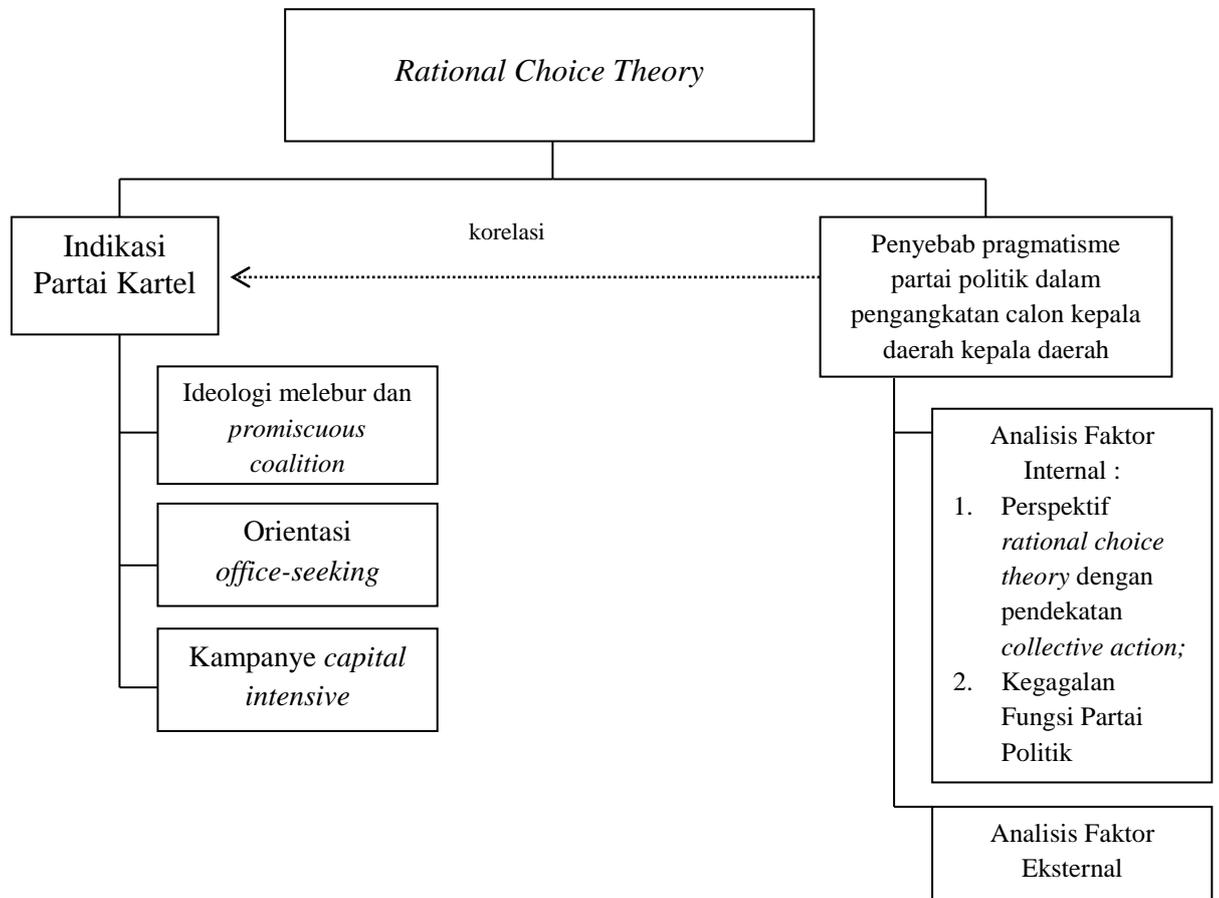
Penjabaran teoritis mulai dari *grand theory* penelitian yakni teori pilihan rasional, identifikasi perkembangan sistem kepartaian di dunia berdasarkan kurun waktu disertai kelebihan dan kekurangannya, hingga idealisasi fungsi partai politik, serta konsepsi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah telah penulis jabarkan secara rinci sebagai bahan pijakan berlandaskan teori pada sub bab sebelumnya. Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan alur pikir secara gamblang dalam bentuk kerangka pikir.

Katz dan Mair (1995) serta Ambardi (2009) menggunakan tiga arena kompetisi politik dalam mengidentifikasi sistem kartelisasi partai di tingkat nasional, yakni arena elektoral, legislatif yang termasuk di dalamnya arena pemerintahan. Namun, pada penelitian ini, penulis hanya akan membatasi analisis sistem kartelisasi pada level elektoral. Sehingga, berdasarkan tinjauan teoritis yang sebelumnya telah penulis paparkan, peneliti akan menggunakan tiga dimensi yang dijadikan sebagai indikator analisis partai kartel pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015. Dimensi tersebut di antaranya (1) dimensi pertama: meleburnya basis ideologi dan perilaku koalisi yang *promiscuous*; dan (2) dimensi kedua yakni orientasi *office-seeking* dalam perekrutan kandiati; serta (3) dimensi ketiga yakni kampanye

yang *media oriented*. Sedangkan guna menganalisis sikap pragmatis partai politik dalam mengangkat calon kandidat kepala daerah, penulis akan menggunakan perspektif teori pilihan rasional dan kegagalan fungsi rekrutmen politik partai. Namun demikian, penulis meyakini bahwa ada keterkaitan yang spesifik antara sikap pragmatis partai politik dalam melakukan pengangkatan Herman HN sebagai kandidat kepala daerah, dengan lahirnya partai kartel dalam kontestasi politik di kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, berdasarkan penjabaran manifestasi sikap pragmatisme dalam praktik politik sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara sikap pragmatis yang dilakukan partai politik terhadap perilaku kartel politik. Sikap pragmatis partai politik yang berakar pada *self interest* mengakibatkan sejumlah distorsi dalam praktik demokrasi, di antaranya lahirnya kartel politik. Sikap pragmatis tersebut diwujudkan dalam aktivitas mengangkat petahana yang mempunyai potensi besar untuk menang, dan tidak berani bersaing dengan mencalonkan kandidat lain.

Akhirnya, melalui proses deskripsi ilmiah tinjauan teoritik, maka penulis dapat menggambarkan skema alur pikir penelitian ke dalam kerangka penelitian secara gamblang, sekaligus memaparkan indikator yang akan dipergunakan, seperti di bawah ini:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Kartelisasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015

III. METODE PENELITIAN

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan alur pikir penulis yang ditinjau dari berbagai pendapat ilmuwan politik guna membangun konsep, serta menemukan indikator. Alur pikir penulis tersebut dimulai dari penjelasan *grand theory* yang digunakan penulis dalam menjawab hasil penelitian, yakni *rational choice theory*. Teori tersebut berkonsekuensi besar atas kelahiran teori yang akan digunakan penulis dalam menjelaskan fenomena kartelisasi partai pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015, yakni teori *cartel party* oleh Katz dan Mair (1995). Selepas itu, penulis telah melakukan pemaparan secara kronologis mengenai perkembangan sistem kepartaian dunia, mulai dari Duverger (1954) hingga Katz dan Mair (1995), juga salah satu bentuk pengembangan teori terbentuknya partai yang teranyar yakni milik Andreas Ufen (2006), dilengkapi dengan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem kepartaian. Kelemahan dan kelebihan tersebut sejatinya telah berimplikasi pada sumbangsih atas lahirnya teori sistem kepartaian terbaru, sebagai potongan kecil dari kajian ontologis ilmu, agar dapat kian tajam dalam menganalisa dinamika interaksi partai politik di berbagai arena.

Pada sub-bab tersebut, penulis akhirnya bisa menemukan indikator yang akan dipergunakan dalam meneliti sistem kartelisasi partai pada pilkada Kota Bandar

Lampung tahun 2015. Selanjutnya, alur pikir penulis dibawa kepada penjelasan idealisasi fungsi partai politik, dan berlanjut kepada konsepsi pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah. Akhirnya, penulis sampai pada skema kerangka pikir penulis, yang digunakan untuk lebih memudahkan penggambaran alur pikir penulis dalam melakukan penelitian. Tiga indikator partai kartel di arena elektoral telah dicantumkan pada skema kerangka pikir. *Grand theory* yang diangkat juga akan menjawab pertanyaan mengenai sikap pragmatisme partai politik dalam melakukan seleksi pencalonan kepala daerah, yang nantinya akan berkorelasi pada terbentuknya partai kartel.

Oleh sebab itu, pada bab ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis sebagai alat penelitian, guna menghasilkan penelitian ilmiah. Pemaparan ini, selanjutnya akan terdiri dari tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian *descriptive-explanatory* dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan penelitian *descriptive* artinya dimulai dengan *well-defined issue or question* dan kemudian mencoba untuk mendeskripsikannya secara akurat. Hasil dari studi kemudian adalah gambaran realistik terhadap situasi yang diteliti secara mendetail guna menjawab rumusan masalah (Neuman, 2014:38-39). Selain pengertian di atas, dalam Fathoni (2011:97), dijelaskan bahwa penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Sedangkan penelitian *explanatory* yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi (Neuman, 2014:40). Terkait konteks penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada refleksi kehadiran sistem kartelisasi partai di level daerah melalui pencalonan Herman HN di Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 dan alasan dibalik sikap pragmatis partai politik dalam rekrutmen elit daerah yang memiliki korelasi dengan kehadiran partai kartel.

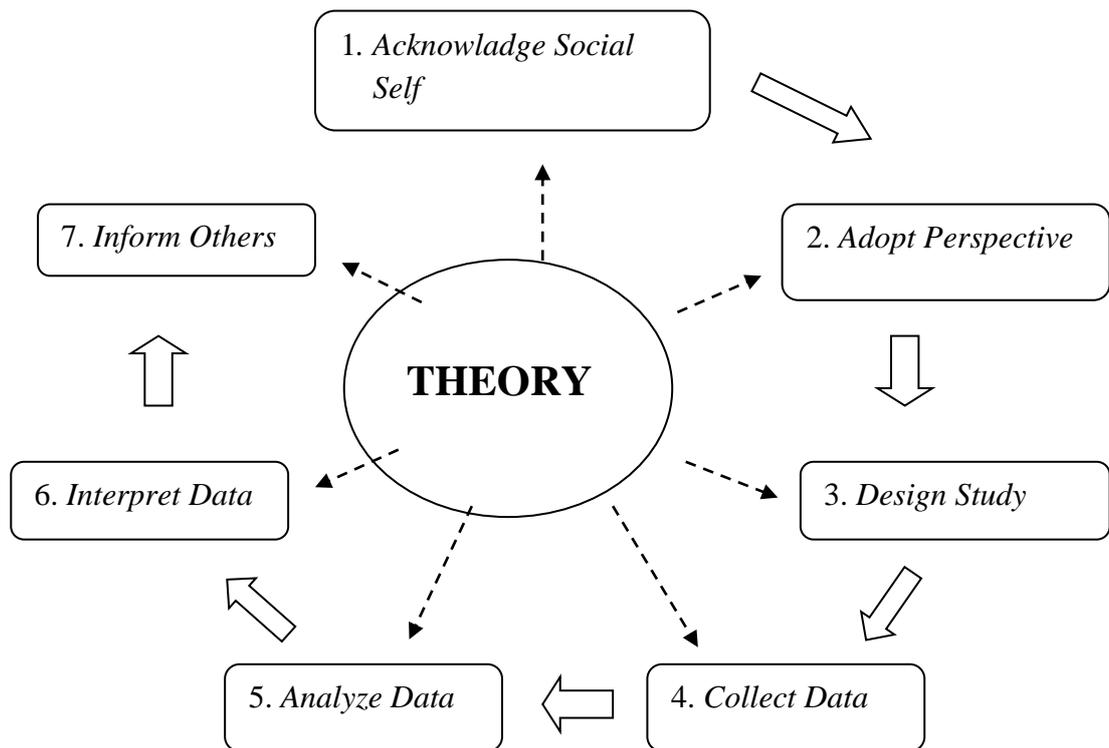
Selanjutnya, penelitian kualitatif dapat diterjemahkan ke dalam pengejawantahan rentetan proses khusus seperti yang dideskripsikan (Neuman, 2014:204-205) sebagai berikut:

“Pada penelitian kualitatif, kita juga merefleksikan pada konsep sebelum mengumpulkan data. Namun, banyak konsep yang kita pergunakan dikembangkan dan difilter selama atau setelah proses pengumpulan data. Kita menguji kembali dan merefleksikan data dan konsep secara simultan dan interaktif. Ketika kita mengumpulkan data, maka secara simultan pula kita merefleksikannya dan men-generalisasinya sebagai sebuah gagasan yang baru. Gagasan baru tersebut menyediakan arah dan menyarankan cara yang baru untuk mengukur. Pada gilirannya, cara baru untuk mengukur tersebut membentuk pertanyaan bagaimana kita mengumpulkan data tambahan. Singkatnya, kita menjembatani gagasan dengan data yang sedang dalam proses interaktif.”

Sehingga, penelitian deskriptif eksplanasi kualitatif dalam penelitian ini dimulai dengan pengusulan penelitian, fokus penelitian, proses, turun lapangan, analisis data, hingga kesimpulan sampai dengan penulisannya yang

tidak menggunakan *numerical measurement* melainkan melalui proses deskripsi data yang interaktif, serta dimaksudkan untuk mendapatkan refleksi berupa deksripsi, keterangan, dan gambaran-gambaran mengenai sistem kartelisasi partai di level lokal (daerah), yakni Kota Bandar Lampung melalui mekanisme pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015, serta menjelaskan alasan di balik tendensi sikap pragmatis partai politik dalam melakukan rekrutmen elit.

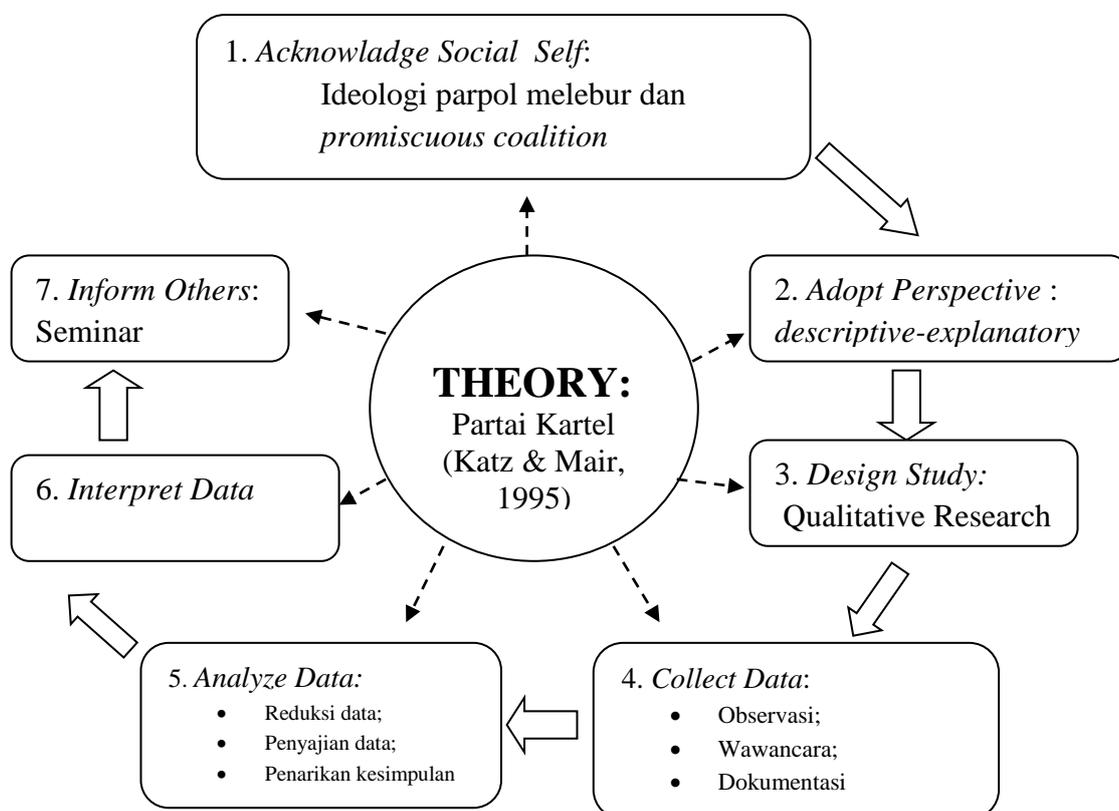
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam proses penelitian kualitatif menurut Lawrence Neuman (2014:21), adalah sebagai berikut:



Sumber: Lawrence Neuman (2014:21)

Gambar 3. Proses Penelitian Kualitatif

Apabila runut proses tersebut diaplikasikan pada penelitian ini, maka proses yang akan terbentuk adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Penelitian Kualitatif yang Diadaptasi Penulis

Alur proses penelitian pada gambar di atas, diilhami dari proses penelitian yang ditulis oleh Neuman (2006). Menurut Neuman (2006:15), terdapat tujuh langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penelitian kualitatif. Pertama, mengetahui inti permasalahan. Pada penelitian ini, inti permasalahan adalah merefleksikan terjadinya fenomena partai kartel di tingkat lokal kota Bandar Lampung, yakni dengan menyatunya sejumlah partai besar dengan ideologi yang berbeda-beda dan mendukung calon

petahana atas asumsi pragmatismenya, melalui mekanisme pilkada serentak 2015. Kedua, mengadopsi perspektif penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif eksplanatif guna mengidentifikasi refleksi sistem kartelisasi partai di tingkat daerah dan menjelaskan mengenai alasan tendensi pragmatis partai politik dalam melakukan rekrutmen elit politik. Ketiga, melakukan desain penelitian, yakni melalui penelitian kualitatif. Keempat, mengumpulkan data penelitian. Data penelitian dalam hal ini dikumpulkan dari observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi guna memperkuat dugaan berdasarkan idealitas teori. Kelima, menganalisis data. Keenam, proses interpretasi data dengan menafsirkan data. Ketujuh, yakni dengan memublikasi hasil penelitian kepada orang lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil akan membantu penulis untuk memahami masalah penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yakni pada bulan Agustus 2015 hingga Februari 2016.

Terkait lokasi penelitian, Herdiansyah (2012:56) menuturkan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses pengambilan data. Kemudian, dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka lokasi yang diambil ditentukan dengan cara sengaja (*purposive*) dan mendasarkan pada masalah-masalah yang terjadi di

lapangan terkait fenomena kartelisasi yang dilakukan partai politik melalui mekanisme pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015.

Lokasi penelitian yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI P Kota Bandar Lampung di Jalan P. Emir M.Noer, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
2. Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bandar Lampung di Jalan Jend. Sudirman, Kecamatan Tanjung Karang Timur;
3. Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bandar Lampung di Jalan Putri Dibalau, Kecamatan Kedamaian;
4. Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bandar Lampung di Jalan Sisingamaraja, Kecamatan Tanjung Karang Barat;
5. Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bandar Lampung di Jalan Beo, Kecamatan Tanjung Karang Timur;
6. Kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Bandar Lampung di Jalan Ridwan Rais, Kecamatan Kedamaian;
7. Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung, di Jl. Teuku Umar, Gang Langgar, Kecamatan Kedaton;
8. Gedung B FISIP, Universitas Lampung.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini, penulis ingin memfokuskan penelitian pada aktivitas mengungkap sistem kartelisasi partai yang terjadi di level lokal yakni di Kota Bandar Lampung, melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015, yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian “Bagaimana refleksi sistem kartelisasi partai pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015?” dan “Mengapa partai politik cenderung memiliki sikap pragmatis dalam pengangkatan calon kepala daerah?”. Adapun objek pada penelitian ini yaitu partai pengusung petahana Herman HN yakni PDIP dan Partai Demokrat, serta partai pendukung yaitu Partai Gerindra, PKS, Partai NasDem, dan PKB, dan petahana Herman HN dalam hal ini diwakili oleh LO (*Liaison Official*) Herman HN

Namun, pada penelitian ini penulis hanya akan membatasi analisis sistem kartelisasi pada level elektoral. Sehingga, berdasarkan tinjauan teoritis yang sebelumnya telah penulis paparkan, penulis akan menggunakan tiga karakter partai kartel yang dijadikan sebagai indikator untuk merefleksikan partai kartel pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015. Indikator tersebut di antaranya (1) meleburnya basis ideologi dan perilaku koalisi yang serba bisa (*promiscuous*); (2) orientasi *office-seeking* dalam perekrutan kandidat, yang berarti upaya partai dalam mengambil pejabat-pejabat strategis negara untuk menjadi bagian dari partai, yang sekaligus merupakan karakter rasional partai pragmatis; serta (3) kampanye yang *capital intensive*, salah satunya yakni kampanye melalui media massa yang lebih besar daripada

frekuensi kampanye langsung bertemu para konstituen. Selanjutnya, guna mengoperasionalkan fokus penelitian, maka indikator tersebut akan diturunkan ke dalam sejumlah sub-indikator, dan kemudian disajikan ke dalam tabel yang akan menjadi kisi-kisi wawancara, sebagai berikut:

Tabel 8. Kisi-Kisi Wawancara

No	Indikator Karakter Sistem Kartelisasi Partai dan Sikap Pragmatis Partai	Sub-Indikator Karakter Sistem Kartelisasi Partai	Sumber Informasi
1.	Meleburnya basis ideologi dan perilaku koalisi yang serba bisa (<i>promiscuous</i>)	Ideologi dan arus perjuangan;	Juru bicara dari partai pengusung dan partai pendukung petahana Herman HN yang paham mengenai profil partai secara menyeluruh dan paham mengenai orientasi koalisi partai, LO (<i>Liaison Official</i>) Herman HN, dan sumber dokumentasi kepartaian
		Arah kebijakan utama partai dalam menentukan program yang akan diserahkan ke publik;	
		Strategi penentuan koalisi partai	
2.	Orientasi <i>office-seeking</i> dalam perekrutan kandiad dan sikap prgamatis partai	Pertimbangan partai dalam melakukan rekrutmen kontestan pilkada	Juru bicara dari partai pengusung dan partai pendukung petahana Herman HN, LO (<i>Liaison Official</i>) Herman HN, dan sumber dokumentasi kepartaian
		Mekanisme partai dalam melakukan penetapan kandidat kontestan pilkada	
3.	Kampanye yang <i>capital intensive</i>	Preferensi kampanye	Juru bicara dari partai pengusung dan partai pendukung petahana Herman HN, LO (<i>Liaison Official</i>)

		Agenda kampanye	Dokumen agenda kampanye, aktivitas kampanye, serta <i>chronological data</i> seperti koran ataupun media massa
Jumlah: 3 indikator dengan 7 sub-indikator			

Sumber : Data diolah oleh penulis (2015)

D. Jenis Data

Menurut Neuman (2014), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sejalan sumber data di atas, oleh Sugiyono (2012:225) dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Penulis akan menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (*in depth interview*), serta observasi langsung oleh penulis. Saat menetapkan informan, penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian. Oleh sebab itu, maka informan dalam penelitian ini adalah juru bicara dari partai pengusung dan partai pendukung petahana Herman HN, LO (*Liaison Officer*) atau tim kampanye atas kandidat yang bersangkutan, serta pengamat politik.

2. Data Sekunder

Karena studi ini bertujuan untuk menyusut *party behavior and interaction* dalam arena elektoral, maka *chronological data* adalah esensial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka data sekunder yang akan digunakan penulis adalah koran ataupun majalah yang secara regular melaporkan aktivitas partai dari waktu ke waktu. Atau apabila terdapat data yang dimiliki masing-masing partai politik maupun pemerintah yang bisa menunjukkan aktivitas harian partai politik, terutama terkait mekanisme pencalonan kepala daerah dari masing-masing partai politik, serta agenda kampanye partai baik langsung maupun melalui media massa. Sedangkan untuk menganalisis ideologi dan program partai, penulis akan memanfaatkan dokumen rencana kampanye dari masing-masing partai pendukung. Dari kombinasi data di atas serta data yang diperoleh dari koran ataupun majalah, maka penulis akan mampu untuk menggunakan data tersebut guna melakukan *mapping ideology* atas seluruh partai yang relevan.

E. Teknik Penentuan Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong, 2014:132). Maka, guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka informan yang akan penulis wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Informan dari Partai Pengusung
 1. Tunas Budi Lukito, selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC-PDIP Kota Bandar Lampung;
 2. M. Reza Aulia, S.H., selaku Wakil Sekretaris DPC-Partai Demokrat Kota Bandar Lampung.
- b. Informan dari Partai Pendukung
 1. Agus Djumadi, A.Md, selaku Sekretaris DPD-PKS Kota Bandar Lampung;
 2. Suryani, S.Sos., M.M., selaku Wakil Ketua 1 Dewan Tanfidz DPC-PKB Bandar Lampung;
 3. Ahmad Riski, S.Sos selaku Sekretaris DPD-Partai Nasdem Kota Bandar Lampung
 4. Nasrullah Nawawi, S.Sos selaku Sekretaris DPC-Partai Gerindra Kota Bandar Lampung.

- c. Rakhmat Husein, selaku LO atau Tim Kampanye dari pasangan calon Herman HN dan Yusuf Kohar;
- d. Dr. Deddy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku pengamat politik atau akademisi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah). Sehingga pada penelitian ini, penulis akan menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Secara umum, Czarniawska (2004:47), mendefinisikan *interview* sebagai, “... *a common enterprise in knowledge production. The practice of research interviewing, however, creates its own complications.*” Pada penelitian kualitatif, wawancara terkadang dapat menimbulkan komplikasi tersendiri yakni menemukan permasalahan baru.

Terkait penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan penulis meliputi wawancara terstruktur (*structured interview*). Melalui wawancara terstruktur, artinya yakni penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) atau wawancara *in depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Sehingga, dalam melakukan wawancara, penulis akan perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi penulis mengumpulkan data melalui dokumen baik yang bentuk tulisan, laporan, hasil rapat, atau karya lainnya. Menurut Czarniawska (2004), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti mencari atau menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian adalah:

- *Chronological data* seperti koran atau majalah, data yang dimiliki pemerintah ataupun masing-masing partai politik yang memberikan gambaran mengenai aktivitas dan kampanye partai politik; Dokumen rencana, agenda, dan program kampanye partai politik;
- Dokumen mekanisme pencalonan kepala daerah dari masing-masing partai politik.

3. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, selain wawancara dan dokumentasi. Menurut Fathoni (2011:104), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai dengan beberapa pencatatan-pencatatan terhadap perilaku objek sasaran. Sedangkan menurut Sukardi (2005:78), observasi adalah cara pengumpulan data yang menggunakan salah satu

panca inderanya yaitu indra pengelihatan. Instrumen observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja informan dalam situasi alami. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi wawancara dari masing-masing informan.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (2006:278) adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data yakni proses di mana penulis melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mencakup kejelasan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

2. Interpretasi data

Interpretasi data yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh. Seperti Neuman (2014:477) menjelaskan teknik analisis data sebagai berikut:

“To analyze data means systematically to organize, integrate, and examine; as we do this, we search for patterns and relationships among the specific details. To analyze, we connect particular data to concepts, advance generalizations, and identify broad trends or themes. Analysis allows us to improve understanding, expand theory, and advance knowledge.”

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:15-20) sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menurut Miles dan Huberman (1992) adalah

“The process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the ‘raw’ data that appear in written-up field notes. Data reduction occurs continuously throughout the life of any qualitatively oriented project. This is part of analysis.”

Moleong (2014) menyebutkan dua tahap dalam reduksi data:

- a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian;
- b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan', agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana (Neuman, 2014). Pada penelitian kualitatif, *data coding* atau pengodean data memegang peranan penting dalam proses analisis data sekaligus menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Kode didefinisikan oleh Saldana (2009:3) berikut ini,

“A code in qualitative inquiry is most often a word or short phrase that symbolically assigns a summative, salient, essence-capturing, and/or evocative attribute for a portion of language-based or visual data.”

Kode dalam penelitian kualitatif, merupakan kata atau frasa pendek yang secara simbolis bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data, baik itu data berbasis bahasa atau data visual. Melalui bahasa yang lebih sederhana, kode adalah kata atau frasa pendek yang memuat esensi dari suatu segmen data. Maka demikian, *coding* atau pengodean dapat diterjemahkan sebagai aktivitas member kode terhadap segmen-segmen data.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Davidson, 2001). Melalui *men-display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Oleh sebab itu, maka akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut (Sugiyono, 2012:249).

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012:252).

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim (moleong, 2007:331) ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu :

- a. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen dan arsip kepartaian mekanisme penjaringan Calon Walikota dan Wakil Walikota, AD/ART Partai, serta Koran.
- b. Triangulasi pengamat yakni adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil keseluruhan hasil aktivitas penelitian, seperti dosen pembimbing penelitian

- c. Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
- d. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat dalam pemenangan petahana Herman HN dalam pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015, serta pihak di luar petahana yang merupakan pengamat politik.

J. Kesimpulan

Melalui pemaparan metode penelitian yang digunakan penulis di atas, maka penulis akhirnya telah mendapatkan instrumen penelitian yang cukup, mendapatkan pemahaman lebih konkrit terkait pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian, membuat skema fokus penelitian yang memadai dan terintegrasi dengan indikator serta sub-indikator yang telah dibangun pada kerangka pikir sebelumnya, hingga pada teknik pengumpulan, pengelolaan, analisis data, juga teknik keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada kajian sebelumnya, penulis telah memaparkan penggambaran dari bentuk kartelisasi politik, baik dari aspek teoritis hingga praktik yang didukung dengan penelitian lebih lanjut dalam lingkup nasional. Kemudian, penulis juga sudah menjabarkan metode serta metodologi yang akan digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini. Sehingga, pada pembahasan ini penulis akan memaparkan gambaran umum obyek penelitian, yakni terkait pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung termasuk para kandidat pilkada, serta objek pada penelitian ini yaitu partai pengusung petahana Herman HN yang terdiri dari PDIP dan Partai Demokrat, serta partai pendukung yaitu PKS, Partai NasDem, PKB, dan Partai Gerindra.

A. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung

Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung dimulai di tahun 2005, di mana telah terjadi dua kali putaran pemilihan. Pertama, yakni tanggal 27 Juni 2005 dan putaran kedua yakni tanggal 6 Agustus 2005. Kondisi ini disebabkan mengingat tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara di atas 25%. Adapun pasangan yang ditandingkan kembali oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu pasangan Drs. Eddy Sutrisno, M. Pd./Kherlani, SE., dan

pasangan KH. Ir. Abdul Hakim, MM dan Drs. Zainal Iskandar yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Drs. Eddy Sutrisno, M. Pd./Kherlani, SE.

Berikut penulis sajikan tabulasi daftar pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005, beserta hasil yang diperoleh pada putaran pertama:

Tabel 9. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2005

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Persentase
1	Sjachrazad dan Rudy Syawal	Partai Golkar	64.991	20,98
2	Nuril Hakim/Zamzani Y	Partai Demokrat	49.344	15,93
3	Haryanti Syafirin/Tarwo	Koalisi Partai B. Lampung Bersatu	16.876	5,54
4	Eddy Sutrisno/Kherlani	PDIP, PBR,PDK, PBB	69.383	22,39
5	Irfan Nuranda/Kuswandi	PPP dan PAN	38.128	12,31
6	Abdul Hakim/Zainal I	PKS	71.100	22,95

Catatan: Jumlah suara sah 309.822; jumlah suara tidak sah 7.956
Sumber: Hadiawan (2009:642)

Pelaksanaan pilkada selanjutnya kedua kali di Kota Bandar Lampung diselenggarakan pada 30 Juni 2010 dengan jumlah total pemilih mencapai 370.031. Peserta pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Adapun calon yang diusung partai-partai tersebut yang ikut dalam pilwakot Kota

Bandar Lampung tanggal 30 Juni adalah sebagai berikut (KPUD Bandar Lampung, 2010 dalam Kaisya, 2012:2):

Tabel 10. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2010

No	Pasangan Calon	Partai Politik yang Mencalonkan
1	Ir. Hi. A. Sauki Shobier, SH dan Syamsul Rizal, SH., M.H.	Calon Perseorangan (<i>Independent</i>)
2	Drs. Hi. Herman HN, M.M. dan Hi. Tobroni Harun, ST., MM	PDIP, PNBK, PBR, PKNU, PK, PBB, PNI MARHAENISME, PIS, PIB, BARNAS, Republikan, PDP, Patriot, Merdeka, PPD, Pakarpangan, PKPI, PPNUI, PSI, Pelopor, Partai Buruh
3	Khaerlani, SE.,M.M. dan Heru Sambodo, S.T.	Golkar, Partai Hanura, PKB, PPRN, PMB, PKDI, PDS
4	Drs. Hi. Eddy Sutrisno, M.Pd dan Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si	Partai Demokrat, PKS, PPP, Partai Gerindra, PAN, PDK, PKPB, PPI
5	Dhommiril Hakim YHS, SH. dan Sugiato, S.Pd	Calon Perseorangan (<i>Independent</i>)
6	Drs. Hi. Nurdiono, SE., MM.Akt dan Ir.Hi. Dian Kurnia Laratte	Calon Perseorangan (<i>Independent</i>)

Sumber: Data Diolah Peneliti (2015)

Pilkada yang diikuti oleh beberapa partai besar seperti Golkar, Partai Demokrat, PKS dan PDIP tersebut ternyata justru dimenangkan oleh pasangan Herman HN dan Tobroni Harun dari koalisi sejumlah partai dengan perolehan suara sebanyak 122.883 (34,35%). Secara lebih lengkap, berikut penulis sajikan tabulasi perolehan suara dari masing-masing kandidat kontestasi politik Kota Bandar Lampung tahun 2010:

Tabel 11. Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2010

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Hi. Herman, HN., MM dan Hi. Tobroni Harun, ST., M.M.	122.883	34,35%
2	Khaerlani, SE.,M.M. dan Heru Sambodo, S.T.	107.133	29,86%
3	Drs. Hi. Eddy Sutrisno, M.Pd dan Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si	104.227	29,05%
4	Drs. Hi. Nurdiono, SE., MM.Akt dan Ir.Hi. Dian Kurnia Laratte	10.026	2,79%
5	Dhommiril Hakim YHS, SH. dan Sugiato, S.Pd	7.904	2,20%
6	Ir. Hi. A. Sauki Shobier, SH dan Syamsul Rizal, SH., M.H.	6.618	1,83%

Sumber: KPUD Bandar Lampung, 2010 dalam Keisya (2012:7)

Lima tahun berlalu, mandatori kepemimpinan pasangan Herman HN dan Tobroni Harun telah dilaksanakan. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 ini, pasangan ini ‘bercerai’ dan memilih untuk mencalonkan diri lagi lewat kubu masing-masing. Walhasil, melalui rapat pleno terbuka tanggal 26 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung, pelaksanaan agenda pengundian dan pengumuman nomor urut calon walikota dan calon wakil walikota dilaksanakan. Rapat pleno terbuka ini sekaligus merupakan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 69 huruf (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil (KPU Kota Bandar Lampung, 2015).

Daftar nama pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Bandar Lampung tahun 2015 beserta nomor urutnya tersebut, telah dipublikasikan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam portal websitenya melalui Surat Pengumuman KPU Nomor 229/KPU-KOTA-008.435.642/VIII/2015 (diakses dari <http://kpu-kotabandarlampung.go.id> pada 24 Oktober 2015 pukul 21.43). Nama pasangan calon walikota dan wakil walikota beserta nomor urut dan koalisi partai politik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota beserta Nomor Urut, dan Koalisi Partai Politiknya

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut	Partai Politik Pengusung dan Pendukung
M. Yunus, S.H. dan Ahmad Muslimin	1	Non partai politik (jalur independen)
Drs. Herman HN, M.M. dan Yusuf Kohar, S.E., M.M.	2	 PDIP,  Partai Demokrat,  PKS,  Partai Gerindra,  PKB, dan  Partai NasDem
Tobroni Harun, S.T., M.M dan Komarunizar, S.Ag	3	 PAN,  HANURA,  Partai Hanura, dan  PKPI

Sumber: Data diolah peneliti (2015)

Pada pengundian yang berlangsung secara dua tahap tersebut, pasangan calon walikota dan wakil walikota Muhammad Yunus-Ahmad Muslimin mendapatkan nomor urut 1. Kemudian untuk petahana Herman HN-Yusuf Kohar mendapatkan nomor urut 2 dan Tobroni Harun-Komaru Nizar mendapatkan nomor urut 3. Selanjutnya nomor urut masing-masing pasangan calon ini ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan Nomor: 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 Tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, tertanggal 26 Agustus 2015 (KPU Kota Bandar Lampung, 2015 diakses dari <http://kpu-kotabandarlampung.go.id> pada 2 Desember 2015 pukul 12.43).

B. Profil Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Pada sub-bab kali ini, penulis akan memberikan gambaran umum deksripsi terkait profil calon walikota dan calon wakil walikota Kota Bandar Lampung, serta visi dan misinya secara singkat. Semua profil pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Bandar Lampung, sudah dipublikasikan dan siap diunduh dalam portal website KPU Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu, diharapkan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung agar dapat meningkatkan partisipasi politiknya dengan menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap siapa calon pemimpin daerahnya. Pada akhirnya, deskripsi profil dan visi misi pasangan calon pada penelitian ini akan berdasarkan pada nomor urut calon walikota dan wakil walikota.

1. Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin

Pasangan Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin merupakan satu-satunya pasangan lewat jalur independen untuk pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015. Dari segi usia, M. Yunus dan Muslimin masih cenderung muda dibandingkan dengan dua pasang calon lain. Pada formulir Model BB.2-KWK yang merupakan form riwayat hidup para calon, tercatat bahwa M. Yunis berusia 36 tahun dan pasangannya berusia 39 tahun. M. Yunus berdomisili di Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian dan Muslimin beralamatkan di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Jika dilihat dari riwayat pendidikannya, M. Yunus merupakan sarjana Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menempuh masa studi lebih kurang tujuh tahun (terhitung dari tahun 1994 hingga tahun 2001). Sedangkan pendidikan terakhir pasangannya, yakni di bangku Sekolah Menengah Ekonomi (SMEA) Surya Dharma. Dari aspek pengalaman pekerjaan, M. Yunus dikenal sebagai aktivis yang menjabat sebagai direktur KoAk (Komunitas Anti Korupsi) Lampung dengan masa bhakti tahun 2010 hingga 2015, sedangkan A. Muslimin dikenal sebagai humas konsultan pada PT. Ragom Gawi Lampung untuk tahun 2010-2015. Berdasarkan aspek pengembangan *soft-skill* melalui pengalaman organisasi, M. Yunus dan A. Muslimin juga menunjukkannya dalam empat dan tiga organisasi yang dijabat beberapa waktu terakhir. M. Yunus misalnya, merupakan pendiri KoAk Lampung di tahun 1999 hingga

sekarang, serta Komunitas Berkas Yakin pada tahun 2002 hingga hari ini. Selain itu, beliau juga menjadi anggota Serikat Pengacara Indonesia tahun 2002-sekarang. Sedangkan pasangannya A. Muslimin, pernah menjabat sebagai Ketua DPD II Papernas Bandar Lampung tahun 2005-2007, ketua DPD SRMI Kota Bandar Lampung tahun 2007-2009, serta sedang menjabat sebagai biro administrasi dan administrasi di DPW PRD Provinsi Lampung sejak tahun 2012.

Setelah mengetahui latar belakang calon independen, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang ingin mereka lakukan untuk Kota Bandar Lampung? Pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya pada penjabaran visi dan misi calon ini. Secara keseluruhan, visi dan misi calon independen ini cenderung sangat singkat dan pemaparannya belum sampai pada tataran teknis. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi pasangan ini adalah “Mewujudkan Kota Bandar Lampung yang layak huni dan menjadi tempat yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga”.

b. Misi

Terdapat delapan pernyataan misi yang diangkat, di antaranya:

- i. Memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh warga Kota Bandar Lampung tanpa diskriminasi;
- ii. Memperluas akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Bandar Lampung tanpa diskriminasi;

- iii. Membangun sarana dan prasarana serta menciptakan produk kebijakan bagi kepentingan seluruh warga Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak;
- iv. Peningkatan keamanan lingkungan dengan basis partisipasi warga;
- v. Membangun budaya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan anti korupsi;
- vi. Membangun ruang publik sebagai medium bagi silaturahmi warga kota dan sebagai sarana bagi ekspresi budaya;
- vii. Membangun infrastruktur perkotaan berdasar kebutuhan warga dan ramah lingkungan;
- viii. Mendorong peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga warga kota berbasis spiritualitas dan keluarga berencana.

2. Herman HN dan Yusuf Kohar

Calon berikutnya adalah calon petahana, yakni Drs. Hi. Herman HN, M.M. yang didampingi Muhammad Yusuf Kohar, S.E.,M.M. Dari segi usia, pasangan ini adalah pasangan tertua dengan usia Herman HN yakni 57 tahun, dan usia Yusuf Kohar adalah 54 tahun. Herman HN berdomisili di Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, sedangkan Yusuf Kohar beralamat di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu.

Jika dilihat dari riwayat pendidikannya, Herman HN memperoleh gelar *doktorandus* dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik

Lampung (STIAL) Bandar Lampung, yang sekarang bertransformasi menjadi Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung. Masa studi calon petahana ini adalah tiga tahun, terhitung dari tahun 1986-1989. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi strata duanya di Universitas Bandar Lampung dan memperoleh gelar Magister Manajemen di tahun 2001.

Sedangkan pendampingnya yang memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf Kohar, SE.,M.M., memiliki jenjang pendidikan tinggi yang cukup bervariasi. Beliau menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Gajayana, Malang dengan masa studi sejak 1986 hingga 1988. Kemudian, Yusuf Kohar melanjutkan studi S2 Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya, Palembang sejak tahun 1994 hingga 1996. Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh pria 54 tahun ini yakni LEMHANNAS RI PPRA (Peserta Pendidikan Reguler Angkatan) XLI selama 9 bulan di LEMHANNAS RI pada tahun 2008. Belum lagi tercatat terdapat sepuluh jalur pendidikan informal baik dalam maupun luar negeri yang ditempuh oleh Yusuf Kohar sejak tahun 2008 dan yang terakhir tercatat di tahun 2011.

Seanjutnya penulis akan menampilkan tabulasi yang berisi pengalaman pekerjaan Herman HN dan Yusuf Kohar. Menurut Pierre Bourdieu (1986) dalam Pantouw (2012), terdapat tiga bentuk modal dalam kontestasi politik yang mempengaruhi pilihan. Modal tersebut antara lain modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Pengalaman pekerjaan dan

jenjang pendidikan merupakan salah satu bentuk modalitas yang mempengaruhi dalam kontestasi politik. Adapun pengalaman pekerjaan Herman HN dan Yusuf Kohar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Pengalaman Pekerjaan Herman HN

Jabatan	Institusi	Tahun
Staff Biro Keuangan	Biro Keuangan Pemda Provinsi Lampung	1977
Kasubbag, Pembinaan Bendaharawan Bagian Perbendaharaan	Biro Keuangan Pemda Provinsi Lampung	1991-1994
Kasubbag, Anggaran Rutin Bagian Anggaran	Biro Keuangan Pemda Provinsi Lampung	1994-1998
Kasubbag Pengesahan ADB	Biro Keuangan Pemda Provinsi Lampung	1998
Kepaa Bagian ADB	Biro Keuangan Pemda Provinsi Lampung	1998
Kepala Bagian Pemegang Kasda	Biro Keuangan Pemda Provinsi Lampung	2001-2004
Kepala Biro Keuangan	Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2004-2008
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2008-2009
Kepala Biro Keuangan	Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2009
Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2009-2010
Walikota Bandar Lampung	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2010-2015

Sumber: Form Model BB.2-KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota Bandar Lampung

Tabel 14. Pengalaman Pekerjaan Yusuf Kohar

Jabatan	Institusi	Tahun
Petugas Lapangan Penghijauan (PLP)	Departemen Kehutanan Palembang dan Bengkulu	1981-1986
Karyawan	PT. Waras Sakti Agung (Kontraktor) Palembang	1988-1989
Manager Marketing	PT. Samudra Indonesia (Pelayaran) Palembang	1989-1996
Kepala Cabang	PT. Bintika Bangunusa (Pelayaran) Lampung	1996-1997
Pimpinan	PT. Indokom Citrapersada (Eksportir Kopi) Lampung	1997-2014
Dosen Tetap dan Ketua Jurusan Akuntansi dan Ketua STIE Lampung	STIE Lampung	1999-2010
Dosen Luar Biasa (LB) D3 dan S1 Reguler FISIP dan D3 Proyek dan Bisnis FE Unila	Universitas Lampung	2000-2004
Wirausaha	Dagang	2014-sekarang

Sumber: Form Model BB.2-KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Walikota Bandar Lampung

Jika dilihat dari latar belakang profesi, maka dapat terlihat bahwa Herman HN memiliki latar belakang profesi sebagai seorang birokrasi senior. Sedangkan Yusuf Kohar memiliki latar belakang sebagai seorang wirausahawan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa kombinasi latar belakang profesi pasangan ini, semakin bisa memperkuat posisi mereka dalam kontestasi pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015.

Selain pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi juga menjadi poin penting terkait modalitas politik. Herman HN memiliki sederet pengalaman organisasi, mulai dari organisasi di kalangan birokrat, hingga pengurus organisasi di bidang olahraga dan kesenian tradisional. Sedangkan Yusuf Kohar memiliki sederet latar belakang organisasi di

bidang olahraga, kemasyarakatan, pertahanan nasional, politik, dan wirausaha. Terakhir, tercatat bahwa beliau menjadi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung untuk dua periode, yakni 2002-2005 dan 2010-2015, serta Ketu DPP APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Lampung sejak tahun 2003 hingga sekarang.

Selanjutnya, pasangan calon yang didukung enam partai politik besar ini telah menjabarkan visi dan misi, lengkap dengan tujuan dan sasaran, berikut indikator kinerjanya dalam form khusus. Berikut penulis sajikan visi dan misi pasangan calon dengan nomor urut dua ini, sebagai berikut:

a. Visi

Visi yang digagas pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar adalah “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

b. Misi

Misi pasangan dengan slogan “Herman Yuk” ini adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- ii. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
- iii. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
- iv. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- v. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah;
- vi. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

3. Tobroni Harun dan Komarunizar

Pasangan calon terakhir untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yakni pasangan H. Tobroni Harun, ST., M.M. dan Komarunizar, S.Ag. Tobroni Harun saat ini tercatat berusia 50 tahun, sedangkan Komarunizar tercatat berusia 44 tahun. Domisili calon walikota dengan nomor urut tiga ini bertempat di Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura. Sedangkan calon wakil walikotanya bertempat tinggal di Kelurahan Gulak-Galik, Bandar Lampung.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Tobroni Harun menempuh jenjang strata 1 di STTN (Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir) di tahun 2006 dan pendidikan magister manajemen di Universitas Bandar Lampung tahun 2008. Sedangkan Komarunizar menempuh pendidikan strata 1 di IAIN Raden Intan pada tahun 1990 hingga 1995.

Selanjutnya, baik pengalaman pekerjaan maupun pengalaman organisasi, Tobroni Harun tercatat lebih sedikit dibandingkan wakinnya. Pada form Model BB.2-KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota,

pengalaman pekerjaannya hanya satu yakni sebagai wakil walikota Bandar Lampung tahun 2010. Pengalaman organisasinya pun cenderung minim, namun semuanya menduduki jabatan sebagai ketua. Bidang organisasi yang digeluti di antaranya IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Kota Bandar Lampung, BNK (Badan Narkotika Kota), serta ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung di tahun 2010.

Berbeda dari calon walikota, Komarunizar tampak hadir melengkapi dengan pengalamannya yang lebih banyak baik di bidang pekerjaan maupun organisasi. Profesinya cenderung bergerak di bidang akademik, serta organisasi yang digeluti banyak merupakan ormas Islam. Terakhir, Komarunizar tercatat sebagai Ketua PC NU (Nahdatul Ulama) Kota Bandar Lampung. Berikut adalah latar belakang pekerjaan dan organisasi dari Komarunizar:

Tabel 15. Pengalaman Pekerjaan Komarunizar

Jabatan	Institusi	Tahun
Asisten Dosen	IAIN Raden Intan	1994
Guru Materi Rohis	SMA Al-Kautsar	1997
Staf Pengajar	LPGTK Tadika Putri	1998
Direktur	CV. Sumber Way Semangka	2004
Dirkektur	CV. Artha Ghara Perkasa	2005
Bidang Admin	LPPra Sekolah Putri Mandiri	2000
Staff Pengajar	LPPTKB Mitra Persada	2013-sekarang

Sumber: Form Model BB.2-KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota Bandar Lampung

Tabel 16. Pengalaman Organisasi Komarunizar

Jabatan	Institusi	Tahun
Sekretaris	PAC PKB Kec. Teluk Betung Utara	1999
Ketua Garda Bangsa	Pemuda PKB Kota Bandar Lampung	2000
Wakil Ketua	Laskar Merah Putih Provinsi Lampung	2012
Wakil Sekretaris	Front Pembela Merah Putih Kota Bandar Lampung	2011
Ketua NU	PC NU Kota Bandar Lampung	2013-sekarang

Sumber: Form Model BB.2-KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota Bandar Lampung

Terlepas dari latar belakang profesi dan organisasi, pasangan dengan nomor urut tiga ini telah menyusun rangkaian visi dan misinya untuk membangun Kota Bandar Lampung apabila terpilih. Berikut penulis sajikan penjabaran singkat visi dan misi Tobroni Harun dan Komarunizar:

a. Visi

Visi yang digagas pasangan ini adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Bandar Lampung yang Religius, Metropolis, Unggul, Maju, Aman dan Sejahtera”. Selain itu, kata “Religius” di atas merupakan akronim dari Ragam, Elok, Lingkungan, Iman, Global, Intelligen/Cerdas, Unggul, Sejahtera.

b. Misi

Misi yang disusun pasangan calon ini cenderung lengkap. Sebab penjabarannya cukup komprehensif dengan tujuan, sasaran, indikator, strategi kebijakan, serta program prioritas. Misi tersebut dirangkum ke dalam tujuh poin utama, sebagai berikut:

- i. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan, seni, dan budaya serta kesejahteraan sosial masyarakat;
- ii. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan, fasilitas permukiman dan transportasi secara selaras, serasi, dan seimbang;
- iii. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, dan berdaya saing global;
- iv. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis industry, perdagangan, dan jasa;
- v. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
- vi. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketertiban, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat;
- vii. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Guna melengkapi pemahaman penulis dan pembaca pada umumnya, maka penulis merangkum latar belakang ketiga kontestan pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 tersebut ke dalam satu tabel yang mencakup latar belakang pendidikan dan organisasi dari masing-masing calon, sebagai berikut:

C. Gambaran Umum Partai Pengusung dan Partai Pendukung Petahana

Pada konteks ini, terdapat pemisahan teoritis antara partai pengusung dan partai pendukung. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 40 (1), bahwa partai pengusung adalah partai yang bisa mengusulkan pasangan calon dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Sedangkan makna partai pendukung tidak dijelaskan secara konseptual dan eksplisit, namun dapat dimaknai sebagai partai atau gabungan partai yang mendukung kontestan pemilihan umum.

Adapun pada deskripsi obyek penelitian kali ini, penulis akan membagi partai berdasarkan penggolongan partai pengusung dan partai pendukung petahana Herman HN beserta ideologinya. Ideologi dalam sebuah partai politik merupakan hal wajib, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang sifatnya formal dan ideal tentang banyak hal. Menurut Prasetya (2011:35) ideologi partai adalah sebagai berikut:

“Ideologi partai akan memerjelas bentuk dari sebuah partai politik dalam memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu dilakukan, dan lain sebagainya. Dengan dasar ideologi lah partai itu akan bergerak

melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.”

Oleh sebab itu, melihat korelasi yang kuat terkait ideologi partai dan pembahasan sistem kartelisasi partai politik dalam konteks penelitian, berikut penulis sajikan gambaran umum objek penelitian kedua partai tersebut terkait ideologi yang dianut oleh masing-masing partai:

1. Partai Pengusung Petahana

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : Partai Nasionalis-Marhaenis

Berdasarkan yang tertuang pada AD/ART PDI Perjuangan No.9/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2015, Pasa 5 Ayat 1, PDI Perjuangan menyatakan ideologi yang dianut yakni “Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945”.

Masih dalam anggaran dasar partai, PDI Perjuangan juga menyantumkan jati diri partai berupa “Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial” yang memperkuat posisinya sebagai kelanjutan partai Nasionalis-Marhaenisme (Pasal 5 ayat 2 AD PDI-P). Selain itu, materi kaderisasi anggota partai yang dicantumkan pada Pasal 83 ayat (2) ART PDIP, terdiri dari lima pengajaran khusus ideoloi yang bersifat pendukung. Salah satu di antaranya

yakni Marhenisme sebagai teori perjuangan tahun 1965. Sehingga, tak heran bahwa PDIP kerap kali dikatakan sebagai partai warisan Nasionalis-Marhaenisme. Sukarno (2014), Marhaenisme diterjemahkan sebagai cara dan asas perjuangan yang menghendaki hilangnya setiap kapitalisme dan imperialisme. Perjuangan Marhaenisme adalah perjuangan mewujudkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

b. Partai Demokrat (PD): Partai Nasionalis-Religius

Berdasarkan AD/ART Partai yang bersumber dari Keputusan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Nomor 5/KLB/PD/III/2013 Bab I Pasal 3, ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis-religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memerhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

2. Partai Pendukung Petahana

a. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Partai Dakwah Islamis

Berdasarkan AD/ART Perubahan Hasil Majelis Syuro (MS) ke-VII Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bab 1 Pasal 2 Ayat 1, Partai Keadilan Sejahtera dijelaskan sebagai partai yang berasaskan Islam,

dilanjutkan dengan Ayat 2 yang berbunyi, partai bercirikan bersih, peduli, dan profesional.

Namun pada kenyataannya, PKS cenderung jarang menggunakan wacana penerapan syari'at Islam dalam arus perjuangannya. Berdasarkan hemat penulis, jika bicara konteks kontestasi antar partai politik, arus perjuangan PKS banyak mengarah pada nasionalisme yang diharapkan dapat bersaing dengan partai Nasionalis lainnya. Sehingga, diharapkan dapat memperoleh tambahan suara yang banyak.

Selain itu, PKS juga menjadi partai terbuka dengan mengharapkan dapat tambahan suara dari golongan di luar Islamis, seperti Nasionalis dan non-Muslim, juga dari massa mengambang (*floating mass*, atau juga dikenal dengan istilah *swing voters*). Hal ini disetujui oleh Sekretaris DPD PKS Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, A.Md. Beliau justru mengistilahkan partainya sebagai penarik suara *swing voters* dari berbagai kalangan sebagai salah satu strategi penarikan suara pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 (hasil wawancara penulis pada 18 November 2015).

b. Partai Nasional Demokrat (Nasdem): Partai Nasionalis “Restorasi”

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasional Demokrat Pasal 2, maka disebutkan partai Nasional Demokrat adalah partai Nasionalis yang resminya berideologi “*Pancasila*” (Pasal 2 AD NasDem).

Partai Nasdem merupakan salah satu partai di tanah air yang menggunakan “Pancasila” secara resmi sebagai ideologi. Penulis menganalisis bahwa ini dapat diperdebatkan. Penggunaan “Pancasila” sebagai ideologi merupakan dampak dari sisa-sisa masa Orde Baru yang kala itu yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Namun terlepas dari diskursus tersebut, Partai Nasdem nampak mencoba mengulangi langkah Soekarno dulu dengan mengusung konsep Restorasi Indonesia, yang pada era Soekarno dikenal sebagai Revolusi Indonesia. Tokoh sentral partai ini, yakni Surya Paloh, juga memiliki kemampuan orasi dan retorika yang lebih baik dari semua tokoh sentral yang dimiliki partai lain.

c. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Partai Nasionalis Agamis

PKB adalah partai Nasionalis dengan basis massa warga Nahdliyin. Meskipun berbasis massa ormas Islam terbesar, ternyata pergerakan PKB bukan berlandaskan Islam, melainkan atas dasar ikatan

jaringan warga Nahdliyin dengan kemasan nasionalisme. Secara resmi, PKB berasaskan lima hal, yaitu

“Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Pasal 3 AD PKB).

Akan tetapi perlu digaris bawahi, meski kelima asas tersebut sama persis dengan isi Pancasila, tetap tidak bisa disebut berasas Pancasila, karena dalam anggaran dasarnya tidak pernah disebut secara tegas berasas Pancasila. PKB punya sifat terbuka meski berbasis massa Nahdliyin, maka turut diminati juga oleh golongan selain Nahdliyin bahkan lintas agama.

Penulis berpendapat bahwa, untuk sebuah partai yang berbasis massa Islam, dalam aktifitas politiknya PKB terlihat lebih pragmatis dan liberal. Tokoh-tokohnya pun merupakan warga Nahdliyin yang giat mempromosikan nilai-nilai liberal seperti pluralisme, multikulturalisme, sekularisasi negara, feminisme, HAM, dan paham-paham liberal lainnya. Sebut saja mantan Presiden Aburrahman Wahid yang banyak memperjuangkan hak-hak asasi manusia, mengembangkan pluralism, dan memperkuat demokrasi (BBC Indonesia, edisi 2 Januari 2010 dalam <http://bbc.com/indonesia> diakses pada 2 Desember 2015 pukul 12.01). Maka tak heran, meski PKB beranggotakan lintas agama,

tetap saja tokoh-tokohnya merupakan tokoh dari berbagai agama namun berpaham liberalisme.

d. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra): Partai Nasionalis-Pancasilais

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Gerindra tahun 2012 Pasal 5, disebutkan secara resmi dan jelas bahwa Partai Gerindra adalah partai rakyat yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sama halnya dengan Partai Nasdem, Partai Gerindra juga menggunakan Pancasila, namun dengan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai azaznya. Namun yang menjadi pembeda adalah, karakter yang dibawakan oleh tokoh sentral partai. Publik sudah mengetahui bahwa tokoh sentral Partai Gerindra adalah bekas militer dari kalangan Kopassus, yang notabene juga merupakan bagian dari *entitas* yang pernah berkuasa pada orde sebelumnya. Sehingga, partai terlihat sangat bergantung dengan tokoh sentralnya.

D. Analisis Ideologi Partai Pendukung dan Partai Pengusung Herman HN

Berdasarkan pemaparan di atas, kita kemudian dapat melihat bahwa sejumlah partai menganut ideologi Pancasila sebagai asasnya, seperti Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan PKB. Pada konteks ini, partai mungkin bisa ‘berterima-

kasih' kepada era orde baru yang menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal. Bouchier dan Hadiz (2003:14), menyatakan bahwa Pancasila dijadikan Soekarno pada tahun 1945 sebagai sebuah formula untuk mempersatukan bangsa yang terpecah menjadi tiga entitas besar, yakni nasionalis, Islamis, dan sosialis komunis. Sedangkan oleh Soeharto, Pancasila diinvestasikan sebagai 'status yang hampir keramat' sebagai ideologi era Orde Baru.

“Invented by Soekarno in 1945 as a formula to unite the new nation. Pancasila was invested with almost sacred status by the ideologues of the New Order. Soeharto himself became increasingly obsessed with the Pancasila, and in the early 1980s pushed it as their ‘azas tunggal’ or sole foundation.....when his ‘azas tunggal’ policy became law in 1985, Soeharto saw it as a great, even an epoch-making, achievement of his administration. Uniting all political forces under the Pancasila, he believed, enabled Indonesia to put behind it the ideological and religious conflict that had torn at its fabric in the past”.

Azas tunggal yang digemakan era Soeharto kemudian menjadi sebuah warisan dari meleburnya tiga kelompok ideologi pada masa kemerdekaan, yakni Nasionalis, Islamis, dan Sosialisme ke dalam satu ideologi yakni Pancasila. Pancasila sebagai Hal ini akhirnya menjadikan banyak organisasi termasuk partai politik yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi atau azas yang dianut.

Begitu halnya dengan organisasi Islam, termasuk dengan Partai Islam. Era orde baru telah merubah ‘*God-given’ Islamic principles*’ menjadi *Islamic principles to the ‘man-made’ Pancasila* yang berlanjut hingga hari ini. Pada masa itu, tindakan ini mendapat protes keras dari kelompok Islam di akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an. Mereka kecewa ketika mengetahui

pemerintah melakukan kampanye besar untuk mengindoktrinasi masyarakat Indonesia dengan ideologi negara Pancasila (Bourchier dan Hadiz, 2003:14)

Penulis menganalisis bahwa, warisan ini pada akhirnya menjadi alat untuk memudahkan partai politik untuk ‘menasionalisasikan’ dirinya dengan nasionalisme dangkal, dengan tujuan untuk memudahkan posisinya agar mendapat suara yang banyak dari berbagai kalangan. Terbukti sejumlah partai menyatakan dirinya ‘terbuka’ bagi setiap pihak yang mau bergabung bersama partainya, apapun latar belakangnya selama memiliki visi misi *klise* yang sama yakni membangun Indonesia (berdasarkan hasil wawancara penulis kepada enam partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda pada tanggal 17 November hingga 2 Desember 2015).

Selanjutnya, terkait definisi kerja ‘nasionalisme’ juga masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan politik dan sosiologi. Sebuah jurnal dari University of Leeds karya San Martin (2012:1), menyatakan bahwa klasifikasi nasionalisme sebagai sebuah ideologi masih menjadi “*a matter of some confusion*” dalam studi ilmu politik. Menurunnya, nasionalisme hari ini telah diinvestigasi oleh pakar sejarah dan *sociologist* dan cenderung mengarahkan nasionalisme sebagai *socio-political movement* daripada sebuah ideologi. Selain San Martin, Michael Freeden, seorang professor ilmu politik di University of Nottingham misalnya (dalam San Martin, 2012:2), menerjemahkan nasionalisme sebagai ideologi tengah yang ‘tipis’, dan ia menolak Nasionalisme sama mapannya dengan ideologi lain seperti liberalism ataupun sosialisme. Menurutnya,

nasionalisme gagal untuk dipertemukan dengan kriteria sebuah ideologi yang komprehensif. Struktur konspetualnya tidak mampu untuk menyediakan solusi atas dirinya sendiri atas sejumlah persoalan, di antaranya keadilan sosial, distribusi sumber daya, serta manajemen konflik seperti yang banyak dialamatkan oleh ideologi lain.

Namun, Anthony Smith (2003) memiliki pandangan lain. Smith (2003) merumuskan nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan memertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial (Smith, 2003:11). Senada dengan Smith, Ernest Gellner memakai nasionalisme sebagai 'ideologi politik dan kebudayaan modernitas' (Gellner, 1996).

Akhirnya, dalam konteks kartelisasi partai, ideologi Nasionalisme partai ini kerap kali dijadikan candu bagi partai untuk melakukan kartel. Penggabungan banyak partai dengan tidak mengedepankan ideologi dengan asumsi sentimen nasionalisme, dan disertai keuntungan politis dan finansial dari salah satu kandidat politik, kerap kali membuat partai enggan bersaing untuk merebutkan porsi kekuasaan. Pada konteks penelitian, partel kartel teridentifikasi melalui mekanisme pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 ini.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan dua buah kesimpulan, di antaranya:

1. Telah ditemukan indikasi kartel politik yang dilakukan oleh partai politik pengusung dan pendukung petahana Herman HN, maupun petahana sendiri. Kartel politik yang diciptakan terjadi dalam beberapa wujud, di antaranya:
 - a. Meleburnya basis ideologi partai dan koalisi serba bisa, yang salah satunya diakibatkan karena rendahnya penghayatan dan pemahaman partai terhadap nilai-nilai *platform* partai. Koalisi enam partai dengan ideologi berbeda ini merupakan pilihan paling rasional yang dilakukan baik partai politik maupun petahana Herman HN;
 - b. Pertimbangan orientasi *office-seeking* dalam merekrut kandidat kontestan politik. Modus *office-seeking* dalam konteks ini adalah “keberpihakan” partai kartel yang tinggi pada calon-calon dari kalangan pemerintah (birokrasi), maupun mereka yang memiliki potensi kemenangan maksimal dilihat dari hasil survei elektabilitas dan popularitas;

- c. Kampanye yang *capital intensive* adalah ciri khas partai kartel. Namun, PKPU Nomor 7 Tahun 2015 telah membatasi kampanye-kampanye mahal dan tidak mendidik. Sehingga, kampanye padat modal yang biasanya menggunakan media tidak dilakukan oleh partai politik. Kendati demikian, partai masih memiliki peluang kampanye melalui *new campaign technology* berupa hasil survei yang juga mahal harganya.
1. Sikap pragmatis partai politik dalam mengangkat dalam pengangkatan calon kepala daerah disebabkan karena dua hal:
- a. Analisis internal: aplikasi pilihan rasional dari aspek pendekatan *collective action* dan kegagalan fungsi partai politik.
- Sikap pragmatisme partai didukung atas keengganan partai untuk mengambil resiko, namun ingin memaksimalkan potensi kemenangan. Selain itu, gabungan partai politik yang mendukung petahana “sekuat” Herman HN, sejatinya tidak bekerja dengan keras untuk memenangkan kandidat. Hal ini disebabkan Herman HN sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Bandar Lampung. Sehingga, sekecil apapun kontribusi partai di dalam koalisi, masing-masing partai akan tetap mendapatkan distribusi manfaat yang sama besar. Inilah yang dikenal sebagai *free-rider* dalam istilah *collective-action theory*. Selain itu, partai juga mengalami kegagalan dalam fungsi rekrutmen dan *training elites*.

- b. Analisis eksternal: pragmatisme masyarakat dan produk hukum.

Selain karena pilihan rasional, pragmatisme yang tumbuh dalam diri masyarakat Bandar Lampung yang modern mengakibatkan bagi masyarakat yang terpenting adalah bukti praktis, bukti nyata dari pembangunan yang dapat menyelesaikan permasalahan publik. PKPU Nomor 7 Tahun 2015 juga menjadi instrumen yang bias petahana dari aspek kampanye.

B. Saran

Penelitian ini menghasilkan sejumlah saran, di antaranya:

1. Memangkas kartel politik yang dilakukan oleh partai, artinya harus memotong sikap pragmatis partai yang enggan bersaing dan hanya mengandalkan calon dengan potensi kemenangan tertinggi. Partai politik mengeliminasi hakikat partai politik, yakni sebagai organisasi yang menempatkan kadernya ke dalam pemerintahan. Sehingga, penulis menyarankan bahwa mekanisme survey popularitas dan elektabilitas kandidat haruslah dihapuskan. Partai politik sebaiknya fokus mempromosikan kader terbaiknya untuk maju ke dalam kontestasi pilkada.
2. Guna menciptakan iklim demokrasi yang kompetitif, maka penulis menyarankan pemerintah perlu memberikan pengaturan terkait laporan akuntabilitas yang akuntabel dan transparan tentang penggunaan subsidi partai politik yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Subsidi tersebut seharusnya dipergunakan semata-mata untuk perbaikan kualitas kader partai. Hal ini diharapkan agar

tidak ada lagi kebingungan rekrutmen kandidat politik ketika pilkada dan orientasi *office seeking* yang dimiliki oleh partai kartel.

Penulis mengharapkan, jika disertai dengan aturan yang memadai, dan akuntabilitas yang luar biasa baik, maka praktik kartel di Kota Bandar Lampung dan pragmatisme partai akan luluh sedikit demi sedikit. Karena seyogyanya, penguatan ideologi dan kepemilikan kader yang memiliki daya saing, akan menciptakan iklim kompetitif antar partai ketika pemilihan umum dilakukan, dan dapat mencegah membesarnya praktek politik kartel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Najib, 2004, *Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika*
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad, 2004, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Jakarta, Prisma Media
- Ambardhi, Kuskridho, 2009, *Mengungkap Politik Kartel: Sistem. Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Ambardhi, Kuskridho, 2008, *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*, USA: The Ohio State University, (dissertation)
- Barry, B, 1970, *Sociologist, Economist, and Democracy*, London : Collier-Macmillan
- Basir, Achmad, 2014, *Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Biezen, Ingrid. Van, 2003a, *Financing Political Parties and Election Campaigns*, Starsbourg: Council of Europe
- Blondel, Jean, 1966, *Type of Party System*, From Peter Mair (ed.) *The West European Party System* (Oxford: Oxford University Press, 1990), pp. 302-310
- Bolx, Charles, 2010, *the Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford University Press, New York
- Bourchier, David, Vedi R. Hadiz, 2003, *Indonesian Politics and Society: A Reader*, Routledge, London and New York
- Bowler, Shaun. 2000. "Parties in Legislatures: Two Competing Explanations," in Russel Dalton and Martin Wattenberg (eds) *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*. Oxford: Oxford University Press.

- Copleston, Frederick, 1966, *A History Philosophy*, London: Burns and Dates Ltd.
- Czarniawska, Barbara, 2004, *Narratives in Social Research*, The Central Asia Business Journal, Vol.2 (1), pp. 29-36, SAGE Publications, London
- Dahl, Robert, 1966, *Political Oppositions in Western Democracies*, Yale University Press
- Dahl, Robert, 1966, "Patterns of Opposition," in Robert Dahl (ed) *Political Oppositions in Western Democracies.*" Yale University Press: New Heaven
- Davidson, A.L., 2001, *Grounded Theory*, Page Wise Inc. 2001
- Downs, Anthony, 1957, *An Economic Theory of Democracy*, Harper and Row, New York
- Dunleavy, Patrick, 1991, *Democracy, Bureaucracy and Public Choice*. London: Harvester Wheatsheaf
- Duverger, Maurice, 1954, *Political Parties : Their Organization and Activities in the Modern State*, Methuen & Co Ltd
- Dwipayana, Ari, 2010, *Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM Vol 07
- Eruce, Kucklick, 1979, *The Rice of American Philosophy*, New York: Yale University Press
- Fathoni, Abdurrahmat, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Friedrich, J. Carl, 1967, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham: Blaisdell Publishing Company
- Gallner, Ernest, 1996, *Do Nation Have Navels?*
- Gale, Bruce, 2012, *Handle Political Surveys in Indonesia with Care*, The Straits Times, Singapore
- Gordon, Sanford C., and Dimitri Landa. 2010, *Do The Advanteges of Incumbency, Advantage Incumbent?*, SSRN Working Paper Series
- Hadiawan, Agus, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 3, No.7, Juli-Desember 2009

- Hershey, Marjorie Randon, 2006, *Political Parties as Mechanism of Social Science*, dalam Richard Katz dan William Crotty (ed), *Handbook of Party Politics*, SAGE Publication
- Hopkin, J, 2004, *The Problem with Party Finance, Theoretical Perspectives on the Funding of Political Parties*, the Journal of Politics, Vol. 10 No.6, pp. 51-627
- Imawan, Riswanda, 2004, *Partai Politik di Indonesia, Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri* . Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UGM
- Inglehart, Ronald and Scott C. Flanagan, 1987, *Value Change in Industrial Societies*, The American Political Science Review, Vol. 81, Issue 4 Des. 1987
- Iskandar, Dian, 2013, *Petahana Dan Kekalahan : Kekalahan Petahana Bupati Kabupaten Solok dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode 2010-2015*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Thesis)
- Kaisya, Al Dias, 2012, *Faktor-Faktor Penyebab Kekalahan Incumbent Edy Sutrisno Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2010*, Thesis Universitas Lampung
- Kamawura, Koichi, 2013, *Presidentialism and Political Parties in Indonesia: Why Are All Parties Not Presidentialized?*, IDE Discussion Paper No. 409
- Katz, Richard. S, Peter Mair, 1995, *Changing Model of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*, Sage Publication, The Journal of Politics, Vol. 1, No. 1, pp. 5-28
- Katz, Richard. S, Peter Mair, 2009, *The Cartel Party Thesis : Restatement*, Working Paper Vol. 7/No. 4
- Key, V.O. Jr. 1964, *Politics, Parties, and Pressure Groups*, 5thed, New York
- Kucklik, Eruce, 1979, *The Rise of American Philosophy*, New York: Yale University Press
- Koole, Ruud, 1996, *Cadre, Catch All or Cartel?: A Comment on the Notion of the Cartel Party*, SAGE Publications, London
- KPU, 2012, *Modul untuk Pemilih Pemula 1*
- Lipset, Seymour Martin and Stein Rokkan, 1967, *Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments*, in Peter Mair (ed.) *The West European Party System* (Oxford: Oxford University Press, 1990), pp. 91-111.

- Linz, Juan J. 1994, *Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?* dalam *The Failure of Presidential Democracy*, eds. Juan J Linz and Arturo Valenzuela. Baltimore, MA: Johns Hopkins University Press, p. 3–87
- Mahadi, Helmi, 2011, *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP pada Pilkada, Kabupaten Sleman*, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2 Nomor 1, Februari 2011
- Marsh, David dan Gerry Stoker, 2010, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Palgrave Macmillan, USA
- Mair, Peter, 1994, *Party Organizations: From Civil Society to the State*, in Richard S. Katz dan Peter Mair (eds) *How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*, Sage Publication, London
- Mair, Peter, 2002, *Party System Change: Approaches and Interpretations*, Clarendon Press, Oxford
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press Jakarta
- Muller, Wolfgang and Kaare Strom, 1999. *Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe make Hard Decisions*, Cambridge University Press, New York
- Moleong, J. Lexy, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Reevisi*, PT Remaja Rosdakarya Offset : Bandung
- Montuori, Craig, 2010, *What is Political Pragmatism?*
- Neuman, Lawrence, 2014, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, Pearson New International Edition, England
- Newton, Kenneth, & Van Deth, 2010, *Foundation of Comparative Politics: Democracies of the Modern World*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Norris, Pippa, 2006, *Recruitment*, dalam Richard Katz dan William Crotty (ed), *Handbook of Party Politics*, SAGE Publication
- Olson, M., 1978, *The Logic of Collective Actions: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press
- Pamungkas, Sigit, 2011, *Partai Politik*, Institute For Democracy And Welfarism, Yogyakarta
- Pantouw, Stella, 2012, *Modalitas dalam Kontestasi Politik: Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan*

Maximiliaan Lomban pada Pemilu Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010, Thesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Prasetya, Imam Yudhi. 2011. "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik". *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1, :30-40

Putra, Fadillah, 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Saldana, Johnny, 2009, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, SAGE Publications

San Martin, Pablo, 2012, *Is Nationalism an Ideology? A Critical Exploration from the Asturian Case*, *Dissidences*: Vol.3: Iss.5, Article 4, University of Leeds

Samuels, David J, and Matthew Soberg Shugart. 2010, *Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior*, Cambridge University Press, New York

Sari, Wirda, 2015, *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 Pada DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, Skripsi

Sartori, Giovanni, 1976, *Party and Party System: A Framework for Analysis*

Schonhardt, S., Hariyanto, J. dan Sentana, I.M., 2014, *World News: Asia: Indonesia Vote Tally Stirs Fears*, *The Wall Street Journal Asia*, 4, Hongkong : Dow Jones and Company Inc

Siaroff, Alan, 2006, *A Typology Of Contemporary Party Systems*, University of Lethbridge, Canada, Paper Presented at the 20th World Congress of the International Political Science Association, Fukuoka, Japan.

Singarimbun, Masri, dan Sofian, Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survey*, Cetakan Kedelapanbelas, Edisi Revisi, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

Slater, Dan 2004, *Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition*,

Smith, D. Anthony, 2003, *Nationalism and Modernism*, Routledge, New York

Soebagio, 2009, *Distorsi Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, *Makara, Sosial Humaniora*, VOL. 13, NO. 2, Desember 2009: 111-116

- Stone, Walter J., et al. 2010. *Incumbency Reconsidered: Prospects, Strategic Retirement, and Incumbent Quality in U.S. House Elections*, The Journal of Politics, Volume 72, No. 1, pp. 178-190
- Stroh, W. Guy 1968. *American Philosophy*. Princeton: Duvon Nostrand Company, Inc.
- Studwell, Joe, 2007, *ASIAN Godfathers: Money and Power in Hongkong and South-East Asia*, Pustaka Alvabet, Tangerang
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sukarno, 2014, *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme, Menurut Bung Karno*, Penerbit Media Pressindo, Jakarta
- Supriatma, Antonius Made Tony, 2009, *Menguatnnya Kartel Politik para Bos*, Jurnal Prisma Vol. 28, No. 2, Oktober 2009
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Tomsa, Dirk, dan Andreas Uffen, 2012, *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand, and the Philippines*, Routledge, New York
- Ufen, Andreas, 2006, *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and 'Philippinisation'*, GIGA Working Papers 37
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Vernardakis, Christoforos, 2012, *From Mass Parties to Cartel Parties: The Evolution of the Structure of Political Party in Greece through Changes in their Statutes and System of Financing*, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, No. 27
- Ward, Hugh, 2002, *Rational Choice, Theory and methods in political science*, Palgrave Macmillan
- Widoyoko, Danang. J, 2013, *Oligarki dan Korupsi Politik di Indonesia*, Intrans Publishing, Malang
- Wijaya, Sri Herwinda Baskara, 2010, *Komunikasi Politik Terbuka Ala PKS*, Paper Ilmiah Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret

Wollinetz, Steven, 2002, *Beyond the Catch-all Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies*, Oxford University Press

Wu, Wen-Cheng, 2001, *Duverger's Hypothesis Revisited*, *The Journal of Politics* pp. 41-73, Sochow University, Taipei

Yusdianto, 2010, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi* Vol II nomor 2, November 2010

Zuhro, R. Siti, dkk, 2009, *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali* Penerbit Ombak, Yogyakarta

Sumber Media Online/Internet/Media Massa (Cetak)

BBC Indonesia, 2010, *Usulan Pahlawan Nasional Bagi Gus Dur*, dalam edisi 2 Januari 2010 dalam <http://bbc.com/indonesia> diakses pada 2 Desember 2015 pukul 12.01

Chusnul, 2015, *Herman HN Pilih Duet dengan Pengusaha Muda*, dalam <http://www.kupastuntas.co/> edisi 19 Mei 2015, diakses pada 15 Agustus 2015 pukul 13.38

Dasa Prasetya PDI Perjuangan, diakses dalam <http://pdiperjuangan.or.id> pada 14 Desember 2015 pukul 21.16

Dua Jurai, 2015, *Bila Tak Jadi Calon Walikota, Hartarto Lojaya Ogah Ikut Pilkada Kota Bandar Lampung*, dalam <http://duajurai.com> edisi 21 April 2015 diakses pada 24 Desember 2015 pukul 13.05

Hasil Survey Indonesia Votes and Election Studies (INVEST) dalam [Rua Jurai.com](http://RuaJurai.com) edisi 13 Juli 2015, diakses pada 23 Juli 2015 pukul 14.30

Lampung Post, 2015, *Belajar Pemilukada Serentak dari Lampung*, edisi Selasa, 19 Mei 2015

Lampung Post, 2015, *DPP PKS Dukungan Duet Herman-Yusuf Kohar*, edisi Selasa 23 Juni 2015, dilansir dari <http://lampost.co/> pada 12 November 2015 pukul 14.26

- Lampung Post, 2014, *Eva Dwiana Siap Rebut Kursi Ketua DPC PDIP*, edisi 11 Desember 2014, dalam <http://lampost.co> diakses pada 19 Desember 2015 pukul 20.20
- Lampung Post, 2015, *Kader Nasdem Bertekad Menangkan Herman-Yuk*, edisi 6 September 2015, dalam <http://lampost.com> diakses pada 5 Desember 2015 pukul 17.54
- Lampung Post, 2015, *Hari Ini Tobroni Kampanye, Herman HN Konsolidasi, dan Yunus Susun Jadwal*, edisi 5 September 2015, dalam <http://lampost.com> diakses pada 5 Desember 2015 pukul 18.00
- Lampung Post, 2015, *Herman-Yuk Hadiri Konsolidasi Keluarga Besar PKB*, edisi 19 September 2015, dalam <http://lampost.com> diakses pada 5 Desember 2015 pukul 18.05
- Lampung Post, 2015, *Wasekjen DPP PDIP Meminta Kader Kompak Menangkan Herman-Kohar*, edisi 1 September 2015 dalam <http://lampost.com> diakses pada 5 Desember 2015 pukul 19.08
- Lampung Post, 2014, *NasDem Raup Suara Terbanyak di Bandar Lampung 1*, edisi Minggu, 20 April 2014 dalam <http://lampost.co> diakses pada 19 Desember 2015 pukul 20.17
- Lampung Post, 2015, *Sembilan Partai Kawal Bustami Zainudin*, edisi Minggu, 23 Agustus 2015
- Lampung Post, 2015, *Pendaftaran Tiga Pasang Cabup-Cawabup Lamteng Diiringi Kesenian Tradisional*, edisi Senin, 27 Juli 2015
- Lampung Post, 2016, *Program Terutang Tuntut Pembayaran*, edisi Jumat, 11 Maret 2016
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia pada <http://www.kpu.go.id> diakses pada 16 Agustus 2015 pukul 8.58 PM
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung pada <http://kpu-bandarlampungkota.go.id> diakses pada 1 Agustus 2015 pukul 8.10 PM
- Koran Sindo, 2015, *Incumbent Mendominasi Pilkada*, edisi 10 Desember 2015 dalam <http://koran-sindo.com> diakses pada 2 Januari 2016 pukul 09.00
- Kumoro, Bawono, 2013, *Menakar Kualitas Institusionalisasi Partai Politik dalam Sistem Multipartai di Indonesia*, dalam <http://politik.lipi.go.id> diakses pada 30 Desember 2015 pukul 14.16
- Kristiadi, Joseph, 2015, *Dominasi Parpol dalam Pilkada: Menuju Terwujudnya Sistem Partai Kartel?*, Artikel Kompas, edisi 9 Mei 2015 diakses dari

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/09/opini/1736583.htm> pada 4 Oktober 2015 pukul 13.06

Montouri, Creig, 2010, *What is Political Pragmatism?*, diakses dalam <http://quora.com> pada 16 Februari 2016 pukul 23.00

Okezone.com, 2015, *Pengamat Ungkap Penyebab Kemenangan Incumbent di Pilkada 2015*, edisi 16 Desember 2015 dalam <http://news.okezone.com/> diakses pada 2 Januari 2016 pukul 13.05

Partai Demokrat, *Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat*, pada <http://demokrat.or.id/sejarah> diakses pada 2 Desember 2015 pukul 3.12

Radar Lampung, 2013, *Alzier Bayangi Posisi Herman*, edisi 11 Maret 2013

Republika, 2015, *Pengamat: Partai KMP Menyusut, Gerindra Main Peran*, diakses dalam <http://nasional.republika.co.id> pada 23 Desember 2015 pukul 14.00

Republika, 2014, *Lembaga Survei Perlu Diaudit*, edisi Kamis 10 Juli 2014, diakses dari <http://republika.co.id> pada 7 Desember 2015 pukul 16.00

Saibumi.com, 2014, *Eva Dwiana Herman HN Siap Bersaing Menjadi Ketua DPC PDIP*, edisi 12 Desember 2014 diakses pada 19 Desember 2015 pukul 20.20

Triyadi, Dedi, 2015, *Pilkada Serentak*, Artikel Ketua Divisi Program, Keuangan Dan Logistik KPU Kota Bandar Lampung dalam <http://kpu-kotabandarlampung.go.id> diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 23.04

Tribun Lampung, 2014, *Herman HN Legowo Gugatannya Ditolak Mahkamah Konstitusi*, edisi 16 Mei 2014 diakses dalam <http://lampung.tribunnews.com> pada 1 Januari 2016 pukul 8.13

Welsh, Ian, 2015, *The Control of Parties and the Rise and Fall of Ideologies*, diakses dalam <http://ianwelsh.net> pada 14 Desember 2015 pukul 22.45

Sumber Produk Hukum/Dokumen Resmi

Booklet kader dan pengurus PDIP, 2015, Program Perjuangan PDI Perjuangan: Mencapai Indonesia Raya, Indonesia yang Sejati-jatinya Merdeka

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, 2015, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No.9/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2015

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, 2015, pada Keputusan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Nomor 5/KLB/PD/III/2013

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perubahan Hasil MS ke-VII Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Demokrat

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2008, Hasil Muktamar Luar Biasa PKB tahun 2008

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tahun 2012

Manifesto Partai Nasional Demokrat, 2011

Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya

Pedoman Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Partai Keadilan Sejahtera

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Organisasi Partai Demokrat, Nomor: PO/01/DPP.PD/II/2015 tentang Pemilihan Calon Kepala Daerah.

Partai Keadilan Sejahtera, 2015, *Jadwal Konsolidasi Struktur dan Kader dengan Herman HN*

Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan Nomor: 078/Kpts/KPU-Kota-008.435642/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang